



# SATU DASAWARSA KOLABORASI MEMBANGUN MERITOKRASI UNTUK NEGERI



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,  
Berintegritas, dan Berkeadilan

**#bangga  
melayani  
bangsa**



Hasil Pemantauan  
**PELANGGARAN NETRALITAS ASN**  
dalam Pemilu 2019

**LAUNCHING PORTAL ADUAN ASN  
& PENANDATANGANAN SKB  
PENANGANAN RADIKALISME ASN**

# SATU DASAWARSA KOLABORASI MEMBANGUN MERITOKRASI UNTUK NEGERI



## KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Collaborate with :



Ministry of Personnel  
Management



Australian Government  
Australian Public Service Commission

# TIM PENYUSUN



## Pengarah

Nurhasni  
Kepala Sekretariat KASN



## Penanggung jawab

Rizkynta Jaya Ginting  
Plt. Kabag Hukum, Kerja Sama, dan Humas



## Anggota Tim Penyusun

Merty Pasaribu  
Analisis Hukum Ahli Pertama



## Anggota Tim Penyusun

Dina Khairani  
Analisis Kerjasama Lintas Sektor



## Anggota Tim Penyusun

Iqbal Fadil  
Analisis Kerjasama Lintas Sektor

## KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan hidayah-Nya buku **Satu Dasawarsa Kolaborasi Membangun Meritokrasi untuk Negeri** ini dapat disusun. Buku ini kami persembahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara terkait kegiatan administrasi Subbagian Kerja Sama dari tahun 2014-2024 dalam mendukung pencapaian tujuan kelembagaan KASN. Kerja sama KASN yang terwujud dalam buku ini adalah cermin dari komitmen kami untuk terus mengembangkan manajemen Aparatur Sipil Negara yang responsif, akuntabel, dan berintegritas. Dengan semangat reformasi birokrasi, kami berusaha memberikan kontribusi maksimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.

Dalam kurun waktu satu dasawarsa, KASN telah menjalin kerja sama dengan 29 stakeholder yang terdiri dari instansi pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan lembaga pemerintah asing, melalui 29 naskah kerja sama (13 nota kesepahaman, 12 perjanjian kerja sama, dan 4 keputusan bersama). Buku ini bukan hanya sekadar rangkuman kegiatan, tetapi juga cermin dari evaluasi kritis terhadap kinerja kami. Kami menghadirkan data, analisis, dan rekomendasi sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat yang menjadi mitra dalam proses reformasi birokrasi ini. Melalui kata pengantar ini, kami berharap agar buku ini dapat menjadi sumber inspirasi, referensi, dan acuan bagi semua pihak yang peduli terhadap perbaikan sistem pelayanan publik dan peningkatan kualitas birokrasi.

Kami menyadari bahwa buku ini belum sempurna, sehingga kami mengharapkan masukan dan saran dari segala pihak. Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu dalam perjalanan panjang penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan inspiratif terkait langkah-langkah nyata yang telah diambil dalam upaya kami mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Salam INSPIRASI

Jakarta, 1 Juli 2024  
**Komisi Aparatur Sipil Negara**  
**Kepala Sekretariat,**

**Nurhasni**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	<b>1</b>
<b>TIM PENYUSUN</b>	<b>2</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>12</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>25</b>
A. Latar Belakang	25
B. Maksud dan Tujuan	26
C. Sasaran	27
<b>BAB II NASKAH KERJA SAMA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA</b>	<b>28</b>
1. Nota Kesepahaman antara Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Badan Kepegawaian Negara tentang Kerja Sama Kelembagaan Dalam Rangka Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara	29
2. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Negara tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	30
3. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia tentang The Australian Public Service Commission dan Komisi Aparatur Sipil Negara	33
4. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Badan Kepegawaian Negara tentang Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara	51

5. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengawasan Implementasi Kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara	52
6. Memorandum Kerja Sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dan The Ministry of Personnel Management of The Republic of Korea tentang Kerja Sama Pengawasan Aparatur Sipil Negara	54
7. Nota Kesepahaman antara Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) tentang Sinergitas Kelembagaan Dalam Rangka Pemantauan Pelanggaran Netralitas, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2019	57
8. Kerja Sama Pengawasan Netralitas pada Pemilihan Umum	62
a. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pengawasan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum	62
b. Perjanjian Kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pengawasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2019	64
9. Keputusan Bersama 11 Instansi Pemerintah tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara	66
10. Perjanjian Kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020	69
11. Kerja Sama Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika	73

a. Keputusan Bersama 13 Instansi Pemerintah tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Berbahaya Lainnya Aparatur Negara pada Instansi Pemerintah	73
b. Nota Kesepahaman antara Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Pengawasan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	75
c. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Tes/Uji Narkotika bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah	77
d. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Aparatur Sipil Negara	80
12. Keputusan Bersama 5 instansi pemerintah tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020	82
13. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengawasan Implementasi Kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara	83
14. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik Komisi Aparatur Sipil Negara	88
15. Kerja Sama Kolaborasi Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara	90

a.	Nota Kesepahaman antara Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Lembaga Administrasi Negara tentang Kolaborasi Sistem Pengawasan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara	90
b.	Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan Politeknik STIA LAN Bandung tentang Pengawasan Penerapan Sistem Merit dalam Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara melalui Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi	91
c.	Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan Politeknik STIA LAN Jakarta Lembaga Administrasi Negara tentang Swakelola Tipe II pada Paket Pekerjaan Penyusunan Policy Brief Pengawasan Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN, dan Pengawasan Netralitas ASN	94
16.	Nota Kesepahaman antara Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Badan Kepegawaian Negara tentang Kolaborasi Sistem Pengawasan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara	97
17.	Nota Kesepahaman antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pengawasan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit	99
18.	Kerja Sama Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilu dan Pemilihan	100
a.	Keputusan Bersama 5 instansi pemerintah tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan	100
b.	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024	103
19.	Nota Kesepahaman antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan Indonesian Association for Public Administration tentang Kerja Sama Pengkajian Isu Strategis dalam Pengawasan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit	105



20. Nota Kesepahaman antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pembangunan dan Pengembangan Center of Excellence Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit	107
21. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tentang Swakelola Tipe II pada Paket Pekerjaan Penyusunan Naskah Kajian Ilmiah Penataan Kelembagaan	110
22. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Pengawasan Konten Internet terkait Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024	115
<b>BAB III KERJA SAMA KASN DENGAN MITRA DALAM DAN LUAR NEGERI</b>	<b>120</b>
1. Diskusi Seminar dengan Akademisi Georg August Universitat di Berlin, Jerman pada 18-22 Juli 2017	120
2. Seminar at The Dutch Senior Civil Service di Alkmaar, Belanda pada 19-24 Juli 2017	121
3. Kunjungan Ombudsman Australia ke KASN pada 8 September 2017	122
4. The First Meeting: Improving a Human Resource Management in asian Civil Service di Tokyo, Jepang pada 25-29 September 2017	122
5. Managing Global Governance Conference in Bonn, Jerman pada 16-24 November 2017	123
6. Diskusi KASN dengan Public Service Commission of Malaysia di Putrajaya, Malaysia pada 5 Desember 2017	123
7. Diskusi KASN dengan Civil Service Commission Royal Thai Government di Nothaburi, Thailand pada 7 Desember 2017	124
8. Improving and Developing Human Resources Management in Asian Civil Service Meeting in Japan di Tokyo, Jepang pada 1-5 Oktober 2018	125
9. 2018 Asia Organization Development Network Summit di Cebu City, Filipina pada	125

24-26 Oktober 2018

10. 2018 Annual AGPA Conference: Resilience and Strong Institutions: Responses and Solutions of Public Administration di Quezon City, Filipina pada 25-28 November 2018 126
11. Kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia ke KASN pada 21 Februari 2019 127
12. Asian Association for Public Administration Annual Conference di Manila, Filipina pada 21-23 Mei 2019 127
13. 3rd Meeting on Human Resource Management Improvement in the Asian Civil Service of the National Personnel Authority (NPA) of Japan di Tokyo, Jepang pada 30 September- 4 Oktober 2019 128
14. Third Regional Workshop on ASEAN Guideline on Public Service Delivery di Siem Reap, Kambojia pada 27-30 November 2019 129
15. Knowledge Co-creation Workshop yang diselenggarakan oleh National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) di Tokyo, Jepang pada 04-07 Desember 2019 131
16. IASIA-Doha Institute Regional Conference di Doha, Qatar pada 10-13 Desember 2019 132
17. Kunjungan SKD Titik Lokasi Luar Negeri ke Kota Istanbul, Republik Turki pada 23-28 Oktober 2021 133
18. Meeting on Human Resource Management Improvement in the Asian Civil Service dari National Personnel Authority Jepang secara daring pada 22 Maret 2022 133
19. Kunjungan Anti Corruption Commission of The Maldives ke KASN pada 26 September 2022 134
20. Temasek Foundation Asia Leaders Connect 2022 di Kota Singapura, Republik Singapura pada 29 September-2 Oktober 2022 135
21. 2022 Korea Research Institute Special Workshop di Kota Hanoi, Republik Sosialis Vietnam pada 23-26 November 2022 136

22. Rencana Kegiatan Co-organizing a Multi-Country Training Workshop on Government Innovation for Social Inclusion of People in Vulnerable Situations in the Southeast Asian Region	138
23. Sharing session Pengalaman Global Menggunakan LHKPN sebagai Sumber dalam Identifikasi Col secara daring pada 23 Februari 2023	140
24. Meeting on Human Resource Management Improvement in the Asian Civil Service di Jepang pada 27 Februari-3 Maret 2023	146
25. Studi banding oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara di Korea Selatan pada 15-16 Maret 2023 dan di Jepang pada 17 Maret 2023	142
26. Pelatihan Executive Development Program Batch 1 Tahap Kedua di Singapura pada 30 April-5 Mei 2023	145
27. Pelatihan Executive Development Program Batch II di Singapura pada 4-9 Juni 2024	147
28. 2023 International Summer Conference di Korea Selatan pada 20-24 Juni 2023	148
29. Rencana kunjungan Public Service Commission Sarawak-Malaysia ke KASN	150
30. Studi banding Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara di Australia dan Selandia Baru pada 3 s.d 9 September 2023	151
31. Kunjungan kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Aparatur Sipil Negara ke Tokyo, Jepang pada 13 s.d. 17 September 2023	154
32. Diskusi Strategis Masa Depan Meritokrasi Pemerintahan Indonesia pasca Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara	155
33. Pelatihan E-Government di Taipei, Republik Tiongkok (Taiwan) pada 5 s.d. 14 November 2023	156
34. Bimbingan teknis manajemen ASN, Sistem Merit, dan Pengisian Jabatan kepada Pejabat Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) di Tokyo, Jepang pada	158

19-23 Desember 2023

35. Eksplorasi National Personnel Authority of Japan ke KASN pada 5 Maret 2024	159
<b>BAB IV HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI BENTUK JASA</b>	<b>161</b>
1. Hibah United States Agency for International Development (USAID)	161
2. Hibah Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA)	165
<b>BAB V FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR PENDUKUNG</b>	<b>171</b>
1. Faktor Penghambat	171
2. Faktor Pendukung	173
<b>BAB VI PENUTUP</b>	<b>174</b>
1. Kesimpulan	174
2. Rekomendasi	174

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Diagram Jumlah Penandatanganan Naskah Kerja Sama KASN selama 10 Tahun ( <i>Dok. Sekretariat KASN</i> )	28
Gambar 2.2.	Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofian Effendi (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KASN dengan BKN Jakarta, 16 September 2015	29
Gambar 2.3.	Kepala BKN, Bima Haria Wibisana; Ketua KASN, Sofian Effendi; Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; dan Ketua Bawaslu, Muhammad (kiri ke kanan) dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu RI dengan Kemendagri, Kementerian PANRB, KASN, dan BKN Jakarta, 2 Oktober 2015	31
Gambar 2.4.	Ketua DPD, Irman Gusman dalam Kegiatan Seminar Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2017: Damai dan Berkualitas Jakarta, 20 April 2016 ( <i>Dok. Kementerian PANRB</i> )	32
Gambar 2.5.	Wakil Ketua KASN (kedua dari kiri), Irham Dilmy dan Ketua Bawaslu, Muhammad dalam kegiatan Focus Group Discussion Evaluasi Pengawasan terhadap Netralitas ASN dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017 Jakarta, 6 April 2017	32
Gambar 2.6.	Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofian Effendi dan Komisioner Australian Public Service Commission, John Lloyd (kiri ke kanan) dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia 8 Oktober 2015	33
Gambar 2.7.	Delegasi APSC, Helen Woittiez (kedua dari kiri); Wakil Ketua KASN, Irham Dilmy; dan Anggota KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, I Made Suwandi dalam Workshop on Getting That Selection Right Jakarta, 31 Oktober 2016	34
Gambar 2.8.	Asisten KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Irwansyah dan Asisten KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Nurhasni dalam kegiatan Executive Exchange to Australian Public Service Commission Australia, November 2016	35
Gambar 2.9.	Asisten KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Irwansyah dan Asisten KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Nurhasni dalam kegiatan Executive Exchange to Australian Public Service Commission Australia, Maret 2017	36
Gambar 2.10.	Kegiatan Workshop on Getting That Selection Right Kerja Sama antara KASN dan APSC Jakarta, 2 Mei 2017	37
Gambar 2.11.	Anggota KASN Pengawasan Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, I Made Suwandi dalam kegiatan Workshop Getting That Selection Right Gelombang II Bali, 9 Mei 2017	38
Gambar 2.12.	Asisten KASN Bidang Monitoring dan Evaluasi, Irwansyah dalam Kegiatan GTSR Batch I Jakarta, 31 Juli-4 Agustus 2017	38

Gambar 2.13.	Perwakilan trainer APSC, Hellen Woittiz dan Wakil Ketua KASN, Irham Dilmy (kiri ke kanan) dalam Kegiatan GTSR Batch I Jakarta, 31 Juli 2017	39
Gambar 2.14.	Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofian Effendi dan Ketua APSC, John Lloyd (kiri ke kanan) dalam Ramah Tamah sebelum Pertemuan dengan Wakil Presiden Jakarta, 15 November 2017	39
Gambar 2.15.	Ketua KASN, Sofian Effendi dan Anggota KASN Bidang Penelitian dan Pengkajian Sistem, Nuraida Mokhsen dalam kegiatan Pelatihan Code of Conduct Investigation Jakarta, 28-30 November 2017	40
Gambar 2.16.	Ketua KASN, Sofian Effendi; Anggota KASN Bidang Monitoring dan Evaluasi, Waluyo; Asisten KASN Bidang Promosi dan Advokasi, Abdul Wakhid; Asisten KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Septiana Dwiputrianti; Kepala Sekretariat KASN, Harry Mulya Zein; dan Kepala Bagian Hukum dan Humas, Rahmat Siregar bersama Komisioner APSC, John Llyod dan tim dalam pertemuan Kerja Sama Peningkatan Kapasitas ASN dan Pelayanan Publik Jakarta, 12 Maret 2018	41
Gambar 2.17.	Pembicara APSC, Joanne Mars dalam Kegiatan Workshop Getting That Selection Right Jakarta, 12-13 Maret 2018	42
Gambar 2.18.	Anggota KASN Bidang Monitoring dan Evaluasi, Waluyo dan Anggota KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Nuraida Mokhsen dalam kegiatan Strategic Dialogue on Integrity and Transparency Australia, 16-20 April 2018	42
Gambar 2.19.	Kegiatan Training Code of Conduct Investigation Surakarta, 31 Juli-2 Agustus 2018	43
Gambar 2.20.	Kegiatan Training Code of Conduct Investigation Bali, 6-8 Agustus 2018	43
Gambar 2.21.	Asisten KASN Pengawasan Bidang Monitoring dan Evaluasi, Abdul Hakim dan Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Sumardi dalam Kegiatan Executive Exchange Australia Canberra, 18 Februari-1 Maret 2019	44
Gambar 2.22.	Ketua KASN, Sofian Effendi; Wakil Ketua KASN, Irham Dilmy; Anggota KASN Bidang Monitoring dan Evaluasi, Waluyo; Anggota KASN Bidang Penelitian dan Pengkajian Sistem, Nuraida Mokhsen; Anggota KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, I Made Suwandi, Anggota KASN Bidang Promosi dan Advokasi, Prijono Tjiptoherijanto mengikuti Executive Roundtable Meeting “National Talent Management and Public Sector Reform bersama APSC Jakarta, 26 Februari 2019	45
Gambar 2.23.	Kegiatan Senior Leadership Roundtable Discussion on Leadership Responses to Covid19 antara APSC dengan Pemerintah Indonesia Jakarta (dalam jaringan), 5 November 2020	45
Gambar 2.24.	Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, IGNAY Endrawan; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN Rolly Rochmad Purnomo dan Nurhasni, Ketua KASN, Agus Pramusinto; Assistant Commissioner APSC for Inclusion, Catherine Seaberg; International Director of APSC, Mark Colwell, dan Senior Adviser Public Sector PROSPERA, Deva Rachman (kiri ke kanan) dalam Jakarta, 18 Mei 2022	46

Gambar 2.25.	Pertemuan pimpinan KASN dengan PROSPERA terkait persiapan pertemuan dengan MPC Jakarta (dalam jaringan), 15 September 2022	47
Gambar 2.26.	Anggota KASN Pengawasan Bidang Pengisian JPT I, Rudiarto Sumarwono; Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian JPT II, Kusen Kusdiana, dan Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit I, Mugi Syahriadi dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus Penyusunan Background Study RPJMN 2025-2029 Bidang Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Jakarta, 2 November 2022	48
Gambar 2.27.	Kegiatan Human Resource Management in Public Sector: Opportunity and Challenge Jakarta, 22 Juni 2023	49
Gambar 2.28.	Pimpinan KASN bersama PROSPERA dalam Rapat Persiapan Penataan Kelembagaan KASN Pasca-Revisi UU ASN Jakarta (dalam jaringan), 14 Juli 2023	50
Gambar 2.29.	Pertemuan Ketua, Asisten, dan Kepala Sekretariat KASN dengan First Assistant Commissioner, Workplace Reform and Diversity APSC, Jo Talbot Jakarta, 28 Februari 2024	50
Gambar 2.30.	Naskah Perjanjian Kerjasama antara KASN dengan BKN	51
Gambar 2.31.	Ketua KASN, Sofian Effendi dan Ketua KPK, Agus Rahardjo (kiri ke kanan) dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPK dengan KASN Jakarta, 16 November 2017	52
Gambar 2.32.	Anggota KASN Bidang Mediasi dan Perlindungan, Tasdik Kinanto (dua dari kiri) dan Wali Kota Tangsel selaku Ketua APEKSI, Airin Rachmi Diany (kanan) sebelum pertemuan dengan KPK Jakarta, 2 Maret 2018 ( <i>Dok. kompas.com</i> )	53
Gambar 2.33.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian “Akselerasi Pelaksanaan Sistem Merit” Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Makassar, 24 Oktober 2019	54
Gambar 2.34.	Menteri Manajemen Kepegawaian Republik Korea, Kim Pan Suk dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Sofian Effendi (kiri ke kanan) dalam Opening Ceremony Memorandum of Cooperation between The Indonesian Civil Service Commission and The Ministry of Personnel Management of The Republic of Korea Yogyakarta, 22 Maret 2018	55
Gambar 2.35.	Anggota KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, I Made Suwandi; Asisten KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Sumardi; Kepala Subbagian Pengelola Data; dan Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Nurhasni dalam Kegiatan Strategic Dialogue Korea, 28-29 November 2018	56
Gambar 2.36.	Pertemuan daring Anggota KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Tinggi Wilayah I, Rudiarto Sumarwono dan The Senior Deputy Director of MPM, Lee Kyungah terkait Rencana Pembaharuan Kerja Sama Jakarta (dalam jaringan), 30 Agustus 2021	57
Gambar 2.37.	Ketua KASN, Sofian Effendi dan Direktur Pattiro, Maya Rostanty (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KASN dengan Pattiro Jakarta, 1 Maret 2019	58
Gambar 2.38.	Kegiatan Kampanye Publik “ASN Netral, Birokrasi Kuat” Jakarta, 10 Maret	59

2019

Gambar 2.39.	Asisten KASN Bidang Promosi dan Advokasi, Nurhasni bersama Bawaslu dan Pattiro dalam kegiatan Training CSO Peningkatan Kapasitas Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilu 2019 Surabaya, 11 Maret 2019	59
Gambar 2.40.	Kegiatan pelatihan pemantauan netralitas ASN Jakarta, 12 April 2019 ( <i>Dok. Pattiro</i> )	60
Gambar 2.41.	Asisten KASN Bidang Promosi dan Advokasi, Nurhasni dan Asisten KASN Bidang Penanganan Pengaduan dan Penyelidikan, Kukuh Heruyanto dalam Pertemuan penyampaian hasil pemantauan pelanggaran netralitas ASN oleh PATTIRO Jakarta, 28 Mei 2019	60
Gambar 2.42.	Kegiatan refleksi Pemilu 2019: Netralitas ASN dan Kualitas Prosedur Demokrasi Jakarta, 6 Agustus 2019	61
Gambar 2.43.	Laporan Hasil Pemantauan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu 2019	61
Gambar 2.44.	Pemberian paraf nota kesepahaman Pengawasan Netralitas Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai KASN secara simbolik pada Kegiatan Deklarasi Komitmen Bersama Menjelang Kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye Pemilu Jakarta, 23 Maret 2019 (Sumber: Media X Elshinta)	62
Gambar 2.45.	Rapat Lanjutan Pembahasan Draf MoU dan Persiapan Rakornas Pengawasan Netralitas ASN, Anggota Polri, dan Anggota TNI pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Jakarta, 24 Oktober 2023	63
Gambar 2.46.	Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara	65
Gambar 2.47.	Kampanye Publik “ASN Netral, Birokrasi Kuat” Jakarta, 10 Maret 2019	65
Gambar 2.48.	Ketua KASN, Sofian Effendi memberikan sambutan dan arahan pada Workshop bagi Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Solo, 22 Juli 2019	66
Gambar 2.49.	Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto; Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Hariyono; Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara, Zaelani; Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto; Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Mohamad Nur Kholis Setiawan; Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate; Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji; Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo; Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Didik Suhardi; Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, A. Adang Supriyadi; Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, Supranawa Yusuf (kiri ke kanan) dalam Launching Portal Aduan ASN & Penandatanganan SKB Penanganan Radikalisme ASN Jakarta, 12 November 2019	67
Gambar 2.50.	Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto dalam Penandatanganan Keputusan Bersama Penanganan Radikalisme ASN Jakarta, 12 November 2019	68
Gambar 2.51.	Staf Khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bidang Penanganan Radikalisme, Yoyon Tony Surya Putra; Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo; Menteri Agama,	68



Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar; Akademisi Guru Besar Universitas Indonesia, Gumilar R. Somantri; Sekretaris Program Pascasarjana FIA UI selaku Moderator, Teguh Kurniawan (kiri ke kanan) dalam Launching Aplikasi ASN No Radikal dan Webinar Dalam Rangka Memperingati HUT RI ke-75 Tahun “Strategi Menangkal Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara” Jakarta, 2 September 2020 (Dok. Kementerian PANRB)

Gambar 2.52.	Kegiatan kampanye publik “Deklarasi Netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2020” Makassar, 8 Maret 2020	70
Gambar 2.53.	Ketua Bawaslu, Abhan dan Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dengan KASN Jakarta, 17 Juni 2020	70
Gambar 2.54.	Salah satu Poster Kegiatan Gerakan Nasional Netralitas ASN yang diselenggarakan dalam jaringan pada Selasa, 30 Juni 2020	71
Gambar 2.55.	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Irwansyah; Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto; dan Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Arie Budhiman (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN Jakarta (dalam jaringan), 26 Agustus 2020	71
Gambar 2.56.	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Nurhasni; Ketua KASN, Agus Pramusinto; dan Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Arie Budhiman (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN Jakarta (dalam jaringan), 7 Oktober 2020	72
Gambar 2.57.	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Nurhasni dalam Kegiatan Webinar Netralitas ASN Makassar (dalam jaringan), 9 Desember 2020	72
Gambar 2.58.	Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto dalam Penandatanganan Keputusan Bersama Pelaksanaan P4GN oleh Aparatur Negara pada Instansi Pemerintah Jakarta, 26 Juni 2020	74
Gambar 2.59.	Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo; Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto; dan Kepala Badan Narkotika Nasional, Heru Winarko (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan Keputusan Bersama Pelaksanaan P4GN oleh Aparatur Negara pada Instansi Pemerintah Jakarta, 26 Juni 2020	74
Gambar 2.60.	Kepala Badan Narkotika Nasional, Petrus R Golose dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KASN dengan BNN RI Bogor, 18 November 2021	76
Gambar 2.61.	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN, Tagam Sinaga, dan Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KASN dan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Jakarta, 17 Juni 2022	77

Gambar 2.62.	Direktur Kerja Sama, Deputi Bidang Hukum & Kerja Sama BNN, RM Aria Teguh Mahendra Wibisono (kiri atas) dalam kegiatan Konsinyasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri KASN Jakarta, 11 Juli 2023	78
Gambar 2.63.	Rapat koordinasi Uji Petik Narkotika Jakarta (dalam jaringan), 3 Agustus 2023	79
Gambar 2.64.	Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Arie Budhiman (kedua dari kiri) dan Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, Mohamad Aris Purnomo (ketiga dari kiri) dalam kegiatan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Uji Petik Tes Narkotika pada ASN Provinsi Jawa Timur Surabaya, 9 Agustus 2023	79
Gambar 2.65.	Pelaksanaan Uji Petik Narkotika pada 63 PPT dan 12 ASN Provinsi Jawa Timur Surabaya, 10 Agustus 2023	80
Gambar 2.66.	Direktur Advokasi BNN, Jafriedi dan Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KASN dan Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Jakarta, 17 Juni 2022	81
Gambar 2.67.	Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo dalam Penandatanganan Simbolis Keputusan Bersama 5 K/L tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Jakarta, 10 September 2020	82
Gambar 2.68.	Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Kegiatan Penandatanganan Simbolis Keputusan Bersama 5 K/L tentang Netralitas Jakarta (dalam jaringan), 10 September 2020	83
Gambar 2.69.	Ketua KASN, Agus Pramusinto dan Ketua KPK, Firlis Bahuri (kiri ke kanan) dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPK dengan KASN Jakarta, 28 Januari 2021	84
Gambar 2.70.	Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto dalam Rapat Koordinasi Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai KASN Jakarta, 25 Mei 2021	85
Gambar 2.71.	Sosialisasi dan Internalisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KASN oleh KPK Jakarta (dalam jaringan), 22 Juli 2021	85
Gambar 2.72.	Kegiatan Knowledge Sharing Penerapan Whistleblowing System di Lingkungan KASN Jakarta (dalam jaringan), 21 Oktober 2021	86
Gambar 2.73.	Kegiatan Rapat Pembahasan dan Evaluasi Kerja Sama Komisi Aparatur Sipil Negara Jakarta, 5 Desember 2022	86
Gambar 2.74.	Asisten KASN Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Mugi Syahriadi bersama Sekretaris Daerah se Provinsi Bengkulu dalam Kegiatan Audiensi Penilaian Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN Bengkulu, 22 Februari 2023	87
Gambar 2.75.	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Mukhlis Irfan dalam Rapat Koordinasi Advokasi Percepatan Penerapan sistem Merit di Pemerintah Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara Manado, 7 Juni 2023	88

Gambar 2.76.	Kepala Sekretariat KASN, Abdul Hakim (kanan) didampingi Ketua KASN, Agus Pramusinto (kiri) dalam Penandatanganan PKS antara KASN dengan BSR, BSSN secara Elektronik Jakarta (dalam jaringan), 25 Agustus 2021	89
Gambar 2.77.	Contoh Dokumen yang Menggunakan Sertifikat Elektronik BSR, BSSN	89
Gambar 2.78.	Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman KASN dan LAN secara <i>Desk to Desk</i> Jakarta, 5 November 2021	91
Gambar 2.79.	Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, Muhamad Nur Afandi, dan Kepala Sekretariat KASN, Nurhasni (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan PKS antara KASN dan Politeknik STIA LAN Bandung, 30 Agustus 2023	92
Gambar 2.80.	Ketua Jurusan Politeknik STIA LAN Bandung, Septiana Dwiputrianti; Kepala Sekretariat KASN, Nurhasni; Ketua KASN, Agus Pramusinto; Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, Muhamad Nur Afandi; Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan PKS antara KASN dan Politeknik STIA LAN Bandung dan Kuliah Dosen Tamu Bandung, 30 Agustus 2023	93
Gambar 2.81.	Ketua KASN, Agus Pramusinto sebagai Dosen Tamu Kuliah "Optimalisasi Pengawasan dan Pelayanan Publik dalam Menyongsong Transformasi Kepemimpinan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045" Bandung, 30 Agustus 2023	93
Gambar 2.82.	Kepala Sekretariat KASN, Nurhasni dan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Nurliah Nurdin dalam Penandatanganan PKS antara KASN dan Politeknik STIA LAN Jakarta secara <i>Desk to Desk</i> Jakarta, 20 Maret 2024	94
Gambar 2.83.	Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun dengan tema "Penguatan Substansi Policy Brief terkait Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku (NKK) dan Netralitas ASN" Jakarta, 30 Mei 2024	95
Gambar 2.84.	Kegiatan Focus Group Discussion Penyusunan Policy Brief dengan Tema Kode Etik dan Netralitas ASN Malang, 3 April 2024	96
Gambar 2.85.	Policy Brief Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagai Pedoman Pelaksanaan Fungsi dan Tugas ASN dan Policy Brief Netralitas Aparatur Sipil Negara Pasca Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara	96
Gambar 2.86.	Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman KASN dan BKN secara <i>Desk to Desk</i> Jakarta, 5 November 2021	97
Gambar 2.87.	Rapat Penyusunan PKS antara KASN dengan BKN Jakarta (dalam jaringan), 4 April 2022	98
Gambar 2.88.	Rapat Pembahasan Naskah PKS antara KASN dengan BKN Jakarta (dalam jaringan), 10 Mei 2022	98
Gambar 2.89.	Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih; Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja sebagai saksi; dan Ketua KASN, Agus Pramusinto (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KASN dan ORI Jakarta, 31 Mei 2022	99
Gambar 2.90.	Talk Show "Sinergi Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada Serentak" Jakarta, 31 Mei 2022	100

Gambar 2.91.	Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Kegiatan Penandatanganan Keputusan Bersama Netralitas Pegawai ASN bersama Plt. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana; Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas; Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian; dan Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja (kiri ke kanan) Jakarta, 22 September 2022	101
Gambar 2.92.	Kegiatan Konsinyasi Rapat Koordinasi Tim Satuan Tugas Menghadapi Pemilihan Tahun 2024 dan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut PPK terhadap Rekomendasi KASN dan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Tahun 2024 Jakarta, 23 Februari 2024	102
Gambar 2.93.	Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dan Ketua KASN, Agus Pramusinto (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan PKS antara Bawaslu RI dan KASN Jakarta, 31 Januari 2023	103
Gambar 2.94.	KASN-Bawaslu bersama perwakilan Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan BKN dalam Kegiatan Penandatanganan PKS Bawaslu RI dan KASN Jakarta, 31 Januari 2023	104
Gambar 2.95.	Pranata Humas Ahli Muda Bawaslu, R Alief Sudewo dan Kepala Sekretariat KASN, Nurhasni (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Konsinyasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri KASN Jakarta, 11 Juli 2023	105
Gambar 2.96.	Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan & Riset FISIP UNPAD, Ida Widianingsih; Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto; Wakil Ketua Umum Bidang Kerjasama dan Pengembangan Profesi IAPA, Sri Juni Woro Astuti; Ketua KASN, Agus Pramusinto; Ketua Departemen Administrasi Publik FISIP UNPAD, Asep Sumaryana (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KASN dan IAPA Sumedang, 23 September 2022	106
Gambar 2.97.	Kegiatan Penyusunan Kajian Pengawasan Imparsialitas ASN Jakarta (dalam jaringan), 31 Oktober 2022	107
Gambar 2.98.	Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KASN dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Bandung, 28 Juli 2023	108
Gambar 2.99.	Ketua KASN, Agus Pramusinto; Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja; dan Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KASN dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Bandung, 28 Juli 2023	109
Gambar 2.100.	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II, Satria Adi (dua dari kiri) dan Kepala BKD Jawa Barat, Sumasna dalam kegiatan Sosialisasi Center of Excellence dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Bandung, 8 November 2023	110
Gambar 2.101.	Kepala Sekretariat KASN, Nurhasni dan Dekan FISIP UGM, Wawan Mas'udi dalam Kegiatan Penandatanganan PKS antara KASN dengan FISIP UGM disaksikan Ketua KASN, Agus Pramusinto (kanan) dan Ketua Tim Kajian Gabriel Lele (kiri) Yogyakarta, 7 Agustus 2023	111
Gambar 2.102.	Dosen Manajemen dan Kebijakan Pemerintahan sebagai Ketua Tim Kajian, Gabriel Lele; Dekan FISIP UGM, Wawan Mas'udi; Kepala Sekretariat KASN, Nurhasni; Ketua KASN, Agus Pramusinto (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan PKS antara KASN dengan FISIP UGM Yogyakarta, 7	112

Agustus 2023

Gambar 2.103.	Kegiatan Penyusunan Kontrak Kerja KASN dan FISIP UGM Yogyakarta, 7 Agustus 2023	112
Gambar 2.104.	Kegiatan FGD Penyusunan Naskah Kajian Ilmiah Penataan Kelembagaan KASN Jakarta (langsung dan dalam jaringan), 7 September 2023	113
Gambar 2.105.	Pertemuan Lanjutan Penataan Kelembagaan Jakarta (dalam jaringan), 26 September 2023	113
Gambar 2.106.	Hasil Kajian Penyiapan Penataan Kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara/Lembaga Pengawas Penerapan Sistem Merit pasca-Revisi Undang-Undang ASN	114
Gambar 2.107.	Dirjen Aptika, Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan dan Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan PKS antara KASN dan Ditjen Aptika, Kementerian Kominfo Jakarta, 26 Oktober 2023	115
Gambar 2.108.	Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan dan Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto (kiri ke kanan) dalam Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan PKS antara KASN dan Ditjen Aptika, Kementerian Kominfo Jakarta, 26 Oktober 2023	116
Gambar 2.109.	Forum Tematik Bakohumas “Mengejar Mimpi Netralitas Birokrasi” Jakarta, 22 November 2023	117
Gambar 2.110.	Penayangan konten netralitas ASN pada TV One	117
Gambar 2.111.	Penayangan konten Literasi Digital Kementerian Kominfo berisikan kampanye netralitas ASN melalui media instagram	118
Gambar 2.112.	Penayangan konten Netralitas ASN pada videotron Jabodetabek Jalan Proklamasi (kiri atas), Pluit (kanan atas), Botani Square Baranangsiang, Bogor (kiri bawah), dan Jakarta Selatan (kanan bawah)	118
Gambar 2.113.	Penayangan logo ASN Pilih Netral melalui videotron Grahatama Perpustakaan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta	119
Gambar 3.1.	Pertemuan KASN dengan Kedutaan Besar Indonesia untuk Jerman, 19 Juli 2017	120
Gambar 3.2.	Anggota KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, I Made Suwandi dan Asisten KASN Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Irwansyah dalam Kunjungan kegiatan Seminar at The Dutch Senior Civil Service di Alkmaar, Belanda, 19-24 Juli 2017	121
Gambar 3.3.	Ketua Ombudsman Australia, Michael Manthorpe dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofian Effendi dalam Pertemuan Pembahasan Potensi Kerja Sama Jakarta, 8 September 2017	122
Gambar 3.4.	Asisten KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Septiana Dwiputrianti dalam Kegiatan The First Meeting: Improving a Human Resource Management in asian Civil Service Jepang, 25-29 September 2017	123

Gambar 3.5.	Kegiatan Diskusi KASN dalam kunjungan ke Office of the Civil Service Commission Thailand, 7 Desember 2017	124
Gambar 3.6.	Kunjungan ke Office of the Civil Service Commission Thailand, 7 Desember 2017	125
Gambar 3.7.	Kegiatan 2018 Annual AGPA Conference Resilience and Strong Institutions: Responses and Solutions of Public Administration to Disruption Stresses and Shock Filipina, 25-28 November 2018	126
Gambar 3.8.	Pertemuan antara Duta Besar Australia, Gary Francis Quinlan dengan Ketua KASN, Sofian Effendi; Anggota KASN Bidang Monitoring dan Evaluasi, Waluyo; Anggota KASN Bidang Promosi dan Advokasi, Prijono Tjiptoherijanto Jakarta, 21 Februari 2019	127
Gambar 3.9.	Asisten KASN Bidang Promosi dan Advokasi, Nurhasni dalam kegiatan The 3rd Meeting on Human Resource Management Improvement in the Asian Civil Service of the National Personnel Authority Jepang, 30 September-4 Oktober 2019	129
Gambar 3.10.	Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Kegiatan the Third Regional Workshop on ASEAN Guideline on Public Service Delivery Kambodja, 27-29 November 2019	130
Gambar 3.11.	Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam kegiatan Knowledge Co-creation Workshop Jepang, 4-7 Desember 2019	131
Gambar 3.12.	Anggota KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Sri Hadiati Wara Kustriani dan Asisten KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Septiana Dwiputrianti dalam Kegiatan IASIA-Doha Institute Regional Conference Qatar, 10-13 Desember 2019	132
Gambar 3.13.	Anggota KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I, Rudiarto Sumarwono dalam Kegiatan Meeting on Human Resource Management Improvement in the Asian Civil Service Jakarta (dalam jaringan), 22 Maret 2022	134
Gambar 3.14.	Presiden Anti-Corruption Commission Maladewa, Adam Shamil dan Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Pertemuan antara Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Anti Corruption Commission of The Maldives Jakarta, 26 September 2022	135
Gambar 3.15.	Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Kegiatan Temasek Foundation Asia Leaders Connect 2022 Singapura, 29 September-2 Oktober 2022	136
Gambar 3.16.	Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Kegiatan 2022 Korea Research Institute Special Workshop "Sharing Knowledge and Experiences in Policy Implementation for National Development between Korea-ASEAN Countries in the Post COVID-19 Era" Vietnam, 23-26 November 2022	137
Gambar 3.17.	Rapat Penyampaian Tanggapan dan Pertanyaan terkait Rencana Co-organizing a Multi-Country Training Workshop on Government Innovation for Social Inclusion of People in Vulnerable Situations in the Southeast Asian Region Jakarta (dalam jaringan), 16 Desember 2022	138
Gambar 3.18.	Kepala Sekretariat KASN, Nurhasni; Ketua KASN, Agus Pramusinto; Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari; Anggota KASN	139

Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani; dan Direktur Monitoring dan Evaluasi PMO Kartu Prakerja, Cahyo Prihadi (kiri ke kanan) dalam Pertemuan Ketua KASN dengan PMO Jakarta, 13 Januari 2023

Gambar 3.19.	Rapat Rencana Kegiatan Social Inclusion Training Workshop Coordination UNPOGxPMOxKASN Jakarta (dalam jaringan), 17 Januari 2023	140
Gambar 3.20.	Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan “Training Workshop on Promoting Government Innovation for Social Inclusion of People in Vulnerable Situations in the Southeast Asian Region” Jakarta (dalam jaringan), 19 Januari 2023	140
Gambar 3.21.	Sharing session Pengalaman Global Menggunakan LHKPN sebagai Sumber dalam Identifikasi Col Jakarta (dalam jaringan), 23 Februari 2023	141
Gambar 3.22.	Anggota KASN Pengawasan Bidang Pengisian JPT Wilayah I, Rudiarto Sumarwono dalam kegiatan Meeting on Human Resource Management Improvement in the Asian Civil Service Jepang, 28 Februari s.d. 2 Maret 2023	142
Gambar 3.23.	Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Iwan Agustiawan Fuad; dan Staf KASN, Farah Muthi dalam Studi Banding dengan National Human Resource Development Institute, Republic of Korea (NHI RoK) Korea Selatan, 15 Maret 2023	143
Gambar 3.24.	Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Iwan Agustiawan Fuad; dan Staf KASN, Farah Muthi dalam Studi Banding dengan Human Resources, Laws, and Regulation Division, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea (HRLRD MoFA RoK) Korea Selatan, 16 Maret 2023	144
Gambar 3.25.	Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Iwan Agustiawan Fuad; dan Staf KASN, Farah Muthi dalam Pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo Jepang, 17 Maret 2023	144
Gambar 3.26.	Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Iwan Agustiawan Fuad; dan Staf KASN, Farah Muthi dalam Studi Banding dengan Japan National Personnel Authority (JNPA) dan Division for Human Resources, Ministry of Foreign Affairs of Japan (DHR MoFAJ) Jepang, 17 Maret 2023	145
Gambar 3.27.	Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Pelatihan Executive Development Program Batch 1 Tahap Kedua Singapura, 1-4 Maret 2023	146
Gambar 3.28.	Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani; Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I, John Ferianto dalam Pelatihan Executive Development Program (EDP) Batch II Singapura, 5-8 Juni 2023	147
Gambar 3.29.	Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam kegiatan 2023 International Summer Conference Korea Selatan, 20-24 Juni 2023	149

Gambar 3.30.	Kegiatan Meeting of Indonesian Civil Service Commission and Public Service Commission of Sarawak-Malaysia Jakarta (dalam jaringan), 15 Agustus 2023	150
Gambar 3.31.	Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Iwan Agustiawan Fuad; dan Staf KASN, Farah Muthi dalam Pertemuan Delegasi dalam Kegiatan Diskusi Terpumpun Penerapan Sistem Merit Bersama Seluruh ASN di Kawasan Australia dan Selandia Baru secara Hybrid KJRI Sydney Australia, 5 September 2023	151
Gambar 3.32.	Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Iwan Agustiawan Fuad; dan Staf KASN, Farah Muthi dalam Pertemuan Delegasi dalam Kegiatan Studi Banding dengan Australian Public Service Commission dan Merit Protection Commissioner Australia, 5 September 2023	152
Gambar 3.33.	Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Iwan Agustiawan Fuad; dan Staf KASN, Farah Muthi dalam Pertemuan Delegasi dalam Kegiatan Studi Banding dengan Ministry of Foreign Affairs and Trade of New Zealand Selandia Baru, 7 September 2023	153
Gambar 3.34.	Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Iwan Agustiawan Fuad; dan Staf KASN, Farah Muthi dalam Kegiatan Studi Banding dengan Public Service Commission New Zealand Selandia Baru, 7 September 2023	153
Gambar 3.35.	Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto dalam kegiatan Uji Publik Rancangan Undang-Undang tentang ASN Jepang, 13-17 September 2023	154
Gambar 3.36.	Policy Brief Penguatan Lembaga Pengawas Penerapan Sistem Merit dan Netralitas ASN pasca UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Policy Brief Permasalahan Masuknya Prajurit TNI dan Anggota Polri dalam Undang-Undang ASN	155
Gambar 3.37.	Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi KASN, Hendra Kusuma dalam Pelatihan E-Government oleh Kementerian Digital dan Direktorat Jenderal Personalia, Eksekutif Yuan Taiwan Republik Tiongkok, 5-14 November 2023	157
Gambar 3.38.	Ketua KASN, Agus Pramusinto dan Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian JPT Wilayah I, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan dalam Bimbingan Teknis Manajemen ASN, Sistem Merit, dan Pengisian Jabatan kepada Pejabat Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) Tokyo, Jepang, 19-23 Desember 2023	158
Gambar 3.39.	Plt. Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, Rizkynta J Ginting; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II, Agus Sudyanto; Anggota KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I, Rudiarto Sumarwono; Penerjemah pertemuan,; Ketua KASN, Agus Pramusinto; Director of International Affairs Division NPA, Ms. Maeda Satoko; International Affairs Research Officer, Ms. Keiko Koshiishi; dan Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Maria Ivonne Tarigan (kiri ke kanan) dalam Kunjungan National Personnel Authority of Japan Jakarta, 5 Maret 2024	159



Gambar 4.1.	Exit Meeting Program USAID CEGAH Jakarta (dalam jaringan), 6 Agustus 2021	164
Gambar 4.2.	Rapat Koordinasi Evaluasi PROSPERA Jakarta (dalam jaringan), 24 Februari 2022	168
Gambar 4.3.	Koordinasi KASN-Kemenko Perekonomian tentang Kelanjutan Administrasi Hibah PROSPERA pasca Revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Jakarta, 13 Oktober 2023	169

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. KASN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan secara kelembagaan diberikan kewenangan berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN.

KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Sedangkan, tugas KASN adalah menjaga netralitas Pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KASN perlu menjaga hubungan baik dan membangun kerja sama baik dengan mitra kerja sama dalam maupun luar negeri. Mitra yang dimaksud antara lain instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah asing, bahkan organisasi nonpemerintah. Kerja sama yang dibangun oleh KASN bertujuan untuk mendukung peningkatan kapasitas maupun kapabilitas dalam hal keterbatasan instansi secara kelembagaan, organisasi, maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

Kerja sama antar instansi pemerintah sejalan dengan penerapan dari konsep *whole of government* yakni melaksanakan pelayanan yang terintegrasi dengan cara meningkatkan kolaborasi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Hal ini tentunya mendukung dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh KASN terhadap seluruh ASN Indonesia termasuk ASN yang ditempatkan di perwakilan di negara lain. Selain bekerja bersama, penguatan lembaga melalui kerja sama juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan saling berbagi wawasan dan pengalaman

untuk selanjutnya mengadopsi sistem kinerja dari instansi mitra kerja dalam atau luar negeri untuk diterapkan di KASN.

Dengan pertimbangan di atas, maka Sekretariat KASN, dalam menjalin kerja sama antara KASN dengan mitra kerja sama, baik dalam negeri dan luar negeri, berperan dalam memfasilitasi analisis kebutuhan, persiapan kerja sama, pengurusan administrasi, hingga pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam maupun luar negeri.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Buku ini disusun dengan maksud untuk memberikan pandangan yang komprehensif dan objektif tentang pelaksanaan kolaborasi dan kerja sama kelembagaan dalam perjalanan 10 tahun KASN, serta menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan strategis di masa depan bagi lembaga yang mengemban tugas pengawasan ASN selanjutnya.

Penyusunan buku ini ditujukan untuk:

1. Menyajikan data yang relevan

Menyediakan data-data dan statistik yang relevan untuk mendukung analisis dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama KASN.

2. Menilai kinerja dan capaian

Menganalisis efektivitas kerja sama yang dilakukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan kelembagaan.

3. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan

Menganalisis hambatan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kerja sama dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

4. Menyoroti keberhasilan dan praktik baik

Memaparkan keberhasilan kunci dan praktik terbaik yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja sama KASN.

5. Memberikan rekomendasi untuk masa depan

Merumuskan rekomendasi-rekomendasi strategis penguatan kerja sama untuk lembaga pengemban tugas pengawasan ASN selanjutnya.

## **C. Sasaran**

Sasaran penyusunan buku ini adalah berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama maupun Aparatur Sipil Negara sebagai subjek pengawasan KASN.

### **1. Sasaran untuk Internal**

#### **a. Penyajian data dan analisis mendalam**

Menyediakan data lengkap disertai analisis pencapaian, dampak, hambatan, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kolaborasi KASN dengan mitra kerja sama.

#### **b. Evaluasi kinerja dan efektivitas**

Mengevaluasi capaian yang dihasilkan dari kerja sama KASN sebagai dukungan terhadap kinerja organisasi melalui efektivitas pelaksanaan berbagai program, proyek, atau inisiatif yang telah diimplementasikan dalam 10 tahun.

#### **c. Penguatan kapasitas dan pembelajaran organisasi**

Memetakan upaya penguatan kapasitas internal, pembelajaran organisasi, dan peningkatan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal.

### **2. Sasaran untuk mitra kerja sama**

#### **a. Transparansi dan informasi yang akurat**

Memberikan informasi yang jelas, terperinci, dan akurat tentang pelaksanaan, pencapaian, tantangan, serta keberhasilan yang telah dicapai dalam kerangka kerja sama.

#### **b. Kolaborasi dan sinergi**

Menganalisis kolaborasi, upaya sinergi, serta pencapaian bersama yang menggambarkan keberhasilan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

#### **c. Pemetaan keberlanjutan dan pengembangan**

Memberikan pandangan tentang keberlanjutan proyek atau inisiatif yang dapat dilakukan, serta rekomendasi untuk peningkatan dan pengembangan keberhasilan pengawasan ASN di masa mendatang.

## BAB II

### NASKAH KERJA SAMA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki batasan kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KASN tentu tidak dapat bekerja maksimal tanpa dukungan dari pihak lain. Selama sepuluh tahun terakhir, KASN telah melakukan banyak kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah baik dalam dan luar negeri. Kerja sama secara umum dilakukan dengan mitra yang memiliki irisan tugas dengan KASN dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengatur kolaborasi demi terpecahkannya tantangan yang dihadapi bersama melalui perluasan akses dan jangkauan; pengoptimalan sumber daya; peningkatan kapasitas dan kompetensi; serta pembangunan sistem dan proses bisnis bersama.

Kerja sama yang dilakukan oleh KASN dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja teknis KASN baik sesuai proses bisnis di lima tahun pertama yaitu Bidang Penanganan Pengaduan dan Penyelidikan, Bidang Mediasi dan Perlindungan, Bidang Monitoring dan Evaluasi, Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, dan Bidang Promosi dan Advokasi; maupun sesuai proses bisnis baru yang dibagi menjadi Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit, Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN.

Adapun jumlah kerja sama yang dilakukan KASN selama 10 tahun ini dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Diagram Jumlah Penandatanganan Naskah Kerja Sama KASN selama 10 Tahun  
(Dok. Sekretariat KASN)

Dalam bab ini, akan dibahas secara mendalam mengenai realisasi naskah kerja sama yang telah dilaksanakan selama sepuluh tahun antara KASN dengan mitra kerja sama melalui 13 nota kesepahaman, 12 perjanjian kerja sama, maupun 4 keputusan bersama. Bab ini akan berfokus pada kegiatan yang dilakukan secara bersama sebagai tindak lanjut dari penandatanganan naskah kerja sama tersebut. Realisasi kerja sama yang dimaksud pada buku ini disajikan dalam bentuk pengelompokan kerja sama berdasarkan tahun penandatanganan dikombinasikan dengan pengelompokan naskah kerja sama sebagai tindak lanjut dari naskah berdasarkan topik yang sama.

### **1. Nota Kesepahaman antara Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Badan Kepegawaian Negara tentang Kerja Sama Kelembagaan Dalam Rangka Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara**

Sebagai lembaga yang baru terbentuk, KASN tidak dapat menjalankan tugasnya sendiri, sehingga dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi untuk mendorong pelaksanaan pengawasan kebijakan dan manajemen ASN yang lebih baik. Dengan tujuan besar yang sama menuju ASN kelas dunia, KASN dan BKN mengawali kolaborasi dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang Kerja Sama Kelembagaan dalam rangka Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara.



Gambar 2.2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofian Effendi (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KASN dengan BKN  
Jakarta, 16 September 2015

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada 16 September 2015 dengan ruang lingkup kerja sama meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem merit dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi kepegawaian ASN yang dibutuhkan, peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan Profesi ASN, dan pelibatan BKN dalam bentuk penyediaan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan sistem merit dan pengawasan penerapan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku pegawai ASN.

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama ini, KASN dan BKN telah berkoordinasi dalam pemanfaatan data dan informasi yang dibutuhkan oleh KASN dalam pelaksanaan tugas pengawasan ASN dengan mengikuti berbagai inovasi dari BKN. Selain itu KASN dan BKN juga terus berkoordinasi dalam pengembangan sistem, standar, dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan ASN serta saling mendukung perbaikan sistem manajemen ASN secara menyeluruh, termasuk pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan pengelolaan karir ASN. Selanjutnya, KASN dan BKN juga melaksanakan langkah konkret lainnya dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan profesional melalui manajemen ASN yang baik.

## **2. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Negara tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**

Dengan meningkatnya laporan pelanggaran netralitas berupa keterlibatan ASN dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemerintah perlu lebih mengoptimalkan pengawasan terkait dengan netralitas ASN. Dalam rangka menunjukkan komitmen bersama 5 instansi pemerintah terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka ditandatangani nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur

Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada 2 Oktober 2015.



Gambar 2.3. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana; Ketua KASN, Sofian Effendi; Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; dan Ketua Bawaslu, Muhammad (kiri ke kanan) dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu RI dengan Kemendagri, Kementerian PANRB, KASN, dan BKN  
Jakarta, 2 Oktober 2015

Nota kesepahaman ini memiliki ruang lingkup yang meliputi kegiatan bersama dalam melakukan pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar kode etik, kode perilaku ASN dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Melalui kerja sama ini telah terbentuk Forum Koordinasi, Sinkronisasi, dan Komunikasi Pengawasan Netralitas yang akan merumuskan dan mendorong tindak lanjut hasil pengawasan, melakukan pertukaran data dan informasi, melaksanakan sosialisasi bersama melalui diskusi kelompok terpusat, seminar, dan kegiatan lainnya sesuai dengan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.





Gambar 2.4. Ketua DPD, Irman Gusman dalam Kegiatan Seminar Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2017: Damai dan Berkualitas  
Jakarta, 20 April 2016  
(Dok. Kementerian PANRB)

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman ini adalah dilaksanakannya Seminar Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2017: Damai dan Berkualitas pada 20 April 2016 yang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2017-2018.



Gambar 2.5. Wakil Ketua KASN (kedua dari kiri), Irham Dilmy dan Ketua Bawaslu, Muhammad dalam kegiatan Focus Group Discussion Evaluasi Pengawasan terhadap Netralitas ASN dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017  
Jakarta, 6 April 2017

Bentuk tindak lanjut lain dari nota kesepahaman ini adalah dilaksanakannya kegiatan Focus Group Discussion Evaluasi Pengawasan terhadap Netralitas ASN dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017 yang diikuti oleh Wakil Ketua KASN, Irham Dilmy. Dalam pertemuan ini, Ketua Bawaslu, Muhammad menegaskan bahwa pengawasan netralitas ASN harus ditingkatkan jika ASN tetap memiliki hak pilih. Selanjutnya, secara kelembagaan, KASN sebagai lembaga pengawas seharusnya diperkuat seperti KPK, bukan justru memiliki pertimbangan untuk dibubarkan.

Selain kegiatan bersama, KASN selalu melakukan koordinasi terutama pertukaran data dan informasi dengan keempat instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya.

### **3. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia tentang The Australian Public Service Commission dan Komisi Aparatur Sipil Negara**

Selain kolaborasi dengan instansi yang memiliki irisan tugas, sebagai instansi yang baru dibentuk, KASN memandang perlu untuk terus melakukan studi tiru sistem pengawasan ASN kepada sesama instansi pengawas ASN pada negara lain. Salah satu instansi yang memiliki kesamaan tugas dan fungsi dengan KASN adalah Australian Public Service Commission, sehingga diperlukan suatu kerja sama yang memungkinkan untuk melakukan pertukaran keahlian dan pengalaman antar instansi dalam bidang manajemen kepegawaian, pengembangan kepemimpinan, dan reformasi birokrasi.



Gambar 2.6. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofian Effendi dan Komisioner Australian Public Service Commission, John Lloyd (kiri ke kanan) dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia  
8 Oktober 2015

Adapun kerja sama ini ditandatangani pada 8 Oktober 2015 dan bertujuan untuk mengembangkan tata kelola sektor publik berkelanjutan dengan berfokus pada reformasi sektor publik, meningkatkan kapasitas dalam mendukung reformasi birokrasi yang sistemik, dan memperkuat kolaborasi dan meningkatkan keterlibatan kedua instansi dalam manajemen dan reformasi sektor publik.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kerja sama ini, diantaranya telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:



Gambar 2.7. Delegasi APSC, Helen Woittiez (kedua dari kiri); Wakil Ketua KASN, Irham Dilmy; dan Anggota KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, I Made Suwandi dalam Workshop on Getting That Selection Right Jakarta, 31 Oktober 2016

Kegiatan Workshop on Getting That Selection Right merupakan kegiatan pembekalan bagi calon panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di pusat maupun daerah dengan tujuan menambah wawasan terkait sistem merit di instansi pemerintah. Workshop ini dilaksanakan pada 31 Oktober 2016 yang juga menghadirkan Delegasi dari APSC, Helen Woittiez, yang telah berpartisipasi aktif membantu pengembangan sistem merit dalam pemerintah di negara-negara Asia Pasifik.



Gambar 2.8. Asisten KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Irwansyah dan Asisten KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Nurhasni dalam kegiatan Executive Exchange to Australian Public Service Commission Australia, November 2016

Untuk mempelajari praktik baik pelaksanaan tugas pengawasan ASN yang diterapkan oleh Negara Australia secara langsung, KASN beberapa kali melakukan studi tiru melalui berbagai kegiatan Executive Exchange dengan mengirimkan Asisten KASN sebagai perwakilan pada pembelajaran salah satunya pada November 2016. Pada kegiatan ini, Asisten KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Irwansyah dan Asisten KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Nurhasni mempelajari terkait perbedaan kewenangan serta proses bisnis manajemen ASN Australia, dan mengambil beberapa masukan yang dapat diterapkan dengan beberapa penyesuaian di Indonesia.



Gambar 2.9. Asisten KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Irwansyah dan Asisten KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Nurhasni dalam kegiatan Executive Exchange to Australian Public Service Commission Australia, Maret 2017

Pada bulan Maret 2017, Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Irwansyah dan Asisten KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Nurhasni kembali mengikuti kegiatan Executive Exchange ke Australia sebagai pembelajaran lanjutan dari kegiatan pada akhir tahun sebelumnya.



Gambar 2.10. Kegiatan Workshop on Getting That Selection Right Kerja Sama antara KASN dan APSC Jakarta, 2 Mei 2017

Kegiatan Workshop on Getting That Selection Right dilaksanakan dalam 2 Batches yang masing-masingnya berjalan dalam 2 hari yaitu untuk Batch I dari tanggal 2-5 Mei 2017 dan untuk Batch II dari tanggal 4-5 Mei 2017. Pada pembukaan acara Ketua KASN, Sofian Effendi menyampaikan harapannya agar workshop ini dapat meningkatkan mutu hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi ke depannya.



Gambar 2.11. Anggota KASN Pengawasan Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, I Made Suwandi dalam kegiatan Workshop Getting That Selection Right Gelombang II Bali, 9 Mei 2017

Selanjutnya, Kegiatan Workshop on Getting That Selection Right Gelombang II dilaksanakan dalam 2 batches di Bali. Workshop on GTSR Batch I dilaksanakan pada tanggal 8-9 Mei 2017, sedangkan GTSR Batch II dilaksanakan pada 10-11 Mei 2017. Adapun pembicara pada acara ini adalah Joanne Marsh sebagai perwakilan untuk berbagi praktik baik seleksi jabatan pimpinan tinggi oleh APSC.



Gambar 2.12. Asisten KASN Bidang Monitoring dan Evaluasi, Irwansyah dalam Kegiatan GTSR Batch I Jakarta, 31 Juli-4 Agustus 2017

Kegiatan Training of Trainer Getting That Selection Right kembali dilaksanakan di Jakarta dalam 2 Batches. GTSR Batch I dilaksanakan pada 31 Juli-4 Agustus 2017, sedangkan GTSR Batch II dilaksanakan pada 7-11 Agustus 2017.



Gambar 2.13. Perwakilan trainer APSC, Hellen Woittiz dan Wakil Ketua KASN, Irham Dilmy (kiri ke kanan) dalam Kegiatan GTSR Batch I Jakarta, 31 Juli 2017

Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan trainer dan asesor maupun peserta tes yang kompeten dalam menyeleksi maupun menjalankan tugas negara kedepannya. Sebagian besar peserta pelatihan adalah akademisi dan tokoh pemerintah.



Gambar 2.14. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofian Effendi dan Ketua APSC, John Lloyd (kiri ke kanan) dalam Ramah Tamah sebelum Pertemuan dengan Wakil Presiden Jakarta, 15 November 2017

Selanjutnya, Ketua KASN melakukan pertemuan informal dengan Ketua APSC sebelum pelaksanaan agenda dengan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017. Kegiatan ini membahas terkait pengalaman kedua instansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.





Gambar 2.15. Ketua KASN, Sofian Effendi dan Anggota KASN Bidang Penelitian dan Pengkajian Sistem, Nuraida Mokhsen dalam kegiatan Pelatihan Code of Conduct Investigation Jakarta, 28-30 November 2017

Pada 28-30 November 2017, dilaksanakan Code of Conduct Training yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan investigasi penyelidikan KASN terkait kasus pelanggaran kode etik ASN. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh Anggota dan Asisten KASN, serta beberapa pejabat struktural Sekretariat dan perwakilan Kementerian PANRB dan BKN. Sementara delegasi APSC dipimpin oleh Asisten Komisioner Karen Vine Camp didampingi instruktur investigasi Jashon dan Hellen Woitties.

Dengan semakin eratnya kerja sama antara KASN dengan Pemerintah Australia terutama APSC, pada 4 Desember 2017, KASN menyetujui penerimaan anggaran hibah yang ditawarkan oleh Department of Foreign Affairs and Trade, Australia melalui penandatanganan *Subsidiary Arrangement between The Government of Australia and The Government of Indonesia relating to the Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA)* yang secara lebih terperinci akan dijelaskan pada bab selanjutnya dalam buku ini. Adapun anggaran hibah ini digunakan sebagai pembiayaan kegiatan bersama antara KASN dengan APSC pada ke depannya.



Gambar 2.16. Ketua KASN, Sofian Effendi; Anggota KASN Bidang Monitoring dan Evaluasi, Waluyo; Asisten KASN Bidang Promosi dan Advokasi, Abdul Wakhid; Asisten KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Septiana Dwiputrianti; Kepala Sekretariat KASN, Harry Mulya Zein; dan Kepala Bagian Hukum dan Humas, Rahmat Siregar bersama Komisioner APSC, John Llyod dan tim dalam pertemuan Kerja Sama Peningkatan Kapasitas ASN dan Pelayanan Publik Jakarta, 12 Maret 2018

Pada 12 Maret 2018, KASN kembali melaksanakan pertemuan dengan APSC tentang rencana kegiatan bersama pada 2018 yang membahas terkait pengelolaan sumber daya aparatur negara dan pelayanan publik. John menjelaskan pentingnya kepemimpinan, integritas, dan manajemen kinerja yang baik dari ASN terutama pejabat pimpinan tinggi untuk menjalankan pemerintahan yang efektif. Sedangkan untuk meningkatkan kepemimpinan dibutuhkan kemampuan kerja sama, kompetensi, dan keahlian digital. Dalam pertemuan ini, Ketua KASN menyatakan pentingnya Indonesia mengadopsi kebijakan Australia dengan mengangkat pejabat tinggi yang berasal dari swasta baik dalam skala nasional maupun internasional sehingga dapat memajukan organisasi secara lebih dinamis.



Gambar 2.17. Pembicara APSC, Joanne Mars dalam Kegiatan Workshop Getting That Selection Right Jakarta, 12-13 Maret 2018

Pada kesempatan yang sama dengan pertemuan Pimpinan KASN dan Pimpinan APSC, berlangsung juga kegiatan Workshop Getting That Selection Right selama 2 hari mulai dari 12-13 Maret 2018 dengan pembicara dari APSC, Joanne Mars.



Gambar 2.18. Anggota KASN Bidang Monitoring dan Evaluasi, Waluyo dan Anggota KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Nuraida Mokhsen dalam kegiatan Strategic Dialogue on Integrity and Transparency Australia, 16-20 April 2018

Pada tanggal 16-20 April 2018, Anggota KASN Bidang Monitoring dan Evaluasi, Waluyo dan Anggota KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Nuraida Mokhsen mengikuti kegiatan Strategic Dialogue with The Australian Public Service Commission di Sydney, Australia. Kegiatan difokuskan pada pembahasan terkait integritas aparatur dan transparansi.



Gambar 2.19. Kegiatan Training Code of Conduct Investigation Surakarta, 31 Juli-2 Agustus 2018

Selain pelaksanaan rangkaian kegiatan GTSR, KASN dan APSC juga melaksanakan rangkaian kegiatan Pelatihan Code of Conduct Investigation untuk instansi pemerintah terkait. Pelatihan ini kembali menerapkan terkait praktik baik pemerintah Australia dengan mendatangkan trainer Jason Clark dari APSC.



Gambar 2.20. Kegiatan Training Code of Conduct Investigation Bali, 6-8 Agustus 2018

Untuk menjangkau peserta yang lebih banyak dengan akses yang lebih mudah, kegiatan dilaksanakan di dua kota yang berbeda yaitu di Surakarta pada 31 Juli-2 Agustus 2018 dan di Bali pada 6-8 Agustus 2018. Pada kegiatan ini peserta pelatihan dikelompokkan untuk memecahkan kasus tertentu.



Gambar 2.21. Asisten KASN Pengawasan Bidang Monitoring dan Evaluasi, Abdul Hakim dan Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Sumardi dalam Kegiatan Executive Exchange Australia  
Canberra, 18 Februari-1 Maret 2019

Pada 18 Februari-1 Maret 2019, 2 (dua) orang Asisten KASN mengikuti kegiatan executive exchange ke APSC di Canberra untuk mengetahui dan mempelajari terkait mekanisme pelaksanaan tugas APS secara keseluruhan khususnya terkait aspek-aspek manajemen talenta, perencanaan dan strategi kelompok kerja, kerangka kerja manajemen talenta, dan pembentukan SDM untuk mendukung manajemen talenta, serta topik lain yang dibutuhkan oleh peserta.



Gambar 2.22. Ketua KASN, Sofian Effendi; Wakil Ketua KASN, Irham Dilmy; Anggota KASN Bidang Monitoring dan Evaluasi, Waluyo; Anggota KASN Bidang Penelitian dan Pengkajian Sistem, Nuraida Mokhsen; Anggota KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, I Made Suwandi, Anggota KASN Bidang Promosi dan Advokasi, Prijono Tjiptoherijanto mengikuti Executive Roundtable Meeting “National Talent Management and Public Sector Reform bersama APSC Jakarta, 26 Februari 2019

Selanjutnya, terdapat kegiatan Executive Roundtable Meeting yang dilaksanakan pada 26 Februari 2019 yang juga dibiayai melalui hibah dari Pemerintah Australia. Kegiatan Executive Roundtable Meeting ini dihadiri oleh Kementerian PANRB dan Asisten KASN Pengawasan Bidang Monitoring dan Evaluasi, Irwansyah; Asisten KASN Pengawasan Bidang Promosi dan Advokasi, Nurhasni; dan Asisten KASN Bidang Penelitian dan Pengkajian Sistem, Septiana Dwiputrianti.



Gambar 2.23. Kegiatan Senior Leadership Roundtable Discussion on Leadership Responses to Covid19 antara APSC dengan Pemerintah Indonesia Jakarta (dalam jaringan), 5 November 2020

Dengan adanya Pandemi Covid-19, Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang terdiri dari 4 instansi pengelola manajemen Aparatur Sipil Negara melaksanakan pertemuan secara daring untuk mendiskusikan rencana kegiatan kerja sama yang akan menjadi prioritas hingga pertengahan 2021. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, disepakati bahwa 3 topik prioritas dalam kerja sama ini adalah *flexible working arrangement/WFH*, *performance management*, dan *elearning/distance learning*. Pada pertemuan ini disepakati bahwa akan ditunjuk perwakilan masing-masing instansi untuk menjadi tim teknis yang mana dari KASN mengirimkan 5 orang untuk setiap topik. Namun setelah pelaksanaan pertemuan tindak lanjut 3 Key Priorities and Activities yang dilaksanakan pada 2 Desember 2020, tidak ada lagi informasi terkait kelanjutan dari pengelolaan ketiga tim teknis ini.

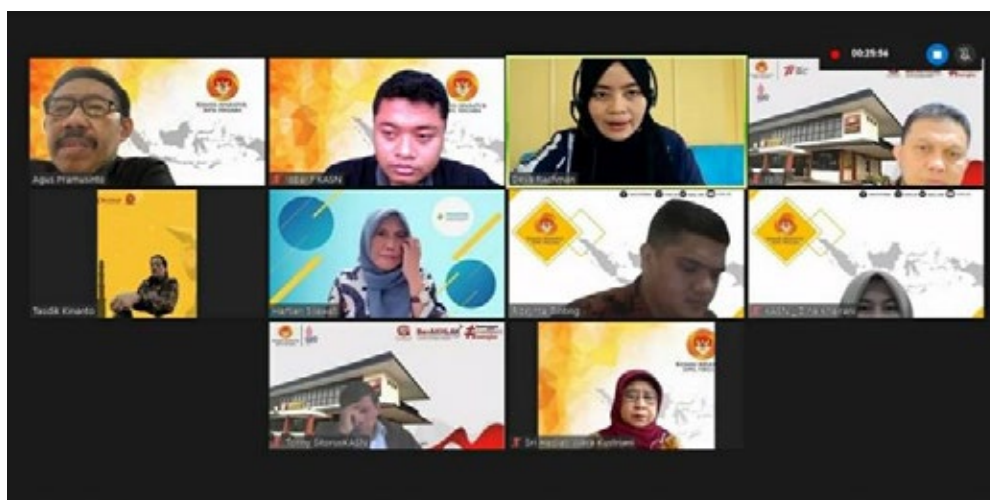


Gambar 2.24. Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, IGWAY Endrawan; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN Rolly Rochmad Purnomo dan Nurhasni, Ketua KASN, Agus Pramusinto; Assistant Commissioner APSC for Inclusion, Catherine Seaberg; International Director of APSC, Mark Colwell, dan Senior Adviser Public Sector PROSPERA, Deva Rachman (kiri ke kanan) dalam Jakarta, 18 Mei 2022

Setelah hampir 3 tahun, pada 18 Mei 2022 KASN kembali menerima kunjungan APSC yang diwakili Assistant Commissioner for Inclusion, Catherine Seaberg dan International Director of APSC, Mark Colwell yang disambut oleh Ketua dan 3 Asisten KASN secara langsung, dan diikuti oleh Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I secara dalam jaringan. Pada pertemuan ini, APSC menyampaikan bahwa di Australia, setiap instansi akan mengidentifikasi pegawai yang memiliki kinerja

yang sangat baik untuk dilakukan pengembangan dan pemeliharaan skill untuk selanjutnya dipersiapkan dalam kompetisi pengisian JPT. Selain itu, setiap individu harus memiliki kesadaran untuk pengembangan kompetensi dan ini dapat diterapkan di Indonesia yang belum sepenuhnya mengimplementasikan manajemen talenta.

Menindaklanjuti rencana pertemuan dalam jaringan dan kunjungan langsung Merit Protection Commissioner ke Kantor KASN pada November-Desember 2022, maka telah dilaksanakan pertemuan KASN dan PROSPERA terkait persiapan pertemuan dengan MPC.



Gambar 2.25. Pertemuan pimpinan KASN dengan PROSPERA terkait persiapan pertemuan dengan MPC  
Jakarta (dalam jaringan), 15 September 2022

Setelah beberapa kali dilakukan koordinasi bersama PROSPERA dan APSC namun tidak ditemukannya kesepakatan terkait rencana kunjungan MPC ke KASN, pada tanggal 28 Oktober 2022, KASN menerima surat dari APSC yang menyatakan pengunduran jadwal kunjungan ke Indonesia dikarenakan terdapat beberapa penyesuaian organisasi di internal MPC.

Pada tanggal 2 November 2022, Anggota KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I, Rudiarto Sumarwono, Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II, Kusen Kusdiana, dan Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Mugi Syahriadi didampingi beberapa staf kelompok kerja dan Sekretariat KASN menghadiri undangan



kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus Penyusunan Background Study RPJMN 2025-2029 Bidang Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.



Gambar 2.26. Anggota KASN Pengawasan Bidang Pengisian JPT I, Rudiarto Sumarwono; Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian JPT II, Kusen Kusdiana, dan Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit I, Muji Syahriadi dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus Penyusunan Background Study RPJMN 2025-2029 Bidang Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Jakarta, 2 November 2022

Kegiatan ini dilaksanakan di kantor PROSPERA dengan beberapa pembicara Mark Colwell dan Bapak Irham Dilmy. Pada pertemuan ini PROSPERA menyampaikan hasil studi terkait Potret GEDSI Birokrasi Indonesia-Temuan dari Glass Ceiling Study oleh PROSPERA dan GEDSI dalam Background Study RPJMN. Pertemuan ini difokuskan untuk membahas inklusivitas gender dan disabilitas yang sudah mulai menjadi perhatian pada sistem pemerintahan. Praktik baik dari sektor privat dan penerapan pada pemerintah Australia juga menjadi pertimbangan dalam diskusi ini. Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan Bappenas, Kementerian PANRB, dan BKN.

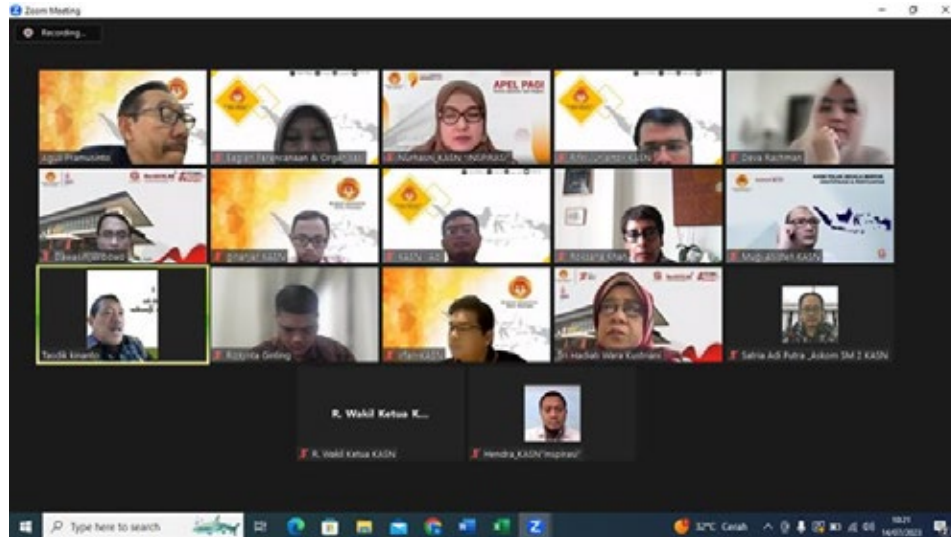
Kegiatan Human Resource Management in Public Sector: Opportunity and Challenge dilaksanakan pada 22 Juni 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh staf Sekretariat perwakilan Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat dan Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum. Pembicara pada kegiatan ini adalah Assistant Commissioner, Culture and Inclusion, Australian Taxation Office, Allison Doyle, B.Ed, M.Ed (Hons), Grad. Dip (Bus).



Gambar 2.27. Kegiatan Human Resource Management in Public Sector: Opportunity and Challenge Jakarta, 22 Juni 2023

Pada kegiatan ini Assistant Commissioner, Culture and Inclusion of Australian Taxation Office menyampaikan 3 prinsip yang diterapkan di sektor publik terutama menghadapi kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) yaitu prinsip sama rata, sesuai kebutuhan, dan inklusi keberagaman. Salah satu solusi dalam menghadapi ini adalah penerapan flexible working arrangement dan penggunaan *software* gratis sehingga status pernikahan, kondisi fisik, dan lainnya tidak lagi menjadi pertimbangan dalam perekrutan pegawai. Kegiatan ini dihadiri juga oleh perwakilan Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, Ombudsman RI, dan beberapa instansi lainnya yang bergabung secara dalam jaringan.

Menindaklanjuti rencana penguatan kelembagaan KASN dalam dinamika penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, Pimpinan KASN memberikan arahan untuk mengadakan kajian yang melibatkan ahli dalam menyusun opsi struktur kelembagaan KASN yang akan diajukan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut. Sehingga sebagai salah satu opsi, KASN mencoba melibatkan ahli melalui PROSPERA dengan melaksanakan Rapat Persiapan Penataan Kelembagaan KASN Pasca-Revisi UU ASN pada 14 Juli 2023.



Gambar 2.28. Pimpinan KASN bersama PROSPERA dalam Rapat Persiapan Penataan Kelembagaan KASN Pasca-Revisi UU ASN Jakarta (dalam jaringan), 14 Juli 2023

Namun, pada pertemuan ini, PROSPERA menyatakan ketidakmampuan untuk melakukan kajian tersebut mengingat mereka merupakan pihak eksternal dari Pemerintah Indonesia. Sehingga diskusi ini tidak dilanjutkan pada tahap selanjutnya.



Gambar 2.29. Pertemuan Ketua, Asisten, dan Kepala Sekretariat KASN dengan First Assistant Commissioner, Workplace Reform and Diversity APSC, Jo Talbot Jakarta, 28 Februari 2024

Meskipun sudah menerima informasi terkait pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan telah menerima permohonan penghentian hibah PROSPERA, APSC merasa masih dapat berkoordinasi dan

menyampaikan apresiasi terhadap kinerja KASN yang akan segera dialih tugaskan ke Kementerian PANRB atau BKN, sehingga mereka masih menginisiasi pertemuan sebagai bagian dari agenda pertemuan dengan Kementerian PANRB dan BKN. Pada pertemuan ini, Ketua KASN menegaskan bahwa setelah pemilu di pertengahan Februari lalu, pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada masih perlu dikawal.

#### 4. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Badan Kepegawaian Negara tentang Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara

Penilaian kompetensi adalah suatu proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan. Hasil penilaian kompetensi pegawai negeri sipil hanya berlaku untuk 2 tahun, sehingga perlu dilakukan penilaian berkala untuk melihat rekomendasi saran penempatan dan pengembangan seorang pegawai.



Gambar 2.30. Naskah Perjanjian Kerjasama antara KASN dengan BKN

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2016 dan bertujuan untuk mengetahui kompetensi PNS di lingkungan KASN. Pada perjanjian ini, kedua instansi sepakat untuk melakukan validasi dan penetapan jenis dan level kompetensi sesuai tuntutan jabatan di instansi KASN, menyusun simulasi penilaian kompetensi, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penilaian kompetensi. Adapun hasil penilaian ini akan digunakan tidak hanya sebagai bahan masukan penempatan pegawai tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai keperluan pembinaan dan penyelenggaraan

manajemen ASN secara nasional. Dengan demikian, perjanjian ini bukan hanya memperkuat kerja sama antara KASN dan BKN, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan mutu dan efektivitas penilaian kompetensi PNS, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

##### **5. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengawasan Implementasi Kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengawas pengisian jabatan pimpinan tinggi, KASN seringkali menemukan praktik penyelewengan pengisian jabatan publik melalui suap, jual beli jabatan atau transaksi pegawai, dan rekomendasi atas dasar relasi atau kekerabatan, namun dengan keterbatasan kewenangan, KASN tidak memiliki instrumen untuk menangani temuan tersebut, sehingga dibutuhkan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, untuk penguatan secara preventif, dipandang perlu menanamkan integritas yang baik melalui sosialisasi pendidikan anti korupsi kepada pegawai ASN.



Gambar 2.31. Ketua KASN, Sofian Effendi dan Ketua KPK, Agus Rahardjo (kiri ke kanan) dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPK dengan KASN Jakarta, 16 November 2017

Memandang adanya semangat yang sama antara KASN dan KPK yaitu untuk menciptakan ASN yang bersih dari praktik korupsi, maka KASN pada tanggal 16 November 2017 telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengawasan Implementasi Kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara. Kerja sama ini berfokus pada pendidikan/sosialisasi anti korupsi dengan membangun integritas dan peningkatan kapasitas pegawai KASN serta mempelajari praktik baik di internasional; pertukaran data dan informasi terkait tugas masing-masing seperti hasil studi, putusan in kracht pengadilan, dan data pelanggaran dengan indikasi tipikor pada kegiatan seleksi JPT; serta pencegahan tindak pidana KKN melalui peningkatan kepatuhan laporan LHKPN, pengendalian gratifikasi, pemberian dukungan terhadap pelaksanaan rekomendasi oleh PPK terkait pelanggaran tipikor, peningkatan kapasitas, dan dukungan narasumber dan ahli.

Di antara tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman ini adalah dilaksanakannya pertemuan antara Bidang Pencegahan KPK, Wakil Ketua KASN, dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) pada 2 Maret 2018.



Gambar 2.32. Anggota KASN Bidang Mediasi dan Perlindungan, Tasdik Kinanto (dua dari kiri) dan Wali Kota Tangsel selaku Ketua APEKSI, Airin Rachmi Diany (kanan) sebelum pertemuan dengan KPK Jakarta, 2 Maret 2018  
(Dok. kompas.com)

Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi ketiga pihak terkait sistem merit terutama dalam pelaksanaan pengisian dan pemberhentian dari jabatan, serta persoalan dan solusi yang sering ditemui dalam pembinaan manajemen ASN.



Gambar 2.33. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian “Akselerasi Pelaksanaan Sistem Merit” Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Makassar, 24 Oktober 2019

Kolaborasi antara KASN dan KPK terkait dugaan kasus korupsi kolusi dan nepotisme berjalan berkelanjutan khususnya dalam kasus yang terindikasi adanya jual beli jabatan seperti pendalaman 13 kasus di instansi pusat dan daerah yang sedang ditangani KASN pada Maret 2019. Begitupun dalam pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit, KASN sering menggandeng KPK untuk terlibat dalam upaya peningkatan penerapan sistem merit seperti dalam kegiatan sosialisasi sistem merit di Sulawesi Selatan pada 24 Oktober 2019.

#### **6. Memorandum Kerja Sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dan The Ministry of Personnel Management of The Republic of Korea tentang Kerja Sama Pengawasan Aparatur Sipil Negara**

Didasari pentingnya melakukan pengembangan kapasitas instansi dalam upaya penerapan sistem merit di seluruh instansi pemerintah, KASN berupaya untuk terus belajar bahkan dari negara lain yang telah menerapkan sistem merit dengan baik seperti Korea Selatan. Melalui pertemuan dengan Ministry of Personnel Management Republic of Korea di Seoul pada 27-30 November 2017 yang diikuti oleh Wakil Ketua KASN, Irham Dilmy, Anggota KASN Bidang Promosi dan Advokasi, Prijono Tjiptoherijanto, Asisten KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Anggara Hayun Anujprana, dan perwakilan Sekretariat KASN, Mugi Syahriadi, KASN melihat potensi kerja sama yang dapat dilakukan dengan The Ministry of Personnel Management (MPM) sebagai instansi pengelola ASN di Korea. MPM merupakan instansi pemerintah pusat Korea yang

bertanggung jawab dalam merancang dan mengimplementasi berbagai kebijakan terkait ASN termasuk rekrutmen, remunerasi, pengembangan SDM, program kesejahteraan dan pensiun, dan etika dan disiplin pegawai ASN Korea. Instansi ini dibentuk untuk menguatkan keadilan, transparansi, dan keseimbangan inovasi melalui sistem pengelolaan ASN di Korea.

Setelah mencapai kesepakatan, sebagai bentuk komitmen perwujudan penerapan sistem birokrasi yang lebih bersih dan profesional untuk mampu meningkatkan perekonomian Indonesia, pada tanggal 23 Maret 2018, KASN melakukan penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) dengan Ministry of Personnel Management of The Republic of Korea.



Gambar 2.34. Menteri Manajemen Kepegawaian Republik Korea, Kim Pan Suk dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Sofian Effendi (kiri ke kanan) dalam Opening Ceremony Memorandum of Cooperation between The Indonesian Civil Service Commission and The Ministry of Personnel Management of The Republic of Korea Yogyakarta, 22 Maret 2018

Kerja sama ini berfokus pada isu pengembangan dan pengawasan sistem merit, pengembangan kepatuhan terhadap kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara, penanganan pengaduan dan investigasi yang akan dilaksanakan melalui pertemuan pakar atau pimpinan tinggi, publikasi, berbagi informasi, dan kegiatan peningkatan kapasitas SDM lainnya.





Gambar 2.35. Anggota KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, I Made Suwandi; Asisten KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Sumardi; Kepala Subbagian Pengelola Data; dan Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Nurhasni dalam Kegiatan Strategic Dialogue Korea, 28-29 November 2018

Sebagai kelanjutan dari penandatanganan kerja sama ini, pada 26-30 November 2018, KASN melakukan kunjungan ke Ministry of Personnel Management di Seoul, Korea Selatan untuk melaksanakan Strategic Dialogue terkait 2 dari 11 topik yang diusulkan KASN yaitu pengisian jabatan pimpinan tinggi dan penyelesaian konflik antar pegawai.

Pada penerapannya, dalam masa berlaku 3 tahun, kerja sama ini tidak terlalu berjalan dengan berkelanjutan seefektif rencana awal. Sehingga pada Agustus 2021, KASN menerima surat permohonan pembaharuan kerja sama dari MPM Korea melalui Kedutaan Besar Korea, sehingga KASN pun menyambut baik permohonan tersebut dengan menyampaikan permohonan pelaksanaan pertemuan dalam jaringan yang selanjutnya disepakati dilaksanakan pada 30 Agustus 2021.



Gambar 2.36. Pertemuan daring Anggota KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Tinggi Wilayah I, Rudiarto Sumarwono dan The Senior Deputy Director of MPM, Lee Kyungah terkait Rencana Pembaharuan Kerja Sama Jakarta (dalam jaringan), 30 Agustus 2021

Pada pertemuan ini, KASN maupun MPM saling mengevaluasi pelaksanaan kerja sama sebelumnya dan menyampaikan usulan ruang lingkup kerja sama yang dapat dilaksanakan berdasarkan penandatanganan perjanjian yang baru sekaligus dengan rincian kegiatan agar perencanaan lebih baik. Namun setelah dilakukan beberapa kali rencana kerja sama ini tidak menemui kesepakatan, sehingga tidak dapat dilanjutkan.

## 7. Nota Kesepahaman antara Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) tentang Sinergitas Kelembagaan Dalam Rangka Pemantauan Pelanggaran Netralitas, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Selain dengan instansi pemerintah dan pemerintahan luar negeri, KASN juga menjalin kerja sama dengan organisasi nonpemerintah sebagai pihak netral dan eksternal pemerintah yang dapat memberikan pandangan tanpa kepentingan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga KASN dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Salah satu mitra NGO KASN adalah Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) yang bergerak di bidang riset dan advokasi dan berfokus pada isu tata kelola pemerintah dalam mendorong terwujudnya pemerintah yang baik, transparan, dan adil. Bersama PATTIRO, KASN telah menandatangani nota kesepahaman pada 1 Maret 2019

tentang Sinergitas Kelembagaan Dalam Rangka Pemantauan Pelanggaran Netralitas, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019.



Gambar 2.37. Ketua KASN, Sofian Effendi dan Direktur Pattiro, Maya Rostanty (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KASN dengan Pattiro Jakarta, 1 Maret 2019

Dalam kerja sama ini, KASN dan PATTIRO bersepakat untuk berkolaborasi dalam ruang lingkup pertukaran data dan informasi terkait pemantauan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu Tahun 2019, bersama-sama mencegah pelanggaran netralitas ASN melalui kampanye publik gerakan netralitas ASN dan mempublikasikannya pada media masing-masing, dan melakukan pemantauan pelanggaran netralitas ASN serta mengoptimalkan mekanisme pengaduan melalui aplikasi Lapor KASN.

Nota kesepahaman ini tidak hanya memfokuskan pada pemantauan, tetapi juga menekankan pentingnya edukasi dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman ASN terkait dengan netralitas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku yang berlaku. Kolaborasi ini menciptakan mekanisme yang lebih kuat untuk menangani pelanggaran yang teridentifikasi dan memperkuat kesadaran etika di kalangan ASN.



Gambar 2.38. Kegiatan Kampanye Publik “ASN Netral, Birokrasi Kuat” Jakarta, 10 Maret 2019

Bentuk tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman KASN dan PATTIRO di antaranya keikutsertaan aktif dalam kegiatan kampanye publik KASN dalam rangka pemberian edukasi dan sosialisasi baik kepada ASN, masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya terkait pentingnya sikap netral ASN utamanya dalam menghadapi pemilu legislatif dan/atau Presiden dan Wakil Presiden.



Gambar 2.39. Asisten KASN Bidang Promosi dan Advokasi, Nurhasni bersama Bawaslu dan Pattirol dalam kegiatan Training CSO Peningkatan Kapasitas Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilu 2019 Surabaya, 11 Maret 2019

Pelatihan peningkatan kapasitas dalam pengawasan netralitas juga dilaksanakan oleh KASN bersama Bawaslu dan Pattirol di Surabaya.



Gambar 2.40. Kegiatan pelatihan pemantauan netralitas ASN  
Jakarta, 12 April 2019  
(Dok. Pattiro)

Selanjutnya pada 12 April 2019, KASN dan PATTIRO memberikan pelatihan kepada kelompok masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan netralitas ASN selama masa Pemilu 2019. Kegiatan ini juga dilaksanakan di Semarang dan Bandung sebagai upaya PATTIRO mendukung KASN dalam melaksanakan pengawasan netralitas ASN.



Gambar 2.41. Asisten KASN Bidang Promosi dan Advokasi, Nurhasni dan Asisten KASN Bidang Penanganan Pengaduan dan Penyelidikan, Kuku Heruyanto dalam Pertemuan penyampaian hasil pemantauan pelanggaran netralitas ASN oleh PATTIRO  
Jakarta, 28 Mei 2019

Sehubungan dengan ruang lingkup pemantauan, PATTIRO dan KASN melaksanakan pertemuan untuk membahas hasil pemantauan terhadap pelanggaran netralitas ASN. Pada pertemuan ini, PATTIRO menyarankan agar KASN memperluas kerja sama dengan banyak pihak dan rutin menyelenggarakan kampanye edukatif secara masif terkait kode etik dan kode perilaku ASN.

Setelah penyelenggaraan Pemilu selesai, PATTIRO, KASN, Bawaslu, dan KPPOD melaksanakan kegiatan Refleksi Pemilu 2019.



Gambar 2.42. Kegiatan refleksi Pemilu 2019: Netralitas ASN dan Kualitas Prosedur Demokrasi Jakarta, 6 Agustus 2019

Pada kegiatan ini PATTIRO menyatakan bahwa pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2019 masih merata sedangkan penegakan sanksi atas pelanggaran ini masih lemah, sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih proaktif dari KASN dalam meminta laporan dan menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan investigasi dan verifikasi. KASN juga dapat meningkatkan kerja sama dengan Kementerian PANRB, BKN, Kementerian Dalam Negeri serta melaporkan kepada Presiden jika ada PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan KASN.



Gambar 2.43. Laporan Hasil Pemantauan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu 2019

Selanjutnya, sebagai bentuk dokumentasi dan pelaporan hasil pemantauan yang dilakukan oleh PATTIRO terhadap pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan umum 2019, telah diterbitkan kajian Hasil Pemantauan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu 2019 yang dapat diakses pada tautan berikut [https://bit.ly/pelanggarannetralitas\\_Pemilu2019](https://bit.ly/pelanggarannetralitas_Pemilu2019).

## 8. Kerja sama pengawasan netralitas pada Pemilihan Umum

### a. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pengawasan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum

Demi mendukung terciptanya Pemilu yang aman dan tertib serta untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis dalam pengawasan netralitas anggota TNI, anggota POLRI, dan pegawai ASN pada Pemilihan Umum, maka diperlukan kesamaan pemahaman dan sikap seluruh aparat negara. Bawaslu bekerja sama dengan TNI, Polri, dan KASN untuk mengawasi dan mengawal kepatuhan netralitas serta pelaksanaan kode etik dan perilaku selama periode pemilihan. Kolaborasi ini penting untuk menjaga keamanan dan integritas Pemilihan Umum, memastikan bahwa anggota TNI, anggota Polri, dan ASN tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat mempengaruhi proses demokrasi.



Gambar 2.44. Pemberian paraf nota kesepahaman Pengawasan Netralitas Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai KASN secara simbolik pada Kegiatan Deklarasi Komitmen Bersama Menjelang Kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye Pemilu Jakarta, 23 Maret 2019 (Sumber: Media X Elshinta)

Dengan didasari kesamaan tujuan tersebut, pada 23 Maret 2019, KASN melakukan penandatanganan nota kesepahaman secara simbolis antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pengawasan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum.

Adapun berdasarkan nota kesepahaman ini, keempat instansi sudah sepakat untuk melakukan pertukaran data dan informasi, bahkan dalam situasi mendesak pertukaran data dan informasi dapat dilakukan secara lisan, namun tetap ditindaklanjuti secara tertulis; membentuk Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka melaksanakan pengawasan netralitas aparatur negara; dan melaksanakan penegakan hukum atas rekomendasi yang diterima berdasarkan laporan dugaan pelanggaran netralitas anggota TNI, POLRI, dan pegawai ASN.

Dengan berakhirnya masa berlaku nota kesepahaman ini pada awal tahun 2024, keempat instansi menginisiasi pembaharuan naskah nota kesepahaman untuk menghadapi pesta demokrasi tahun 2024.



Gambar 2.45. Rapat Lanjutan Pembahasan Draf MoU dan Persiapan Rakornas Pengawasan Netralitas ASN, Anggota Polri, dan Anggota TNI pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Jakarta, 24 Oktober 2023



Setelah mengikuti pertemuan penyusunan draf nota kesepahaman dan persiapan rakornas pengawasan netralitas ASN, Anggota POLRI, dan Anggota TNI pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan pada 24 Oktober 2023, KASN tidak lagi diikutsertakan dalam penyusunan naskah nota kesepahaman dikarenakan perubahan dinamika perumusan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan rencana pengalihan tugas KASN.

Salah satu tindak lanjut nota kesepahaman ini adalah dengan disusun dan ditandatangani perjanjian kerja sama antara KASN dan Bawaslu tentang Pengawasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dijelaskan secara lebih detail pada sub poin berikut.

**b. Perjanjian Kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pengawasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

Menindaklanjuti penandatanganan nota Kesepahaman antara BAWASLU, TNI, POLRI dan KASN tentang Pengawasan Netralitas Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN pada Pemilihan Umum, penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara menjadi suatu hal yang sangat penting bagi KASN untuk mendukung pelaksanaan tugasnya menjaga netralitas ASN. Perjanjian ini juga menjadi tonggak penting dalam upaya penguatan tata kelola kepegawaian, yang melibatkan peran aktif KASN dalam memastikan bahwa ASN memahami dan mematuhi standar etika dan netralitas yang tinggi selama pelaksanaan pemilihan umum.



Gambar 2.46. Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara

Perjanjian ini ditandatangani pada 11 April 2019 oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu, Gunawan Suswanto dan Anggota KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, I Made Suwandi dan berfokus pada pertukaran data dan/informasi dengan ketentuan sesuai perundang-undangan; kegiatan pencegahan pelanggaran yang dapat dilakukan masing-masing maupun bersama-sama melalui pelatihan dan bimbingan teknis melalui berbagai kegiatan seperti kampanye publik, seminar, diskusi kelompok terpusat, rapat koordinasi, rapat kerja teknis, lokakarya dan berbagai kegiatan lainnya; pengawasan atas pelanggaran netralitas ASN melalui kegiatan supervisi, penelusuran data dan/informasi, permintaan klarifikasi, pemantauan dan evaluasi, dan asistensi; dan melakukan penindakan atas kajian laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN sesuai Peraturan Bawaslu mengenai temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.



Gambar 2.47. Kampanye Publik “ASN Netral, Birokrasi Kuat” Jakarta, 10 Maret 2019

Salah satu bentuk komitmen pengawasan netralitas ASN dalam bentuk preventif adalah dilaksanakannya Kampanye Publik dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat” dalam menyambut Pemilu 2019 di Bundaran HI pada 10 Maret 2019 sebelum ditandatanganinya perjanjian kerja sama terkait netralitas ini. Selain diikuti oleh keluarga besar KASN, kegiatan ini juga dihadiri Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri dan diliput oleh beberapa media nasional.

#### **9. Keputusan Bersama 11 Instansi Pemerintah tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara**

Sebagai upaya membangun pemahaman mengenai Countering Violent Extremism (CVE), dalam rangka mencegah masuknya paham radikalisme di kalangan ASN utamanya para pemimpin birokrasi, KASN telah menyusun modul dan melaksanakan pelatihan CVE bagi panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pada tahun 2018 hingga 2019 salah satunya kegiatan Workshop bagi Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi “Membangun Pemahaman dan Upaya Pencegahan Paham Intoleransi dan Radikalisme di Instansi Pemerintah” yang dilaksanakan di Solo pada 22 Juli 2019.



Gambar 2.48. Ketua KASN, Sofian Effendi memberikan sambutan dan arahan pada Workshop bagi Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Solo, 22 Juli 2019

Meskipun beberapa upaya telah dilakukan, KASN tetap menerima banyak pengaduan terkait komitmen kebangsaan dan tindakan radikalisme dalam pemerintahan

terus meningkat, sehingga dipahami bahwa permasalahan tersebut tidak dapat ditangani sendiri dan dibutuhkan komitmen beberapa instansi pemerintah terkait dalam penanganannya. Sehingga pada 12 November 2019 ditandatangani Keputusan bersama oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara.



Gambar 2.49. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto; Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Hariyono; Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara, Zaelani; Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto; Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Mohamad Nur Kholis Setiawan; Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate; Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji; Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo; Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Didik Suhardi; Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, A. Adang Supriyadi; Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, Supranawa Yusuf (kiri ke kanan) dalam Launching Portal Aduan ASN & Penandatanganan SKB Penanganan Radikalisme ASN Jakarta, 12 November 2019

Dalam keputusan bersama ini disepakati bahwa akan dibentuk Tim Satuan Tugas untuk menangani tindakan radikalisme ASN meliputi sikap intoleran, anti ideologi Pancasila, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sikap yang menyebabkan disintegrasi bangsa.



Gambar 2.50. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto dalam Penandatanganan Keputusan Bersama Penanganan Radikalisme ASN Jakarta, 12 November 2019

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan keputusan bersama ini, pada 2 September 2020 telah diluncurkan aplikasi ASN NO RADIKAL Kementerian PANRB sekaligus pelaksanaan webinar Strategi Menangkal Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara yang menekankan strategi untuk penangkalan dan pencegahan radikalisme seperti yang ditekankan Kepala BNPT agar terdapat penguatan pembinaan tradisi di lingkungan organisasi seperti pelaksanaan upacara, komitmen dalam pengawasan pegawai, pemberian literasi dan edukasi melalui media sosial, dan konsistensi dan pendisiplinan dalam pemberlakuan kode etik sebagai pembelajaran pribadi dan kolektif.



Gambar 2.51. Staf Khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bidang Penanganan Radikalisme, Yoyon Tony Surya Putra; Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo; Menteri Agama, Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar; Akademisi Guru Besar Universitas Indonesia, Gumilar R. Somantri; Sekretaris Program Pascasarjana FIA UI selaku Moderator, Teguh Kurniawan (kiri ke kanan) dalam Launching Aplikasi ASN No Radikal dan Webinar Dalam Rangka Memperingati HUT RI ke-75 Tahun “Strategi Menangkal Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara” Jakarta, 2 September 2020 (Dok. Kementerian PANRB)

Bentuk tindak lanjut lain dari penandatanganan keputusan bersama ini adalah melalui penerbitan Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara pada 25 Januari 2021 tentang Larangan bagi Aparatur Sipil Negara untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang dicabut Status Badan Hukumnya yang ruang lingkupnya mencakup pengaturan tentang pelanggaran, pencegahan, dan penindakan ASN yang berafiliasi dan mendukung organisasi terlarang yang pada surat edaran tersebut disebutkan secara langsung 6 organisasi. Selain itu dalam beberapa pertemuan, komitmen pencegahan radikalisme di kalangan ASN juga ditekankan oleh Menteri PANRB di antaranya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional di Kantor Lembaga Administrasi Negara pada Juni 2021.

**10. Perjanjian Kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020**

Kerja sama pengawasan netralitas ASN antara KASN dengan Bawaslu terus berlanjut dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan. Pembaharuan naskah kerja sama terus dilakukan seiring pembaharuan sistem kerja antara kedua instansi. Meskipun demikian, kedua lembaga tidak menghentikan kolaborasi meskipun sedang dalam masa tunggu pembaharuan naskah kerja sama pengawasan netralitas. Sebagai contoh tetap dilaksanakannya kampanye publik, naskah kerja sama yang baru masih dalam proses penyusunan.



Gambar 2.52. Kegiatan kampanye publik “Deklarasi Netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2020” Makassar, 8 Maret 2020

Perjanjian kerja sama tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020 ini diinisiasi oleh Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN atas dasar keterbatasan KASN dalam melakukan pengawasan netralitas hingga ke seluruh daerah.



Gambar 2.53. Ketua Bawaslu, Abhan dan Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dengan KASN Jakarta, 17 Juni 2020

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani pada 17 Juni 2020 dengan ruang lingkup meliputi kesepakatan terkait teknis pertukaran data dan atau informasi, jenis kegiatan pencegahan pelanggaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan pengawasan, mekanisme penindakan antara KASN dan Bawaslu, dan kegiatan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi, serta kesepakatan pelaksanaan sosialisasi yang akan dilakukan secara bersama.



Gambar 2.54. Salah satu Poster Kegiatan Gerakan Nasional Netralitas ASN yang diselenggarakan dalam jaringan pada Selasa, 30 Juni 2020

Sebagai rangkaian lanjutan program bersama KASN dan Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran netralitas pegawai ASN utamanya dalam menghadapi pilkada serentak maka telah dilaksanakan kegiatan Kampanye Publik Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri” yang dilaksanakan dalam 5 serial kegiatan di antaranya Kampanye Virtual #3 dan #4 yang dilaksanakan pada 26 Agustus 2020 dan 7 Oktober 2020.



Gambar 2.55. Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Irwansyah; Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto; dan Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Arie Budhiman (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN Jakarta (dalam jaringan), 26 Agustus 2020





Gambar 2.56. Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Nurhasni; Ketua KASN, Agus Pramusinto; dan Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Arie Budhiman (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN Jakarta (dalam jaringan), 7 Oktober 2020

Kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari penandatanganan naskah kerja sama yang pada awalnya dilakukan secara langsung oleh KASN, Bawaslu, dan Pemerintah Daerah pada beberapa kota besar di Indonesia, namun dikarenakan adanya pandemi covid-19 dilaksanakan melalui pertemuan dalam jaringan. Meskipun tidak sesuai dengan rencana awal, namun ternyata jangkauan seminar melebihi ekspektasi dikarenakan pegawai daerah dapat mengikuti tanpa harus menghadiri pertemuan secara langsung.



Gambar 2.57. Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Nurhasni dalam Kegiatan Webinar Netralitas ASN Makassar (dalam jaringan), 9 Desember 2020

Selain kampanye publik juga dilaksanakan Webinar Netralitas ASN “Membangun Meritokrasi dan Demokrasi di Indonesia” yang dilaksanakan dalam 7 serial kegiatan bersama 6 perguruan tinggi negeri dan 1 perguruan tinggi swasta di Indonesia, yang salah satunya diselenggarakan di Universitas Hasanuddin Makassar.

## **11. Kerja Sama Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika**

### **a. Keputusan Bersama 13 Instansi Pemerintah tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Berbahaya Lainnya Aparatur Negara pada Instansi Pemerintah**

Dengan tidak dapat terhindarnya aparaturnegara dari kondisi darurat narkoba di Indonesia yang dibuktikan dengan banyaknya keterlibatan oknum aparat dalam penyalahgunaan bahkan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, maka Kementerian PANRB bersama Badan Narkotika Nasional menginisiasi penyusunan keputusan bersama tentang pelaksanaan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya oleh aparaturnegara pada instansi pemerintah.

Keputusan bersama ini ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Kesehatan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pemuda dan Olahraga, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Badan Narkotika Nasional, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 26 Juni 2020 bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional.



Gambar 2.58. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto dalam Penandatanganan Keputusan Bersama Pelaksanaan P4GN oleh Aparatur Negara pada Instansi Pemerintah Jakarta, 26 Juni 2020

Untuk mematuhi protokol Covid-19, pada hari penandatanganan naskah keputusan bersama, hanya ada 4 (empat) instansi pemerintah sebagai perwakilan yang menandatangani naskah asli secara langsung dari Kantor BNN, yaitu Menteri PANRB, Kepala BKN, Kepala BNN, dan Ketua KASN, selanjutnya, naskah ini akan ditandatangani secara *desk to desk* kepada 9 instansi pemerintah lainnya. Namun, sampai saat buku ini disusun, KASN belum menerima naskah yang sudah selesai ditandatangani ke 13 instansi.



Gambar 2.59. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo; Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto; dan Kepala Badan Narkotika Nasional, Heru Winarko (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan Keputusan Bersama Pelaksanaan P4GN oleh Aparatur Negara pada Instansi Pemerintah Jakarta, 26 Juni 2020

Pelaksanaan P4GN Aparatur Negara pada keputusan bersama ini dibagi menjadi tindakan pencegahan yang meliputi optimalisasi peran atasan dalam menginstruksikan pelaporan dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sosialisasi bahaya narkoba, menerbitkan regulasi P4GN dengan berkonsultasi BNN, pelaksanaan deteksi dini melalui tes urin, pengawasan reguler, dan akurasi data dan informasi; dan tindakan penanganan yang meliputi skrining, edukasi, dan asesmen, dan rekomendasi penanganan kepada PPK/PyB bagi ASN dan Anggota POLRI dan kepada atasan yang berhak menghukum bagi Anggota TNI. Pada keputusan bersama ini juga direkomendasikan pembentukan satuan tugas/relawan/penggiat anti narkoba pada masing-masing instansi. Selain itu, pada hari penandatanganan keputusan bersama diluncurkan Portal Pengaduan penyalahgunaan narkoba oleh ASN dan Layanan BNN One Stop Service yang merupakan pelayanan terpadu satu pintu bagi masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen dari Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan P4GN oleh Aparatur Negara pada Instansi Pemerintah dan bentuk tindak lanjut dari penandatanganan keputusan bersama ini, pada tahun 2021 telah ditandatangani nota kesepahaman antara KASN dan BNN yang dilanjutkan dengan penandatanganan dua perjanjian kerja sama dengan dua deputi BNN pada tahun 2022 sebagaimana penjelasan pada sub nomor di bawah ini.

**b. Nota Kesepahaman antara Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Pengawasan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Meskipun sampai dengan buku ini disusun KASN belum menerima naskah Keputusan Bersama 13 instansi pemerintah tentang Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Berbahaya Lainnya Aparatur Negara pada Instansi Pemerintah yang ditandatangani pada 26 Juni 2020, namun komitmen KASN sebagai lembaga pengawas nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku kembali dikuatkan melalui penandatanganan nota kesepahaman ini berdasarkan inisiasi oleh Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar,

Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN. Dengan tujuan untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KASN dan BNN, nota kesepahaman ini ditandatangani pada 18 November 2021.



Gambar 2.60. Kepala Badan Narkotika Nasional, Petrus R Golose dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KASN dengan BNN RI Bogor, 18 November 2021

Adapun ruang lingkup kerja sama nota kesepahaman ini meliputi penyebaran informasi dan advokasi, peningkatan peran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KASN dan BNN, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran data dan/atau informasi, memfasilitasi saran dan masukan terkait kebijakan manajemen ASN, pengkajian di bidang pengawasan manajemen nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki KASN dan BNN, dan bidang lain yang disepakati KASN dan BNN.

Selanjutnya, penandatanganan nota kesepahaman ini ditindaklanjuti melalui penandatanganan dua perjanjian kerja sama yaitu antara KASN dengan Deputi Bidang Pencegahan dan antara KASN dengan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN yang akan dijelaskan secara lebih detail pada sub poin selanjutnya.

**c. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Tes/Uji Narkotika bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah**

Dengan banyaknya dugaan kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungan instansi pemerintah yang melanggar kode etik dan kode perilaku ASN serta dapat menurunkan kinerja pegawai ASN, maka sebagai salah satu tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman antara KASN dan BNN, disepakati untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Tes/Uji Narkotika bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah pada 17 Juni 2022.



Gambar 2.61. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN, Tagam Sinaga, dan Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KASN dan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Jakarta, 17 Juni 2022

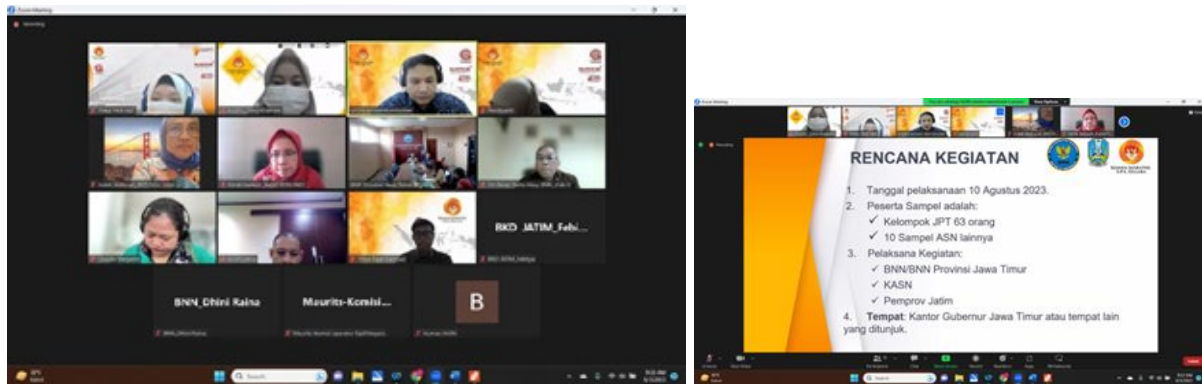
Dalam perjanjian kerja sama ini, kedua instansi sepakat untuk melakukan pelaksanaan tes/uji narkotika di instansi pemerintah baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Teknis pelaksanaan tes/uji narkotika dimulai dengan pengajuan surat permohonan dari KASN terkait pelaksanaan tes/uji narkotika yang bersifat inspeksi mendadak kepada ASN pada sebuah instansi pemerintah, pelibatan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan tes/uji narkotika, pelaksanaan tindak lanjut hasil tes/uji narkotika, dan pelaporan.



Gambar 2.62. Direktur Kerja Sama, Deputy Bidang Hukum & Kerja Sama BNN, RM Aria Teguh Mahendra Wibisono (kiri atas) dalam kegiatan Konsinyasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri KASN Jakarta, 11 Juli 2023

Pada 11 Juli 2023, dalam kegiatan konsinyasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri KASN, terdapat pembahasan bersama beberapa instansi pemerintah, termasuk Badan Narkotika Nasional. Pada pertemuan ini, terdapat pembahasan terkait rencana pelaksanaan tes narkotika bersama KASN di instansi pemerintah. Selain itu, sebagai upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh ASN, BNN merekomendasikan bahwa persyaratan surat bebas narkotika tidak hanya dibutuhkan saat perekrutan KASN, namun juga pada perpanjangan kontrak PPPK dan promosi pegawai, selain itu tidak perlu dilakukan secara berkala dan sesuai kebutuhan, sekaligus penegakan sanksi bagi ASN yang terlibat penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika.

Sebagaimana telah direncanakan sebelumnya, KASN bersama BNN Provinsi Jawa Timur melaksanakan uji petik narkotika pada 63 pejabat pimpinan tinggi dan 12 ASN Provinsi Jawa Timur dalam rangka deteksi dini secara acak.



Gambar 2.63. Rapat koordinasi Uji Petik Narkotika Jakarta (dalam jaringan), 3 Agustus 2023

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai instansi yang akan diuji didasari data dari BNN yang menyebutkan bahwa Jawa Timur termasuk salah satu provinsi dengan jumlah penyalahgunaan yang cukup tinggi peringkat kedua setelah Sumatera Utara.



Gambar 2.64. Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Arie Budhiman (kedua dari kiri) dan Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, Mohamad Aris Purnomo (ketiga dari kiri) dalam kegiatan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Uji Petik Tes Narkotika pada ASN Provinsi Jawa Timur Surabaya, 9 Agustus 2023

Satu hari sebelum pelaksanaan uji petik narkotika Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Arie Budhiman bersama tim KASN melakukan koordinasi terkait teknis pelaksanaan tes narkotika setelah pertemuan pejabat pimpinan tinggi Provinsi Jawa Timur dengan Sekretaris Daerah.





Gambar 2.65. Pelaksanaan Uji Petik Narkotika pada 63 PPT dan 12 ASN Provinsi Jawa Timur Surabaya, 10 Agustus 2023

BNN Provinsi Jawa Timur melakukan uji skrining narkotika ini menggunakan alat rapid tes yang untuk selanjutnya jika didapatkan hasil yang positif dilanjutkan dengan uji laboratorium.

**d. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Aparatur Sipil Negara**

Aparatur sipil negara sebagai pelayan publik dan pelaksana kebijakan pemerintah tidak akan dapat menjalankan fungsinya secara optimal apabila terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam upaya membangun kesadaran ASN tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, KASN juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Aparatur Sipil Negara.



Gambar 2.66. Direktur Advokasi BNN, Jafriedi dan Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KASN dan Deputi Bidang Pencegahan BNN RI  
Jakarta, 17 Juni 2022

Perjanjian kerja sama ini juga ditandatangani pada 17 Juni 2022 bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Tes/Uji Narkotika bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun ruang lingkup yang menjadi fokus kegiatan kerja sama ini adalah terkait pencegahan melalui penyebarluasan informasi, edukasi timbal balik baik terkait P4GN dan prekursor narkotika maupun terkait nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, dan advokasi tentang P4GN dan Prekursor Narkotika bagi ASN di instansi pemerintah; pertukaran data dan informasi melalui pemberian data berkala dari BNN ke KASN terkait ASN yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di instansi pemerintah; dan pembentukan relawan anti narkoba di kantor KASN.

Sampai dengan penyusunan buku ini, belum ada tindak lanjut kegiatan bersama yang dilakukan oleh KASN dan BNN dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

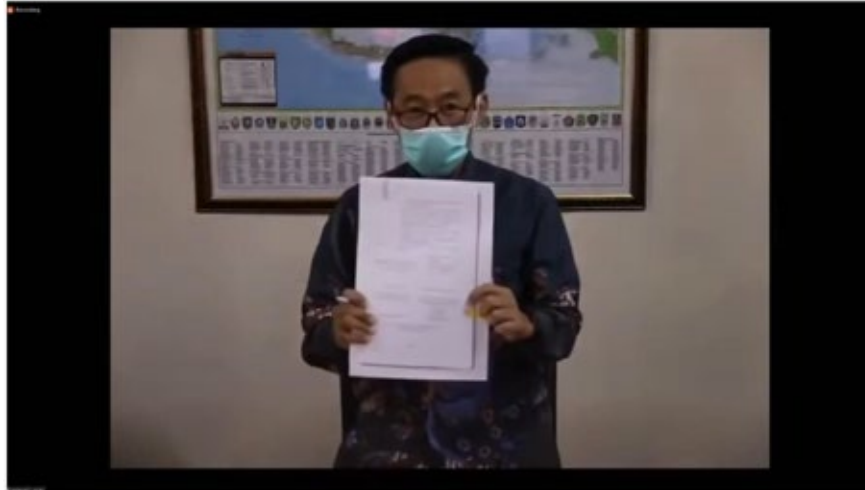
## 12. Keputusan Bersama 5 instansi pemerintah tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas netralitas pegawai ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara tidak dapat bekerja sendiri sehingga dibutuhkan pelibatan sinergis, efektif, dan efisien dari beberapa instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi yang beririsan. Selanjutnya, untuk membentuk pemahaman dan komitmen bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang netral, objektif, dan akuntabel, maka ditandatangani Keputusan Bersama tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.



Gambar 2.67. Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo dalam Penandatanganan Simbolis Keputusan Bersama 5 K/L tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020  
Jakarta, 10 September 2020

Keputusan bersama ini ditandatangani pada 10 September 2020 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya untuk menjaga ASN dari intervensi politik dalam menghadapi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di 270 daerah penyelenggara Pilkada.



Gambar 2.68. Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Kegiatan Penandatanganan Simbolis Keputusan Bersama 5 K/L tentang Netralitas Jakarta (dalam jaringan), 10 September 2020

Keputusan bersama ini memberikan pedoman terkait upaya dan langkah pencegahan pelanggaran netralitas Pegawai ASN baik pada masa sebelum maupun setelah penetapan pasangan calon; penjatuhan sanksi moral maupun disiplin untuk setiap jenis dan tingkatan pelanggaran netralitas Pegawai ASN; Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dan penentuan Sekretariat Satgas; dan tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

### **13. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengawasan Implementasi Kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara**

Pada akhir tahun 2019, masa berlaku nota kesepahaman antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani pada tahun 2017 telah berakhir, namun kedua lembaga masih memiliki irisan kewenangan yang krusial dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, begitupun ruang lingkup kerja sama masih dianggap relevan dengan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga. Berdasarkan pertimbangan ini, pada tahun 2020 kedua instansi bersepakat untuk kembali menyusun naskah nota kesepahaman dengan menambahkan beberapa ruang lingkup kerja sama.

Nota kesepahaman ini diinisiasi oleh Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan ditandatangani pada 28 Januari 2021 oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dengan tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan koordinasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi guna penguatan pengawasan implementasi kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara.



Gambar 2.69. Ketua KASN, Agus Pramusinto dan Ketua KPK, Firli Bahuri (kiri ke kanan) dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPK dengan KASN Jakarta, 28 Januari 2021

Pada substansi nota kesepahaman ini dijelaskan bahwa KPK dan KASN bersepakat untuk bekerja sama dalam pencegahan tindak pidana korupsi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengkajian dan penelitian, sosialisasi dan kampanye antikorupsi, penyediaan narasumber dan ahli, dan pertukaran data dan/atau informasi. Salah satu dari tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman ini diantaranya keterlibatan KASN dalam pembahasan rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.



Gambar 2.70. Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto dalam Rapat Koordinasi Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai KASN Jakarta, 25 Mei 2021

Setelah dilibatkan dalam beberapa kali pertemuan dalam rangka pengalihan status kepegawaian pegawai KPK menjadi pegawai ASN yang sudah dimulai sejak tahun 2020, KASN kembali menghadiri rapat koordinasi penyampaian nomor induk pegawai 1.271 pegawai KPK di Kantor Badan Kepegawaian Negara.

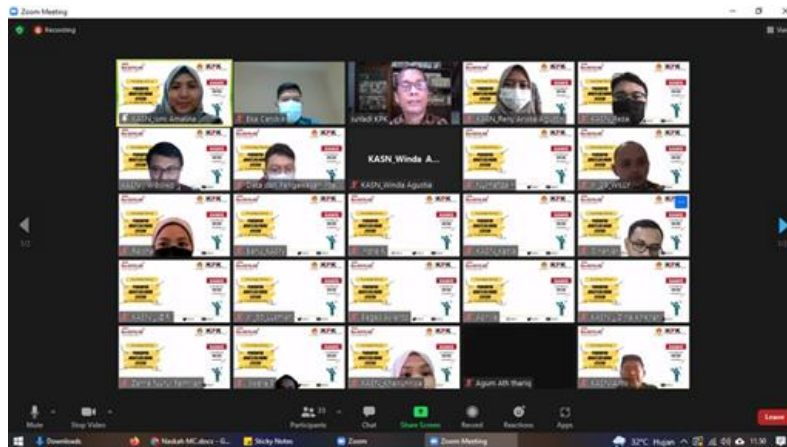
Dalam ruang lingkup pencegahan tindak pidana korupsi dan penyediaan narasumber dan ahli, KASN juga telah menerima kesediaan KPK sebagai narasumber pada beberapa kegiatan sebagai berikut.



Gambar 2.71. Sosialisasi dan Internalisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KASN oleh KPK Jakarta (dalam jaringan), 22 Juli 2021

Kegiatan ini merupakan tahap awal rencana pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KASN. Pada kegiatan ini, Ketua KASN mengingatkan agar

pegawai KASN tidak hanya menolak pemberian gratifikasi sebagai cikal bakal korupsi namun juga berperan dalam mengedukasi masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi. Selain itu, Koordinator Group Head Verifikasi, Pelaporan, dan Pemeriksaan Gratifikasi KPK, Muhammad Indra Furqon menegaskan bahwa pemberi gratifikasi akan mencatat pemberian mereka sebagai piutang budi dan nilai harga diri penerima sehingga ASN maupun pejabat publik harus dapat menolak pemberian tersebut.



Gambar 2.72. Kegiatan Knowledge Sharing Penerapan Whistleblowing System di Lingkungan KASN Jakarta (dalam jaringan), 21 Oktober 2021

Kegiatan ini diisi oleh Tim Direktorat Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK yang menjelaskan terkait motif dan pengelompokan tindakan korupsi dan pengelolaan whistleblowing system yang dapat diterapkan.



Gambar 2.73. Kegiatan Rapat Pembahasan dan Evaluasi Kerja Sama Komisi Aparatur Sipil Negara Jakarta, 5 Desember 2022

Pada rapat pembahasan dan evaluasi kerja sama KASN yang dilaksanakan pada 5 Desember 2022, didapatkan informasi bahwa beberapa bentuk konkret tindak lanjut kerja sama KASN dengan KPK di antaranya klarifikasi kasus jual beli jabatan dan pelanggaran kode etik bersama Direktorat Pengaduan Pelayanan Masyarakat KPK baik secara langsung maupun dalam jaringan seperti kasus di Bondowoso, Pematang, Bakamla, Kementerian Agama dan sebagainya.

Selanjutnya, dalam mendukung penerapan sistem merit sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi di birokrasi, KASN menggandeng KPK dalam rangka mendukung penerapan sistem merit di instansi pemerintah di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sulawesi Utara.



Gambar 2.74. Asisten KASN Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Mugi Syahriadi bersama Sekretaris Daerah se Provinsi Bengkulu dalam Kegiatan Audiensi Penilaian Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN Bengkulu, 22 Februari 2023

Pada pertemuan ini, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, menekankan bahwa sistem merit merupakan salah satu strategi pencegahan korupsi di birokrasi. Bahkan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN menjadi salah satu indikator dalam melihat potensi korupsi pada kegiatan Monitoring Center of Prevention (MCP) oleh KPK.





Gambar 2.75. Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Mukhlis Irfan dalam Rapat Koordinasi Advokasi Percepatan Penerapan sistem Merit di Pemerintah Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara Manado, 7 Juni 2023

Pada pertemuan ini Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK menegaskan pentingnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN instansi pemerintah sebagai salah satu area intervensi dalam sistem Monitoring Center for Prevention (MPC) KPK terkait upaya pencegahan korupsi. Selain itu, diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sedang dalam proses pembentukan UPTB Assessment Center Manajemen Talenta Provinsi.

#### **14. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik Komisi Aparatur Sipil Negara**

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik merupakan salah satu poin penting dalam reformasi birokrasi yang menjadi perhatian serius pemerintah dalam perbaikan sistem kerja dan pemberian layanan kepada masyarakat. Adanya dampak Pandemi Covid-19, semakin mendorong penyesuaian administrasi kerja dan penerapan SPBE pada instansi pemerintah termasuk di internal Komisi Aparatur Sipil Negara, maka pada 25 Agustus 2021 ditandatangani kerja sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik Komisi Aparatur Sipil Negara.



Gambar 2.76. Kepala Sekretariat KASN, Abdul Hakim (kanan) didampingi Ketua KASN, Agus Pramusinto (kiri) dalam Penandatanganan PKS antara KASN dengan BSrE, BSSN secara Elektronik Jakarta (dalam jaringan), 25 Agustus 2021

Perjanjian kerja sama ini diinisiasi oleh Bagian Data dan Pengawasan Internal dan ditandatangani oleh Kepala Sekretariat KASN secara elektronik sebagai bentuk pemanfaatan pertama sertifikat elektronik di lingkungan instansi KASN. Adapun ruang lingkup perjanjian ini meliputi penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan sertifikat elektronik pada layanan pemerintah, penerbitan sertifikat elektronik, pemanfaatan sertifikat elektronik dalam sistem elektronik di KASN, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan sertifikat elektronik.



Gambar 2.77. Contoh Dokumen yang Menggunakan Sertifikat Elektronik BSrE, BSSN

Melalui penandatanganan kerja sama ini, KASN dapat memanfaatkan sertifikat elektronik yang memuat identitas dokumen, tanda tangan, dan identitas dari pimpinan

dan pejabat KASN sebagai bentuk pengesahan dan pertanggungjawaban dari sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh KASN baik dalam bentuk surat untuk internal maupun yang ditujukan untuk eksternal yang masih digunakan sampai dengan saat buku ini dibuat.

## **15. Kerja Sama Kolaborasi Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara**

### **a. Nota Kesepahaman antara Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Lembaga Administrasi Negara tentang Kolaborasi Sistem Pengawasan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara**

Berjalan tujuh tahun penerapan sistem merit dalam instansi pemerintah di Indonesia, masih ditemui kendala dalam pengawasan penerapan sistem merit yang belum sinergis dan belum melibatkan keempat instansi pengelola Aparatur Sipil Negara secara sistematis. Bahkan ketiga instansi paguyuban dinilai hanya terlibat pada saat pleno akhir penilaian sistem merit sehingga menyebabkan penerapan sistem merit secara keseluruhan tidak berjalan dengan efektif. Berdasarkan kondisi tersebut, KASN menginisiasi adanya tata kelola kolaborasi sistem pengawasan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah dengan memberikan opsi proses bisnis pengawasan sistem merit baik secara fungsi maupun integrasi sistem aplikasi manajemen ASN. Melalui kerja sama ini, diharapkan Kementerian PANRB akan menjalankan fungsi verifikasi dalam penerapan sistem merit nantinya, begitupun dengan BKN dan LAN akan dibutuhkan dalam penyediaan dan sinkronisasi data dan proses pembinaan bagi instansi pemerintah yang belum mendapatkan hasil pleno penilaian sistem merit yang baik. Selain itu, untuk memudahkan kolaborasi, KASN mengusulkan adanya integrasi sistem aplikasi antara SIPINTER KASN, SIASN BKN, dan SIPKA LAN, yang juga memuat fungsi verifikasi Kementerian PANRB.

Nota kesepahaman ini diinisiasi oleh Kelompok Kerja Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah I yang pada tahap awal penyusunan direncanakan untuk disusun dalam satu naskah perjanjian yang sekaligus ditandatangani bersama oleh keempat instansi paguyuban. Namun pada tahap negosiasi, Kementerian PANRB menyatakan

ketidaksediaan untuk ikut bekerja sama sehingga nota kesepahaman dipisah menjadi dua naskah yaitu nota kesepahaman dengan LAN dan BKN dengan hal yang sama.



Gambar 2.78. Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman KASN dan LAN secara *Desk to Desk* Jakarta, 5 November 2021

Pada nota kesepahaman antara KASN dengan LAN, pertukaran data dan informasi terkait aspek penilaian sistem merit ditargetkan melalui sistem informasi LAN dan KASN yang diintegrasikan maupun metode lainnya. Adapun tindak lanjut dari penandatanganan kerja sama ini dijelaskan pada subpoin selanjutnya.

**b. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan Politeknik STIA LAN Bandung tentang Pengawasan Penerapan Sistem Merit dalam Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara melalui Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi**

Menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman antara KASN dan Lembaga Administrasi Negara, Politeknik STIA LAN Bandung sebagai satuan kerja di lingkungan LAN yang berbentuk perguruan tinggi dan berfokus dalam pengembangan ilmu administrasi dan tata kelola pemerintah menginisiasi kerja sama dalam rangka mendukung kegiatan tri dharma perguruan tinggi dengan KASN. Kerja sama ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dalam penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.



Gambar 2.79. Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, Muhamad Nur Afandi, dan Kepala Sekretariat KASN, Nurhasni (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan PKS antara KASN dan Politeknik STIA LAN Bandung Bandung, 30 Agustus 2023

Perjanjian kerja sama antara KASN dan Politeknik STIA LAN Bandung tentang Pengawasan Penerapan Sistem Merit dalam Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara melalui Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi ditandatangani pada 30 Agustus 2023. Perjanjian kerja sama ini berfokus pada ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan melalui pengiriman dosen praktisi atau dosen tamu, atau pembicara atau narasumber dari KASN pada kegiatan Politeknik STIA LAN Bandung, atau pengiriman dosen atau mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung untuk melaksanakan magang di kantor KASN, atau melalui pelaksanaan kegiatan ilmiah bersama dalam skala nasional dan internasional; penyelenggaraan penelitian dan publikasi hasil kajian dalam skala nasional dan internasional; dan penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pemberian edukasi terkait tugas, fungsi, dan kewenangan kedua instansi, penunjukan perwakilan Politeknik STIA LAN Bandung sebagai pembicara/narasumber/pendamping pada kegiatan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpusat, dan diskusi publik yang dilaksanakan KASN, atau penunjukan perwakilan Politeknik STIA LAN Bandung sebagai pakar atau ahli dalam persidangan.



Gambar 2.80. Ketua Jurusan Politeknik STIA LAN Bandung, Septiana Dwiputrianti; Kepala Sekretariat KASN, Nurhasni; Ketua KASN, Agus Pramusinto; Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, Muhamad Nur Afandi; Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan PKS antara KASN dan Politeknik STIA LAN Bandung dan Kuliah Dosen Tamu Bandung, 30 Agustus 2023

Pada hari yang sama juga dilakukan penandatanganan implementation of arrangement atau perjanjian implementasi kerja sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan Politeknik STIA LAN Bandung tentang Pelaksanaan Kuliah Dosen Tamu oleh Kepala Sekretariat KASN dan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung.



Gambar 2.81. Ketua KASN, Agus Pramusinto sebagai Dosen Tamu Kuliah "Optimalisasi Pengawasan dan Pelayanan Publik dalam Menyongsong Transformasi Kepemimpinan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045" Bandung, 30 Agustus 2023

Adapun penandatanganan perjanjian implementasi kerja sama tersebut berisikan penunjukan Ketua KASN sebagai dosen tamu pada kegiatan Kuliah Dosen Tamu dengan tema Optimalisasi Pengawasan dan Pelayanan Publik dalam Menyongsong Transformasi Kepemimpinan Nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut penandatanganan perjanjian kerja sama antara KASN dan Politeknik STIA LAN Bandung.

**c. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan Politeknik STIA LAN Jakarta Lembaga Administrasi Negara tentang Swakelola Tipe II pada Paket Pekerjaan Penyusunan Policy Brief Pengawasan Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN, dan Pengawasan Netralitas ASN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat arahan bahwa KASN tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut ditetapkan. Pada perkembangan pembahasannya, fungsi pengawasan ASN terutama terkait penerapan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN akan dialihkan pada instansi Kementerian PANRB atau BKN. Selanjutnya, untuk menjamin peralihan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan dengan baik, perlu dilakukan kajian akademis berbentuk *policy brief* sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk meningkatkan capaian kinerja pengawasan ASN kedepannya.



Gambar 2.82. Kepala Sekretariat KASN, Nurhasni dan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Nurliah Nurdin dalam Penandatanganan PKS antara KASN dan Politeknik STIA LAN Jakarta secara *Desk to Desk*  
Jakarta, 20 Maret 2024

Dilatarbelakangi pertimbangan tersebut, KASN dan Politeknik STIA LAN Jakarta menyepakati penandatanganan perjanjian kerja sama secara *desk to desk* pada 20 Maret 2024 tentang Swakelola Tipe II pada Paket Pekerjaan Penyusunan Policy Brief Pengawasan Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN, dan Pengawasan Netralitas ASN dengan maksud memberikan pedoman pengalihan tugas dan fungsi pengawasan penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, dan pengawasan netralitas ASN.

Perjanjian kerja sama ini mendasari penyusunan 2 (dua) *policy brief* dengan topik “Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai Pedoman Pelaksanaan Fungsi dan Tugas ASN” dan “Belajar dari Pemilu untuk Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak Tahun 2024” meliputi pembahasan terkait isu aktual, deskripsi permasalahan, tantangan pengawasan pasca pengalihan tugas dan fungsi, dan strategi menghadapi tantangan tersebut.



Gambar 2.83. Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun dengan tema “Penguatan Substansi Policy Brief terkait Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku (NKK) dan Netralitas ASN” Jakarta, 30 Mei 2024

Tahap penyusunan *policy brief* lainnya adalah dengan melaksanakan diskusi kelompok terpumpun Penyusunan Policy Brief dengan Tema Kode Etik dan Netralitas di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang pada 3 April 2024.





Gambar 2.84. Kegiatan Focus Group Discussion Penyusunan Policy Brief dengan Tema Kode Etik dan Netralitas ASN  
Malang, 3 April 2024

Pertemuan ini membahas Studi Peran Netralitas Pegawai Negeri Sipil Menyongsong Tahun Politik Indonesia 2024-2029 dalam Perspektif Kepentingan Politik di Kota Medan dan Kota Metro Lampung yang berfokus pada permasalahan pengaruh kepentingan politik, kepemimpinan politik, dan sistem merit terhadap peran netralitas PNS dan hambatan dan tantangan PNS dalam melaksanakan peran politik khususnya terkait sikap netralitas dalam Pemilu 2024.



Gambar 2.85. Policy Brief Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagai Pedoman Pelaksanaan Fungsi dan Tugas ASN dan Policy Brief Netralitas Aparatur Sipil Negara Pasca Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara

Sesuai dengan target awal kerja sama, berdasarkan pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh STIA LAN Jakarta, dihasilkan 2 *policy brief* sebagai pedoman pengawasan ASN bagi instansi yang akan melanjutkan tugas dan fungsi KASN selanjutnya. Adapun Policy Brief Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagai Pedoman Pelaksanaan Fungsi dan Tugas ASN dapat diakses pada tautan [bit.ly/pb-NKK](https://bit.ly/pb-NKK),

sedangkan Policy Brief Netralitas Aparatur Sipil Negara pasca-Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara dapat diakses pada tautan [bit.ly/pb-Netralitas](https://bit.ly/pb-Netralitas).

## **16. Nota Kesepahaman antara Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Badan Kepegawaian Negara tentang Kolaborasi Sistem Pengawasan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara**

Sebagai hasil pemisahan dari rencana kerja sama kolaborasi keempat instansi pemerintah pengelola ASN yang bertujuan untuk memperjelas pembagian tugas dan menawarkan proses bisnis bagi keempat instansi, nota kesepahaman antara KASN dan BKN juga ditandatangani pada 5 November 2021 secara *desk to desk* yang di dalamnya sudah memuat rancangan alur proses bisnis dengan peran masing-masing unit instansi untuk ke-delapan aspek penilaian sistem merit.



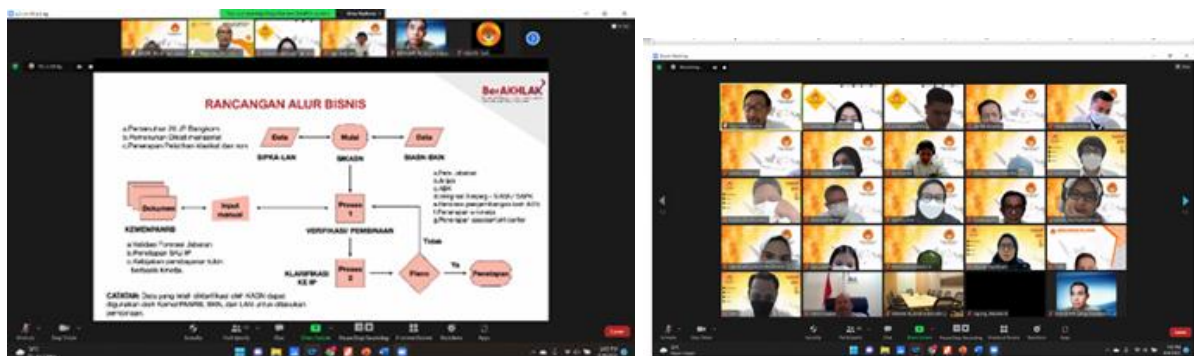
Gambar 2.86. Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman KASN dan BKN secara *Desk to Desk* Jakarta, 5 November 2021

Pada naskah nota kesepahaman antara KASN dengan BKN, KASN mengharapkan sinkronisasi data yang dibutuhkan termasuk terkait dengan aspek penilaian sistem merit dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang dimiliki BKN atau dengan metode lainnya yang dibuktikan dengan berita acara pertemuan dari KASN dan BKN.

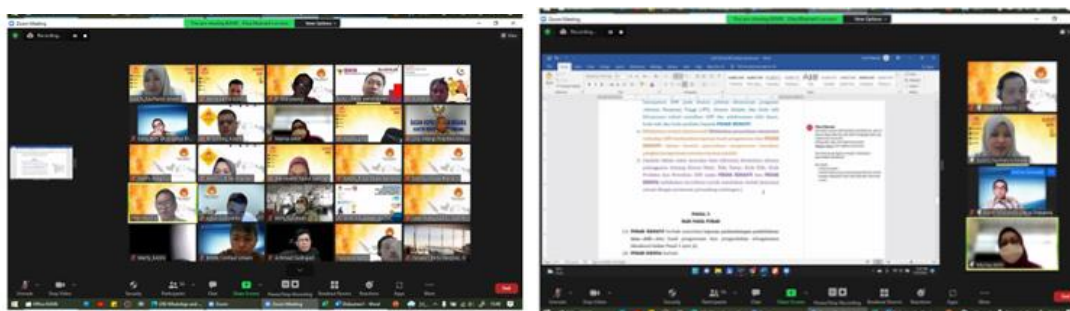
Selanjutnya, penyusunan perjanjian kerja sama antara KASN dengan BKN diinisiasi oleh Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik,

Kode Perilaku, dan Netralitas ASN sebagai bentuk tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara KASN dengan BKN tentang Kolaborasi Sistem Pengawasan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Kerja sama ini akan dilakukan bersama dengan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Pembahasan krusial dalam perjanjian ini adalah terkait pemblokiran sementara sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) pegawai ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN.



Gambar 2.87. Rapat Penyusunan PKS antara KASN dengan BKN Jakarta (dalam jaringan), 4 April 2022



Gambar 2.88. Rapat Pembahasan Naskah PKS antara KASN dengan BKN Jakarta (dalam jaringan), 10 Mei 2022

Berdasarkan pertemuan yang dilakukan, Subbagian Kerja Sama telah melakukan penyesuaian naskah dengan catatan diskusi dan mengakomodir beberapa tambahan substansi dari Pokja NKKNET. Namun setelah beberapa kali dilakukan koordinasi dan diskusi, tidak ditemukan kesepakatan dalam hal tindak lanjut temuan pelanggaran antara KASN dengan BKN, sehingga pada 1 Agustus 2022, Pokja NKKNET memutuskan bahwa status penyusunan kerja sama ini ditangguhkan untuk sementara, dan sampai dengan penyusunan buku ini, penyusunan naskah kerja sama tidak dilanjutkan.

## 17. Nota Kesepahaman antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pengawasan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit

Dilatarbelakangi adanya irisan tugas dan kewenangan antara KASN dan Ombudsman dalam menangani laporan dugaan pelanggaran utamanya terkait perbedaan pemahaman terkait kesalahan maladministrasi dan kesalahan pegawai ASN dalam memberikan pelayanan publik, maka dipandang perlu melaksanakan kerja sama untuk menyamakan persepsi dan memperjelas pembagian kewenangan masing-masing instansi.



Gambar 2.89. Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih; Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja sebagai saksi; dan Ketua KASN, Agus Pramusinto (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KASN dan ORI Jakarta, 31 Mei 2022

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada Selasa, 31 Mei 2022, KASN dan ORI menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pengawasan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit. Kerja sama ini berfokus pada ruang lingkup pencegahan pelanggaran aturan terkait manajemen Aparatur Sipil Negara pada instansi Ombudsman yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat; pencegahan maladministrasi berupa penyusunan kajian terkait pencegahan maladministrasi dan pemenuhan standar pelayanan publik di instansi KASN; percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat melalui koordinasi kedua instansi; melakukan pertukaran data dan informasi

secara elektronik maupun nonelektronik; peningkatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia terkait kewenangan masing-masing instansi; dan melaksanakan pengkajian dan penelitian serta menerapkan dan menjadikannya pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengawasan selanjutnya.

Sebagai tindak lanjut penandatanganan naskah kerja sama ini, telah dilaksanakan Talk Show “Sinergi Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada Serentak” pada hari yang sama.



Gambar 2.90. Talk Show “Sinergi Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada Serentak” Jakarta, 31 Mei 2022

Kegiatan ini ditayangkan melalui media dan menerima pertanyaan langsung dari audiens baik yang mengikuti melalui jaringan maupun beberapa mahasiswa yang mengikuti kegiatan diskusi secara langsung.

Meskipun telah dilakukan penyusunan awal draf perjanjian kerja sama antara KASN dan Ombudsman sebagai bentuk tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman, namun, penyusunan tidak dapat dilanjutkan dikarenakan ketidakterediaan waktu.

## **18. Kerja Sama Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilu dan Pemilihan**

### **a. Keputusan Bersama 5 instansi pemerintah tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang netral, objektif, dan akuntabel, serta untuk membangun sinergitas dan

meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penanganan pengaduan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara maka lima instansi pemerintah menyepakati penyusunan pedoman bersama pengawasan netralitas ASN.

Keputusan bersama ini ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kantor Kementerian PANRB pada Kamis 22 September 2022.



Gambar 2.91. Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Kegiatan Penandatanganan Keputusan Bersama Netralitas Pegawai ASN bersama Plt. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana; Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas; Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian; dan Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja (kiri ke kanan)  
Jakarta, 22 September 2022

Adapun keputusan bersama ini berisikan pedoman terkait upaya pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN pada instansi pemerintah; penjelasan mengenai bentuk pelanggaran serta tingkatan sanksi terhadap pelanggar netralitas ASN; pembentukan Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN yang disertai uraian tugas dan fungsi; tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas dalam Pemilu dan Pemilihan; dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keputusan bersama. Selain itu, pada Keputusan Bersama ini ditekankan kembali terkait kewajiban pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan dan mensosialisasikan Keputusan Bersama, mengupayakan iklim kondusif dan melakukan pembinaan,

pengawasan, dan penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas ASN, menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas atas rekomendasi KASN maupun pihak lain, dan melakukan pengawasan kepada pegawai ASN di instansinya sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; dan kewajiban pegawai ASN dalam menjaga netralitas.

Mengingat lebih komprehensifnya substansi keputusan bersama ini yang tidak terbatas pada periode pemilihan umum atau pemilihan tertentu, maka dengan berlakunya keputusan bersama ini, status Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dicabut.

Salah satu tindak lanjut penandatanganan keputusan bersama ini adalah pelaksanaan Konsinyasi Rapat Koordinasi Tim Satuan Tugas Menghadapi Pemilihan Tahun 2024 dan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut PPK terhadap Rekomendasi KASN dan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Tahun 2024 pada 23 Februari 2024.



Gambar 2.92. Kegiatan Konsinyasi Rapat Koordinasi Tim Satuan Tugas Menghadapi Pemilihan Tahun 2024 dan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut PPK terhadap Rekomendasi KASN dan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Tahun 2024  
Jakarta, 23 Februari 2024

Pertemuan ini mengundang instansi satgas beserta instansi daerah untuk menjelaskan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh satgas serta mengonfirmasi status beberapa rekomendasi KASN yang belum ditindaklanjuti Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pegawai bersangkutan.

**b. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024**

Keberlanjutan kerja sama antara KASN dan Bawaslu terkait pengawasan netralitas ASN telah berlangsung sejak tahun 2015 di awal terbentuknya KASN dengan berbagai perubahan teknis pelaksanaan kerja sama. Salah satu bentuk inovasi untuk memudahkan pembagian data dan pelaksanaan tindak lanjut laporan pengaduan pelanggaran netralitas antara KASN dan Bawaslu dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik, maka pada perjanjian ini, KASN dan Bawaslu menyepakati pemanfaatan Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET) secara bersama dan menjelaskan secara teknis pelibatan unit kerja Bawaslu dalam pengawasan netralitas ASN.



Gambar 2.93. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dan Ketua KASN, Agus Pramusinto (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan PKS antara Bawaslu RI dan KASN Jakarta, 31 Januari 2023

KASN melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 pada 31 Januari 2023 di Kantor Bawaslu.





Gambar 2.94. KASN-Bawaslu bersama perwakilan Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan BKN dalam Kegiatan Penandatanganan PKS Bawaslu RI dan KASN Jakarta, 31 Januari 2023

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara. Ruang lingkup kerja sama ini membahas terkait pertukaran data dan informasi meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, hasil tindak lanjut KASN terhadap laporan baik yang diteruskan atau diberikan rekomendasi oleh Bawaslu maupun yang disampaikan langsung kepada KASN, rekap hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran netralitas, dan rekap hasil penanganan aduan pelanggaran netralitas ASN, termasuk teknis pemanfaatan SIAPNET; pencegahan meliputi penanggung jawab, bentuk kegiatan, dan teknis pelaksanaan kegiatan; pengawasan meliputi mekanisme dan pembagian tugas pengawasan pada setiap tahapan pemilu dan pemilihan baik terkait pelanggaran netralitas ASN maupun dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya; teknis penanganan atas temuan atau laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN berupa keputusan atau tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu dan pemilihan, kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilu atau pemilihan dalam setiap tahap, dan keterlibatan dalam pelaksanaan kampanye; kegiatan pemantauan tindak lanjut PPK atas rekomendasi KASN; pembagian hak dan kewajiban; serta komitmen pelaksanaan sosialisasi.



Gambar 2.95. Pranata Humas Ahli Muda Bawaslu, R Alief Sudewo dan Kepala Sekretariat KASN, Nurhasni (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Konsinyasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri KASN Jakarta, 11 Juli 2023

Pada kegiatan konsinyasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri Komisi Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan pada 11 Juli 2023 yang juga dihadiri oleh Bawaslu, disadari bahwa posisi kepala daerah sebagai pejabat politik seringkali berseberangan dengan sistem merit dalam manajemen ASN, sehingga sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menghadapi pemilu dan pemilihan perlu melibatkan KASN. Begitupun hal teknis seperti penggunaan aplikasi SIAPNET oleh operator Bawaslu daerah juga perlu disosialisasikan untuk memudahkan sinkronisasi data mengingat masih ada Bawaslu daerah yang mengirimkan bukti dugaan pelanggaran secara fisik.

#### **19. Nota Kesepahaman antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan Indonesian Association for Public Administration tentang Kerja Sama Pengkajian Isu Strategis dalam Pengawasan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit**

Kerja sama antara KASN dan Indonesian Association for Public Administration (IAPA) atau dalam bahasa Indonesia disebut Asosiasi Ilmu Administrasi Negara/Publik Indonesia sebelumnya juga sudah terjalin pada masa Pilkada Serentak Tahun 2020 meskipun belum didasari oleh penandatanganan naskah kerja sama. Kerja sama tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan pelanggaran netralitas ASN terhadap 270 kabupaten/kota dengan melibatkan tujuh perguruan tinggi

yang merupakan anggota IAPA. Dengan melibatkan para akademisi dan pakar dalam pengawasan ASN, diharapkan KASN mendapatkan masukan secara ilmiah di bidang administrasi publik dalam perbaikan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat fungsi kelembagaan dalam kajian strategis manajemen Aparatur Sipil Negara serta mendukung program pemerintah pada kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), KASN bersama IAPA memandang perlu menandatangani naskah kerja sama untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

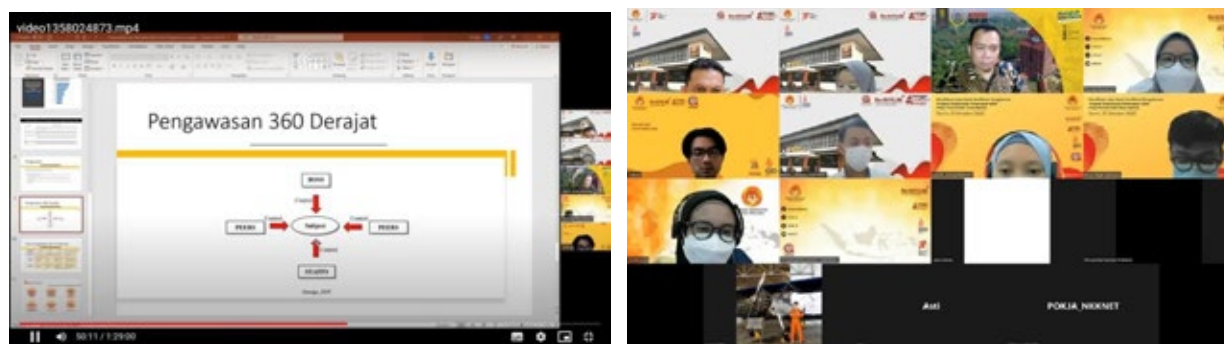


Gambar 2.96. Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan & Riset FISIP UNPAD, Ida Widianingsih; Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto; Wakil Ketua Umum Bidang Kerjasama dan Pengembangan Profesi IAPA, Sri Juni Woro Astuti; Ketua KASN, Agus Pramusinto; Ketua Departemen Administrasi Publik FISIP UNPAD, Asep Sumaryana (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KASN dan IAPA Sumedang, 23 September 2022

Nota Kesepahaman antara KASN dan Indonesian Association for Public Administration tentang Kerja Sama Pengkajian Isu Strategis dalam Pengawasan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit ditandatangani pada tanggal 23 September 2022. Adapun ruang lingkup kerja sama ini meliputi pengembangan kajian isu strategis dalam kebijakan dan manajemen ASN berbasis sistem merit yang juga mencakup pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi, dan penerapan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN melalui kegiatan penelitian, diskusi kelompok terpumpun, kompetisi karya tulis untuk dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pengawasan; pelaksanaan seminar dengan narasumber dari

anggota IAPA; pertukaran data dan informasi baik untuk kebutuhan riset, ringkasan kebijakan, bahan seminar, dan kebutuhan akademik lainnya bagi IAPA, maupun untuk melakukan telaah dan pembuatan reviu kebijakan pengawasan, serta pelaksanaan program kerja bagi KASN; dan pemberian dukungan terhadap kegiatan MBKM melalui kegiatan magang atau riset bagi mahasiswa atau dosen anggota IAPA di kantor KASN maupun penyediaan dosen praktisi dari KASN untuk institusi anggota IAPA.

Sebagai tindak lanjut penandatanganan, terdapat kegiatan pembimbingan 4 (empat) pegawai KASN oleh Dosen Universitas Indonesia, salah satu anggota IAPA, dalam membuat kajian imparisialitas untuk *policy brief* sebagai poin penilaian angka kredit jabatan.



Gambar 2.97. Kegiatan Penyusunan Kajian Pengawasan Imparsialitas ASN Jakarta (dalam jaringan), 31 Oktober 2022

Selain itu, pada 15 Februari 2023, terdapat usulan pembuatan perjanjian kerja sama tentang Webinar Series Netralitas ASN dalam Menyambut Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sebagai tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman KASN dan IAPA. Perjanjian kerja sama tersebut memiliki tujuan untuk memberikan edukasi kepada seluruh ASN dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Namun menimbang pelaksanaan kegiatan webinar dapat tetap terlaksana dengan baik meskipun tidak didahului penandatanganan naskah perjanjian kerja sama, maka penyusunan naskah kerja sama ini tidak dilanjutkan.

## **20. Nota Kesepahaman antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pembangunan dan Pengembangan Center of Excellence Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit**

Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan meningkatkan optimalisasi

penerapan sistem merit pada manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi pembangunan program center of excellence yang bertujuan untuk mendayagunakan instansi pemerintah yang telah mendapatkan predikat sangat baik pada penilaian penerapan sistem merit KASN untuk dapat berbagi pemahaman dan praktik baik kepada instansi pemerintah lainnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelibatan pemerintah provinsi dalam perbaikan birokrasi melalui penerapan sistem merit pada kabupaten dan kota di provinsinya.



Gambar 2.98. Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KASN dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Bandung, 28 Juli 2023

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada 28 Juli 2023 KASN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman tentang Pembangunan dan Pengembangan Center of Excellence Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit di Kantor Gubernur Jawa Barat.



Gambar 2.99. Ketua KASN, Agus Pramusinto; Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja; dan Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KASN dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Bandung, 28 Juli 2023

Terdapat 5 unsur dalam pembangunan dan pengembangan center of excellence yang dibahas dalam nota kesepahaman ini yaitu merit system simulation yang merupakan alat peraga simulasi pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah; merit system community yang merupakan forum diskusi pembelajaran sistem merit dan wadah untuk menuangkan pemikiran ilmiah bagi komunitas; merit system mentoring yang merupakan program pendampingan kepada wilayah yang lemah dari sisi pendanaan dan infrastruktur terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; merit system course, yang merupakan penyelenggaraan pembelajaran sistem merit yang disusun dalam kurikulum pelatihan; merit system publication and gallery berupa pusat informasi dan publikasi serta penyedia galeri infrastruktur sistem merit dari berbagai model.



Gambar 2.100. Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II, Satria Adi (dua dari kiri) dan Kepala BKD Jawa Barat, Sumasna dalam kegiatan Sosialisasi Center of Excellence dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Bandung, 8 November 2023

Sebagai tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman ini, telah dilaksanakan sosialisasi center of excellence dan penyelenggaraan penilaian kompetensi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan diisi oleh Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II KASN sebagai salah satu narasumber. Namun sampai dengan penyusunan buku ini, belum dilakukan penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana disepakati pada nota kesepahaman ini.

## **21. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tentang Swakelola Tipe II pada Paket Pekerjaan Penyusunan Naskah Kajian Ilmiah Penataan Kelembagaan**

Menindaklanjuti dinamika penyusunan rancangan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara pemerintah dan DPR RI yang menyepakati rencana penguatan lembaga pengawas sistem merit, maka KASN menginisiasi penyiapan opsi penataan kelembagaan KASN Pasca Revisi Undang-Undang ASN. Selanjutnya, dalam penyusunan rancangan tata kelembagaan ini, dipandang perlu pelibatan ahli, sehingga KASN melibatkan tim kajian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.



Gambar 2.101. Kepala Sekretariat KASN, Nurhasni dan Dekan FISIP UGM, Wawan Mas'udi dalam Kegiatan Penandatanganan PKS antara KASN dengan FISIP UGM disaksikan Ketua KASN, Agus Pramusinto (kanan) dan Ketua Tim Kajian Gabriel Lele (kiri)  
Yogyakarta, 7 Agustus 2023

Dilatarbelakangi pertimbangan tersebut, pada tanggal 7 Agustus 2023, di Gedung FISIP Universitas Gadjah Mada, KASN menjalin kerja sama dengan FISIP Universitas Gadjah Mada melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Swakelola Tipe II pada Paket Pekerjaan Penyusunan Naskah Kajian Ilmiah Penataan Kelembagaan. Adapun objek dan ruang lingkup perjanjian ini mencakup penyusunan postur ideal kelembagaan KASN pasca-revisi undang-undang; penyusunan bahan materi dan substansi rancangan Peraturan Presiden tentang kelembagaan KASN; pendefinisian tugas dan fungsi secara teknis dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi lembaga; dan tata kerja, kolaborasi, dan sinkronisasi tata kerja kelembagaan manajemen ASN. Adapun pembiayaan penyusunan naskah kajian ilmiah ini akan dibebankan pada anggaran KASN dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan paling lama 60 hari kalender.





Gambar 2.102. Dosen Manajemen dan Kebijakan Pemerintahan sebagai Ketua Tim Kajian, Gabriel Lele; Dekan FISIP UGM, Wawan Mas'udi; Kepala Sekretariat KASN, Nurhasni; Ketua KASN, Agus Pramusinto (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan PKS antara KASN dengan FISIP UGM Yogyakarta, 7 Agustus 2023

Penandatanganan naskah kerja sama tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan kontrak kerja antara KASN dan FISIP UGM.



Gambar 2.103. Kegiatan Penyusunan Kontrak Kerja KASN dan FISIP UGM Yogyakarta, 7 Agustus 2023

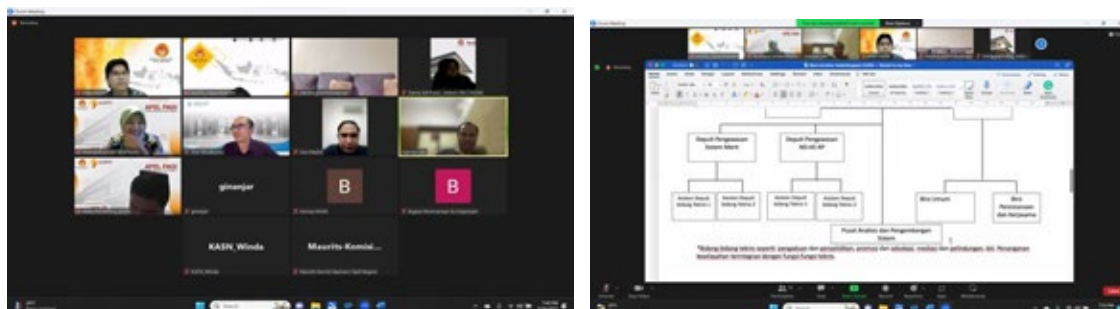
Kontrak kerja ini merupakan perjanjian turunan yang berisikan teknis pengadaan naskah kajian ilmiah penataan kelembagaan KASN yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak secara administrasi pertanggungjawaban keuangan.

Beberapa kegiatan dalam rangka penyusunan naskah kajian ini telah dilaksanakan baik dalam internal tim kajian maupun yang melibatkan KASN sebagai subjek kajian, di antaranya telah dilakukan Focus Group Discussion Penyusunan Naskah Kajian Ilmiah Penataan Kelembagaan KASN pada 7 September 2023.



Gambar 2.104. Kegiatan FGD Penyusunan Naskah Kajian Ilmiah Penataan Kelembagaan KASN Jakarta (langsung dan dalam jaringan), 7 September 2023

Pada kegiatan diskusi kelompok terpusat yang dilaksanakan pada 7 September 2023, tim kajian mengumpulkan data dan informasi bukan hanya dari pimpinan dan pejabat tapi juga dari pegawai KASN tentang proses bisnis dalam mendukung tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi yang berlangsung di KASN. Pertukaran pikiran melingkupi beberapa bahasan diantaranya terkait tingkat eselonisasi dalam struktural organisasi KASN, rekrutmen anggota KASN, status jabatan asisten KASN, fungsi dan kewenangan pengawas internal KASN, tumpang tindih tugas dan fungsi jabatan fungsional KASN, gap competency, jemput bola kasus pelanggaran dari KASN sehingga tidak hanya menunggu aduan, hambatan dan kelebihan pelaksanaan tugas secara proses bisnis yang saat ini eksis, independensi KASN terkait anggaran dan koordinasi langsung di bawah Presiden, perluasan dan perwakilan KASN di daerah, pembagian tugas dan proses bisnis kolaborasi dengan sesama 4 instansi pengelola manajemen ASN, output dan tindak lanjut terhadap pengawasan KASN, tugas pengawasan sistem merit terhadap manajemen talenta, kewenangan terhadap kewenangan PPK, dan beberapa bahasan lainnya.



Gambar 2.105. Pertemuan Lanjutan Penataan Kelembagaan Jakarta (dalam jaringan), 26 September 2023

Setelah berada pada tahap penyiapan beberapa opsi struktur yang ideal untuk KASN, pada tanggal 26 September 2023, KASN dan tim kajian kelembagaan KASN mengadakan pertemuan di luar rencana dikarenakan terdapat pergeseran arahan Presiden yang semula dalam penyusunan draf revisi undang-undang akan mendorong penguatan kelembagaan KASN menjadi isu pembubaran. Meskipun demikian, pada pertemuan tersebut, tim kajian menyampaikan beberapa opsi struktur kelembagaan yang telah mereka rencanakan berdasarkan analisa dan masukan dari KASN pada pertemuan sebelumnya dengan harapan meskipun terjadi peleburan instansi, opsi struktur ke deputian dapat diusulkan kepada instansi baru.



Gambar 2.106. Hasil Kajian Penyiapan Penataan Kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara/Lembaga Pengawas Penerapan Sistem Merit pasca-Revisi Undang-Undang ASN

Meskipun dengan adanya pergeseran arah pembahasan rancangan Revisi Undang-Undang ASN yang baru, kajian ini tetap dilanjutkan mengingat hasil kajian dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dalam menentukan pengalihan fungsi pengawasan ASN. Hasil kajian dapat diakses pada tautan berikut [https://bit.ly/hasilkajian\\_UGM](https://bit.ly/hasilkajian_UGM). Adapun hasil kajian ini memberikan rekomendasi agar kemandirian lembaga pengawas ASN sebagai sebuah lembaga yang fungsinya tidak dilebur kepada instansi lain tetap dipertahankan. Hal ini dilakukan melalui penguatan kewenangan pada struktur organisasi eksisting, penggantian struktur sekretariat menjadi sekretariat jenderal yang memiliki inspektorat sebagai pengawas internal, jabatan Asisten KASN diduduki oleh JPT Pratama atau jabatan struktural eselon 2a. Selain itu, terdapat catatan agar penguatan sinergi dan kolaborasi lembaga pengelola ASN berjalan lebih baik ke depannya.

## **22. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Pengawasan Konten Internet terkait Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024**

Dalam rangka menyambut pesta demokrasi 2024 dan berkaca pada temuan kasus pelanggaran nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN pada tahun-tahun sebelumnya, maka KASN memandang perlu untuk bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pelacakan jejak digital ASN yang diduga melakukan pelanggaran pada media sosial. Pada tahap awal rencana kerja sama, KASN mengharapkan penelusuran jejak digital juga mencakup unggahan media sosial yang sudah dihapus dan pelacakan akun palsu ASN. Namun, dalam tahap diskusi, Ditjen Aptika Kementerian Kominfo menyampaikan faktor batasan kewenangan antar unit kerja kementerian dan mekanisme penelusuran akun yang tidak memungkinkan pelacakan akun palsu ASN pada kerja sama ini, namun menyanggupi ruang lingkup kerja sama lainnya. Selain itu, terdapat pergeseran objek pengawasan yang awalnya pada media sosial menjadi konten internet.



Gambar 2.107. Dirjen Aptika, Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan dan Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto (kiri ke kanan) dalam Kegiatan Penandatanganan PKS antara KASN dan Ditjen Aptika, Kementerian Kominfo Jakarta, 26 Oktober 2023

Berdasarkan kesepakatan, pada 26 Oktober 2023 Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, Samuel

Abrijani Pangerapan menandatangani perjanjian kerja sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Pengawasan Konten Internet terkait Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.



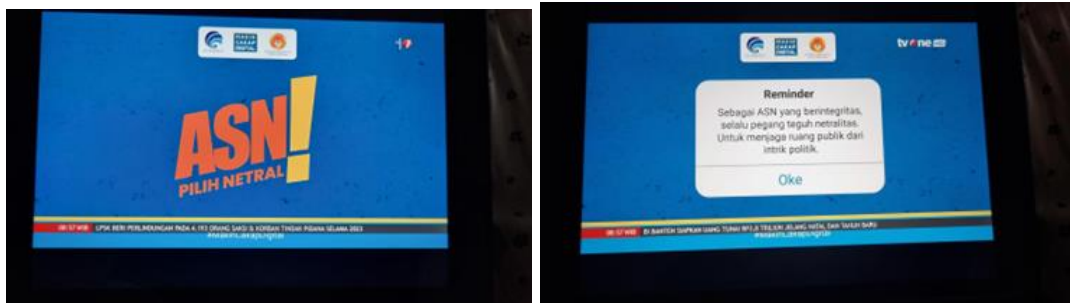
Gambar 2.108. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan dan Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto (kiri ke kanan) dalam Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan PKS antara KASN dan Ditjen Aptika, Kementerian Kominfo Jakarta, 26 Oktober 2023

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pertukaran data atau informasi terkait konten internet yang diduga melanggar netralitas ASN dari KASN untuk ditelaah oleh Ditjen Aptika; pengawasan konten internet yang diduga melanggar netralitas ASN melalui kegiatan pencegahan pelanggaran dengan memuat materi netralitas pegawai ASN yang disiapkan oleh KASN pada program Literasi Digital dan kanal sosialisasi Kementerian Kominfo lain; dan penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN melalui penelusuran profil pegawai ASN yang memiliki konten internet yang diduga melanggar netralitas serta penyediaan bimbingan teknis terkait pengawasan dan penanganan konten internet.



Gambar 2.109. Forum Tematik Bakohumas “Mengejar Mimpi Netralitas Birokrasi” Jakarta, 22 November 2023

Sebagai bentuk tindak lanjut penandatanganan perjanjian kerja sama ini, dalam rangka menyosialisasikan asas netralitas pegawai ASN, pada Rabu 22 November 2023 KASN meluncurkan logo netralitas ASN dengan mengajak Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) instansi pemerintah untuk menyebarkan pesan netralitas pada birokrasi melalui slogan ASN PILIH NETRAL baik melalui penggunaan logo, twibbon, poster edukasi, dan konten lainnya.



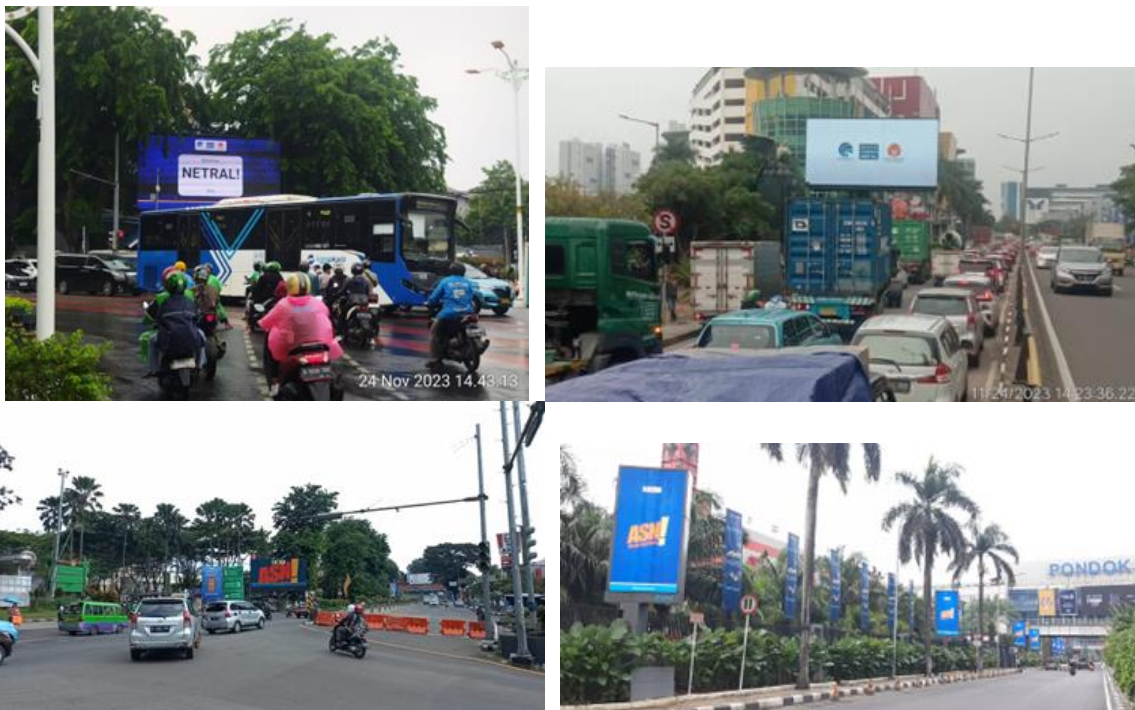
Gambar 2.110. Penayangan konten netralitas ASN pada TV One

Logo ini selanjutnya menjadi konten literasi digital Kementerian Kominfo dan ditayangkan melalui beberapa media elektronik diantaranya televisi swasta, TV One.



Gambar 2.111. Penayangan konten Literasi Digital Kementerian Kominfo berisikan kampanye netralitas ASN melalui media instagram

Sebagai salah satu konten literasi digitalnya, Kementerian Kominfo juga menayangkan materi berisikan kampanye netralitas ASN melalui media instagramnya.



Gambar 2.112. Penayangan konten Netralitas ASN pada videotron Jabodetabek Jalan Proklamasi (kiri atas), Pluit (kanan atas), Botani Square Baranangsiang, Bogor (kiri bawah), dan Jakarta Selatan (kanan bawah)

Selain melalui media massa dan media sosial, kampanye netralitas ASN juga ditayangkan secara langsung melalui beberapa videotron iklan layanan masyarakat di Jabodetabek.



Gambar 2.113. Penayangan logo ASN Pilih Netral melalui videotron Grahatama Perpustakaan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta

Tidak hanya di Jabodetabek, videotron Grahatama di depan Perpustakaan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta juga mengkampanyekan ASN Pilih Netral.



## BAB III

### KERJA SAMA KASN DENGAN MITRA DALAM DAN LUAR NEGERI

Selain melaksanakan tugas pengelolaan kerja sama yang menghasilkan produk naskah kerja sama, Subbagian Kerja Sama juga bertanggung jawab dalam administrasi dan fasilitasi kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri yang tidak harus didasari dan/atau menghasilkan naskah kerja sama. Fasilitasi ini juga mencakup layanan administrasi perjalanan dinas luar negeri baik bagi Pimpinan maupun pegawai KASN apabila dibutuhkan.

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa kolaborasi dan koordinasi yang telah dilakukan KASN dengan instansi pemerintah maupun organisasi pemerintah dalam maupun luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan KASN dan mempelajari praktik pengawasan ASN dari negara lain.

#### 1. Diskusi Seminar dengan Akademisi Georg August Universitat di Berlin, Jerman pada 18-22 Juli 2017

Georg August Universitat Gottingen merupakan universitas penelitian internasional yang berkomitmen terhadap nilai tanggung jawab sosial dari ilmu pengetahuan, demokrasi, toleransi, dan keadilan.



Gambar 3.1. Pertemuan KASN dengan Kedutaan Besar Indonesia untuk Jerman Jerman, 19 Juli 2017

Kegiatan diskusi dan seminar dengan Akademisi Georg August Universitat di Berlin, Jerman diikuti oleh Kepala Sekretariat KASN, Harry Mulya Zein; Sekretariat KASN, Rahmat Jaya P Siregar; dan pegawai KASN Bidang Penanganan Pengaduan dan

Penyelidikan, Andi Hakim. Kegiatan ini dilaksanakan di Jerman pada 19 Juli 2017.

## 2. Seminar at The Dutch Senior Civil Service di Alkmaar, Belanda pada 19-24 Juli 2017

The Dutch Senior Civil Service atau Algemene Bestuursdienst (ABD) merupakan kumpulan pejabat pimpinan tinggi pada Pemerintahan Belanda yang menduduki posisi paling rendah direktur pada setiap kementerian di Belanda. ABD Office bertanggung jawab terhadap rekrutmen dan seleksi, serta pengembangan dan kerja sama posisi manajerial. Selain itu, ABD Office menawarkan program pengembangan talenta baik yang berasal dari dalam maupun luar pemerintah Belanda yang tertarik untuk berkarir dalam pemerintah.



Gambar 3.2. Anggota KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, I Made Suwandi dan Asisten KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Irwansyah dalam Kunjungan kegiatan Seminar at The Dutch Senior Civil Service di Alkmaar, Belanda Belanda, 19-24 Juli 2017

Kegiatan Seminar at The Dutch Senior Civil Service di Alkmaar, Belanda diikuti oleh Ketua KASN, Sofian Effendi, Anggota KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, I Made Suwandi dan Asisten KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Irwansyah.

### 3. Kunjungan Ombudsman Australia ke KASN pada 8 September 2017

Ombudsman Australia merupakan instansi independen yang bertugas dalam penyelesaian konflik antara individu dengan badan industri atau instansi pemerintah. Ombudsman dapat melakukan investigasi terhadap aduan terkait perlakuan tidak adil yang diterima oleh masyarakat.



Gambar 3.3. Ketua Ombudsman Australia, Michael Manthorpe dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofian Effendi dalam Pertemuan Pembahasan Potensi Kerja Sama Jakarta, 8 September 2017

Pada 8 September 2017, KASN menerima kunjungan Ketua Ombudsman Australia, Michael Manthorpe yang disambut langsung oleh Ketua KASN, Sofian Effendi. Kunjungan ini ditujukan untuk memperluas pengetahuan Ombudsman Australia tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Selain itu, KASN dan Ombudsman Australia membahas potensi kerja sama antar instansi di masa depan.

### 4. The First Meeting: Improving a Human Resource Management in asian Civil Service di Tokyo, Jepang pada 25-29 September 2017

National Personnel Authority Jepang merupakan institusi netral yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin keadilan dalam administrasi kepegawaian dan menjaga hak kepegawaian aparatur negara Jepang yang memiliki fungsi utama dalam rekrutmen, pelatihan, dan penetapan standar pengangkatan dan pemberhentian pegawai, memberikan rekomendasi terkait remunerasi dan hak pegawai lainnya; dan meningkatkan kualitas sistem manajemen kepegawaian.



Gambar 3.4. Asisten KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Septiana Dwiputrianti dalam Kegiatan The First Meeting: Improving a Human Resource Management in Asian Civil Service Jepang, 25-29 September 2017

Kegiatan The First Meeting: Improving a Human Resource Management in Asian Civil Service dilaksanakan di Tokyo, Jepang dan diikuti oleh Asisten KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem.

#### **5. Managing Global Governance Conference in Bonn, Jerman pada 16-24 November 2017**

Dalam rangka memperingati 10 tahun Managing Global Governance dengan alumni, maka dilaksanakan konferensi “Global Justice and Social Cohesion: Key Challenges of the 2030 Agenda. Pertemuan ini dilakukan untuk merencanakan agenda untuk pengembangan berkelanjutan 2030 dan dihadiri oleh praktisi pemerintahan dan organisasi non pemerintahan. KASN mengirimkan pegawai KASN Bidang Penanganan Pengaduan dan Penyelidikan, Andi Hakim dalam pertemuan yang dilaksanakan pada 16-24 November 2017 di Jerman ini.

#### **6. Diskusi KASN dengan Public Service Commission of Malaysia di Putrajaya, Malaysia pada 5 Desember 2017**

Public Service Commission of Malaysia merupakan instansi independen yang bertanggung jawab dalam pelantikan, pengesahan ASN, pemberian pensiun, kenaikan pangkat, pembentukan dan pengawasan kepatuhan terhadap aturan dan disiplin ASN.

Kegiatan Diskusi KASN dengan Public Service Commission of Malaysia di

Putrajaya, Malaysia, pada 5 Desember 2017 diikuti oleh Wakil Ketua KASN, Irham Dilmy, Anggota KASN Bidang Promosi dan Advokasi, Prijono Tjiptoherijanto, Anggota KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Nuraida Mokhsen, Asisten KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Septiana Dwiputrianti, Asisten KASN Bidang Mediasi dan Perlindungan, Antonios Sumaryono, dan Perwakilan Sekretariat KASN Mulyani Puji Lestari, Bona M. A. Pardede.

#### **7. Diskusi KASN dengan Civil Service Commission Royal Thai Government di Nothaburi, Thailand pada 7 Desember 2017**

Studi perbandingan instansi pengawas ASN juga dilakukan oleh KASN ke Thailand pada 7 Desember 2017. KASN melakukan kunjungan ke The Office of the Civil Service Commission Royal Thai Government (OCSC) di Nothaburi, Thailand. OCSC merupakan instansi pemerintah Thailand yang bertugas sebagai sekretariat Civil Service Commission Thailand dan menjalankan fungsi pengelolaan SDM ASN yang menjamin pegawai melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai merit, standar etik, dan prinsip good governance dalam rangka menjamin hak masyarakat dan pengembangan nasional berkelanjutan.



Gambar 3.5. Kegiatan Diskusi KASN dalam kunjungan ke Office of the Civil Service Commission Thailand  
Thailand, 7 Desember 2017

Kunjungan ke The Office of Civil Service Commission Royal Thai Government diikuti oleh Ketua KASN, Sofian Effendi; Anggota KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, I Made Suwandi; Asisten KASN Bidang Monitoring dan Evaluasi,

Irwansyah; Asisten KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Sumardi; Asisten KASN Bidang Mediasi dan Perlindungan, Andi Abubakar; Asisten KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Nurhasni; Tim Sekretariat KASN, Taufik Abdullah, dan pegawai KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Andi Hakim.



Gambar 3.6. Kunjungan ke Office of the Civil Service Commission Thailand Thailand, 7 Desember 2017

Pada kegiatan ini, KASN dan CSC Thailand mendiskusikan terkait praktik baik penerapan sistem merit dalam manajemen ASN Thailand.

#### **8. Improving and Developing Human Resources Management in Asian Civil Service Meeting in Japan di Tokyo, Jepang pada 1-5 Oktober 2018**

Kegiatan Improving and Developing Human Resources Management in Asian Civil Service Meeting in Japan dilaksanakan di Tokyo, Jepang pada 1-5 Oktober 2018. Pada kegiatan ini KASN diwakili oleh Wakil Ketua KASN, Irham Dilmy. Kegiatan ini dilaksanakan oleh NPA sebagai bagian dari kegiatan tahunan dalam bentuk diskusi untuk berbagi praktik baik pengelolaan SDM ASN dari berbagai negara.

#### **9. 2018 Asia Organization Development Network Summit di Cebu City, Filipina pada 24-26 Oktober 2018**

The Organization Development Practitioners Network Philippines mengadakan OD Network Summit 2018 pada 24-26 Oktober di Cebu Filipina dengan tema Asian OD:

Roots and Wings yang terdiri dari 5 sesi yaitu OD in Asia, organization transformation, evidence-based OD interventions, new approaches in OD, dan OD tools and skill learning session. Kegiatan ini diikuti oleh Wakil Ketua KASN, Irham Dilmy dan Asisten KASN Bidang Mediasi dan Perlindungan, Antonius Sumaryanto yang memaparkan materi sesuai dengan topik.

#### **10. 2018 Annual AGPA Conference: Resilience and Strong Institutions: Responses and Solutions of Public Administration di Quezon City, Filipina pada 25-28 November 2018**

Asian Group for Public Administration (AGPA) merupakan kelompok yang berafiliasi kepada International Institute of Administrative science (IIAS) yang bertujuan untuk membangun sarana untuk mempromosikan perkembangan penelitian teoritis dan praktik inovasi dalam area administrasi publik.



Gambar 3.7. Kegiatan 2018 Annual AGPA Conference Resilience and Strong Institutions: Responses and Solutions of Public Administration to Disruption Stresses and Shock Filipina, 25-28 November 2018

Kegiatan konferensi tahunan AGPA Tahun 2018 yang bertemakan Resilience and Strong Institutions: Responses and Solutions of Public Administration to Disruption Stresses and Shock dilaksanakan di Filipina. Kegiatan ini diikuti oleh Anggota KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Nuraida Mokhsen, dan Asisten KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Septiana Dwiputrianti dan Anggota Hayun Anujprana.

## 11. Kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia ke KASN pada 21 Februari 2019



Gambar 3.8. Pertemuan antara Duta Besar Australia, Gary Francis Quinlan dengan Ketua KASN, Sofian Effendi; Anggota KASN Bidang Monitoring dan Evaluasi, Waluyo; Anggota KASN Bidang Promosi dan Advokasi, Prijono Tjiptoherijanto  
Jakarta, 21 Februari 2019

Pada 21 Februari 2019, KASN menerima kunjungan Duta Besar Australia, Gary Francis Quinlan sebagai negara yang sudah menjalin kerja sama yang baik dengan KASN sejak 2015. Kunjungan ini diterima oleh Ketua KASN Sofian Effendi; Anggota KASN Bidang Monitoring dan Evaluasi, Waluyo; Anggota KASN Bidang Promosi dan Advokasi, Prijono Tjiptoherijanto; dan Anggota KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Nuraida Mokhsen.

## 12. Asian Association for Public Administration Annual Conference di Manila, Filipina pada 21-23 Mei 2019

Asian Association for Public Administration merupakan komunitas administrasi publik Asia yang menyatukan akademisi dan praktisi untuk mengembangkan dan memperbaiki penelitian dan pertukaran akademik terkait administrasi publik dan kebijakan publik di wilayah Asia. Semenjak didirikan pada 2010, AAPA selalu mengadakan konferensi tahunan di beberapa kota dari negara yang berbeda seperti Jepang, Indonesia, Cina, Korea Selatan, Filipina, Thailand, dan Kazakhstan.

Konferensi tahunan tahun 2019 kembali diadakan oleh AAPA di Filipina



berkolaborasi dengan Philippine Society for Public Administration, National College of Public Administration and Governance, University of The Philippines, Association of Schools of Public Administration of the Philippines, dan De La Salle-College of Saint Benilde Manila, Philippines dengan tema “Public Administration and the Future: Challenges and Opportunities in Realizing the Sustainable Development Goals and Directions for Reform and Capacity Building” dan dihadiri oleh lebih dari 200 partisipan dari akademisi, lembaga pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi internasional.

Pada pertemuan ini Ketua KASN, Sofian Effendi akan ikut berdiskusi pada sesi pleno dengan materi terkait Public Sector Reform and Sustainable Development bersama menteri-menteri pengawas Aparatur Sipil Negara dari Filipina dan Korea Selatan sedangkan Anggota KASN Pengawasan Bidang Promosi dan Advokasi, Priyono Tjiptoherijanto mempresentasikan tulisannya tentang “Civil Service in the Philippines: Building Strong Governance”.

### **13.3rd Meeting on Human Resource Management Improvement in the Asian Civil Service of the National Personnel Authority (NPA) of Japan di Tokyo, Jepang pada 30 September- 4 Oktober 2019**

Sejak 2017 NPA secara tahunan mengadakan Meeting on Human Resource Management Improvement in the Asian Civil Service dengan mengundang pakar dari negara-negara di Asia untuk memperluas jaringan organisasi administrasi kepegawaian dan saling berbagi isu dan pengalaman terkait manajemen SDM masing-masing instansi.





Gambar 3.9. Asisten KASN Bidang Promosi dan Advokasi, Nurhasni dalam kegiatan The 3rd Meeting on Human Resource Management Improvement in the Asian Civil Service of the National Personnel Authority  
Jepang, 30 September-4 Oktober 2019

Kegiatan 3rd Meeting on Human Resource Management Improvement in the Asian Civil Service ini diadakan oleh National Personnel Authority Jepang dan dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Thailand yang mempresentasikan materi terkait Building and Promoting Public Trust dengan tujuan saling berbagi pengalaman dan ide untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara.

Pada pertemuan ini, Asisten KASN Bidang Promosi dan Advokasi, Nurhasni memaparkan materi tentang Implementation of ASN Code of Ethic and Code of Conduct for the Best Public Trust.

#### **14. Third Regional Workshop on ASEAN Guideline on Public Service Delivery di Siem Reap, Kamboja pada 27-30 November 2019**

Meskipun memiliki tujuan yang sama untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, negara-negara anggota ASEAN (ASEAN member state/AMS) masih menggunakan pendekatan yang tidak konsisten serta komitmen dan tahapan yang berbeda dalam memberikan pelayanan kepada publik; kurang bekerja sama dan belum saling belajar untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayanan publik; serta belum memiliki pedoman yang sama dalam memberikan pelayanan publik. Didasari hal tersebut, AMS bersepakat untuk membuat panduan yang berisikan prinsip-prinsip untuk

dipedomani bersama dalam meningkatkan kualitas pemberian pelayanan publik serta membuat platform kerja sama, saling berbagi dan mengambil pelajaran terkait peningkatan kualitas pelayanan publik antara AMS, negara ASEAN-plus three dan organisasi internasional lainnya.



Gambar 3.10. Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Kegiatan the Third Regional Workshop on ASEAN Guideline on Public Service Delivery Kambodja, 27-29 November 2019

Dalam kegiatan workshop ketiga penyusunan pedoman ini kegiatan dilaksanakan oleh Ministry of Civil Service Kamboja dan dihadiri oleh 20 delegasi dari negara anggota ASEAN, 1 orang delegasi Sekretariat ASEAN, 2 orang konsultan regional, 2 orang dari UNDP dan pakar pemerintahan, dan 100 orang pejabat manajerial Kamboja. Adapun pertemuan berfokus pada topik pembahasan key concept of draft ASEAN Guideline on Public Service Delivery.

Pada pertemuan ini, perwakilan Indonesia termasuk Ketua KASN, Agus Pramusinto memberikan masukan terhadap Draft ASEAN Public Service Delivery Guideline dan menyampaikan pengalaman studi kasus pemerintah Indonesia dalam

meningkatkan pelayanan publik dengan pendekatan inovatif. Melalui pertemuan ini, Indonesia memberikan rekomendasi terkait administrasi publik yang baru yang tidak hanya berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan ekonomi, namun juga menjamin keadilan sosial. Begitupun terkait manajemen publik baru yang dapat menggunakan model sektor swasta dengan menerapkan sistem desentralisasi dalam pengambilan keputusan di lapangan serta mampu mengontrol input dan output, manajemen kinerja, pemantauan dan evaluasi, serta audit. Sedangkan, untuk layanan publik baru diharapkan dapat berfokus pada sentris warga negara dengan menerapkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

### **15. Knowledge Co-creation Workshop yang diselenggarakan oleh National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) di Tokyo, Jepang pada 04-07 Desember 2019**

National Graduate Institute for Policy Studies merupakan sekolah pascasarjana yang berdiri sendiri dengan pusat penelitian dan jangkauan global yang berkontribusi dalam perbaikan pemerintahan demokrasi melalui penyediaan pendidikan interdisiplin bagi pemimpin sektor publik di masa depan serta mengadakan penelitian yang terkait dengan isu kebijakan kontemporer demi menghasilkan solusi inovatif.



Gambar 3.11. Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam kegiatan Knowledge Co-creation Workshop Jepang, 4-7 Desember 2019

Knowledge Co-creation Workshop diadakan oleh GRIPS melalui proyek Leadership Enhancement & Administrative Development for Innovative Governance in Asia (LEADING Asia) dan dihadiri oleh pegawai pemerintah atau peneliti dari Filipina,

Indonesia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Laos, dan Jepang.

## 16. IASIA-Doha Institute Regional Conference di Doha, Qatar pada 10-13 Desember 2019

International Association of Schools and Institutes of Administration merupakan entitas dari International Institute of Administrative Sciences (IIAS) namun memiliki tata kelola sendiri: Dewan Pengurus dan Majelis Umum serta jaringannya sendiri (anggota). IASIA berbagi Sekretariat dengan IIAS.

IASIA/IIAS akan mempengaruhi agenda tata kelola global melalui acara-acara berdampak tinggi yang menargetkan dan melibatkan baik layanan publik maupun akademisi; produksi dan penyebaran pengetahuan yang relevan tentang tata kelola publik; memungkinkan proyek kolaboratif dan strategis dengan anggota dan mitra; serta mengakreditasi program pelatihan akademis dan profesional sesuai dengan standar praktik terbaik dalam manajemen publik.



Gambar 3.12. Anggota KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Sri Hadiati Wara Kustriani dan Asisten KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Septiana Dwiputrianti dalam Kegiatan IASIA-Doha Institute Regional Conference Qatar, 10-13 Desember 2019

Pertemuan ini membahas terkait kapasitas SDM, kepemimpinan, kerja sama sektor pemerintah dan swasta, dan ekonomi berbasis pengetahuan dan dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia, China, Malaysia, Afrika Selatan, Botswana, Tunisia, Jerman, Prancis, Belanda, Australia, dan Amerika Utara.

Pada pertemuan ini Anggota KASN, Sri Hadiati Wara Kustriani dan Asisten KASN, Septiana Dwiputrianti mempresentasikan kajian berdasarkan topik Human Resource Capacity Development for Achieving National Development Agendas dengan judul Enhancing Civil Service Capacities to Deliver Indonesian Talent Management Strategic Plan through Merit Implementation. Dari pertemuan ini, peserta kegiatan dari KASN melihat potensi kerja sama dengan China, Jerman, dan Tunisia dan mendapatkan masukan terkait peningkatan upaya preventif dalam pelaksanaan tugas pengawasan ASN dan perbaikan instrumen penilaian sistem merit agar berbasis pada praktik baik internasional dengan metodologi dan validitas data yang lebih jelas serta mengurangi tingkat subjektivitas.

#### **17. Kunjungan SKD Titik Lokasi Luar Negeri ke Kota Istanbul, Republik Turki pada 23-28 Oktober 2021**

Dalam rangka pelaksanaan rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara tahun 2021, maka Kementerian Luar Negeri dan Badan Kepegawaian Negara melaksanakan seleksi tahap awal ujian Seleksi Kompetensi Dasar dengan metode computerized assisted test (CAT) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Istanbul. Pelaksanaan kegiatan ini dihadiri juga oleh Anggota KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Rudiarto Sumarwono, dalam rangka melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan seleksi menggunakan metode CAT tersebut.

#### **18. Meeting on Human Resource Management Improvement in the Asian Civil Service dari National Personnel Authority Jepang secara daring pada 22 Maret 2022**

Sebagai bagian dari kegiatan tahunan National Personnel Authority Jepang sejak 2017, KASN kembali diundang untuk mengikuti kegiatan Meeting on Human Resource Management Improvement in the Asian Civil Service dari NPA dengan tema Flexible Working During and After the Pandemic pada 22 Maret 2022.



Gambar 3.13. Anggota KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I, Rudiarto Sumarwono dalam Kegiatan Meeting on Human Resource Management Improvement in the Asian Civil Service Jakarta (dalam jaringan), 22 Maret 2022

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh Anggota KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I. Pada kegiatan ini, Anggota KASN menyampaikan paparan tentang Flexible Working Arrangements in Indonesia dengan harapan penyesuaian sistem kerja tidak hanya didukung oleh teknologi, namun juga merekomendasikan agar adanya dukungan kebijakan dari pemerintah. Setelah kegiatan ini dilaksanakan, KASN mendapatkan bukti transkrip audio kegiatan dan Laporan Bulanan NPA Nomor 876 versi bahasa Inggris dan bahasa Jepang.

Mengingat kegiatan ini merupakan kegiatan rutin NPA Jepang, maka pada 29 September 2022, KASN kembali menerima tawaran untuk menghadiri Meeting on Human Resource Management Improvement in the Asian Civil Service dengan tema Development of Systems towards Further Flexible Working and/or Digital Transformation yang akan dilaksanakan langsung di Tokyo, Jepang pada 27 Februari-3 Maret 2023.

### **19. Kunjungan Anti Corruption Commission of The Maldives ke KASN pada 26 September 2022**

Anti Corruption Commission of The Maldives merupakan instansi pemerintahan berupa entitas legal yang independen yang memiliki fungsi untuk mencegah dan

melarang tindak korupsi dalam sektor pemerintah Maladewa. ACC memiliki mandat dalam penegakan integritas, mencegah, dan melawan tindak korupsi pada setiap sektor pemerintahan.



Gambar 3.14. Presiden Anti-Corruption Commission Maladewa, Adam Shamil dan Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Pertemuan antara Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Anti Corruption Commission of The Maldives  
Jakarta, 26 September 2022

Pada tanggal 12 September 2022, KASN menerima permintaan kontak dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Colombo terkait rencana pertemuan Delegasi Anti-Corruption Commission Maladewa dengan KASN. Berdasarkan arahan Pimpinan, maka KASN menerima delegasi dari ACC Maldives pada 26 September 2022 dengan pembahasan terkait penjaminan dan pengawasan integritas ASN Indonesia. Pada pertemuan tersebut, kedua instansi perwakilan dua negara saling berbagi pengalaman dan metode pengawasan integritas ASN dan mengharapkan potensi kerja sama di masa depan.

## **20. Temasek Foundation Asia Leaders Connect 2022 di Kota Singapura, Republik Singapura pada 29 September-2 Oktober 2022**

Temasek Foundation merupakan perusahaan investasi milik pemerintah Singapura namun tidak diatur langsung oleh pemerintah. Temasek Foundation berperan dalam membangun jaringan antara pemimpin dari negara-negara wilayah Asia melalui platform tahunan yang memfasilitasi diskusi terkait sektor publik di Asia. The Asia Leaders Connect merupakan salah satu forum tahunan terkait kepemimpinan yang mempertemukan pemimpin-pemimpin di Asia untuk mendiskusikan masalah dan tantangan yang berdampak pada pemerintahan dan kepemimpinan di Asia. Kegiatan ini



telah menjadi agenda tahunan sejak 2013 dan menghadirkan pemimpin-pemimpin alumni, pemimpin dari program sebelumnya, dan pemimpin hubungan strategis lainnya.



Gambar 3.15. Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Kegiatan Temasek Foundation Asia Leaders Connect 2022  
Singapura, 29 September-2 Oktober 2022

Temasek Foundation Asia Leaders Connect 2022 dilaksanakan pada tanggal 29 September-2 Oktober 2022 di Singapura dengan tema Emerging Trends Impacting Asia, dan diikuti oleh Ketua KASN, Agus Pramusinto. Pada kegiatan ini, peserta pertemuan mendiskusikan terkait tantangan kerja sama antara sektor pemerintah dan swasta yang tidak mudah dilakukan, kolaborasi antar kementerian yang membutuhkan terlalu banyak pertemuan, risiko proyek dan finansial dalam kerja sama, penentuan pengambil keputusan.

## **21. 2022 Korea Research Institute Special Workshop di Kota Hanoi, Republik Sosialis Vietnam pada 23-26 November 2022**

Korea sudah dikenal sebagai negara yang berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ASEAN melalui investasi skala besar dan kebijakan

pertukaran ekonomi melalui kegiatan berbagi pengetahuan dan praktik baik. Namun adanya Pandemi Covid-19 menghambat hubungan sosio kultural melalui pertukaran SDM antara Korea dan negara ASEAN sebagai mitra kerjanya. Sehingga untuk mendiskusikan terkait kontribusi yang dapat diberikan oleh Korea terhadap pertumbuhan bersama negara Korea Selatan dan negara-negara ASEAN, maka dilaksanakan forum independen government-academic engagement yang memfasilitasi keterlibatan pembuat kebijakan pemerintah, peneliti, dan akademisi.



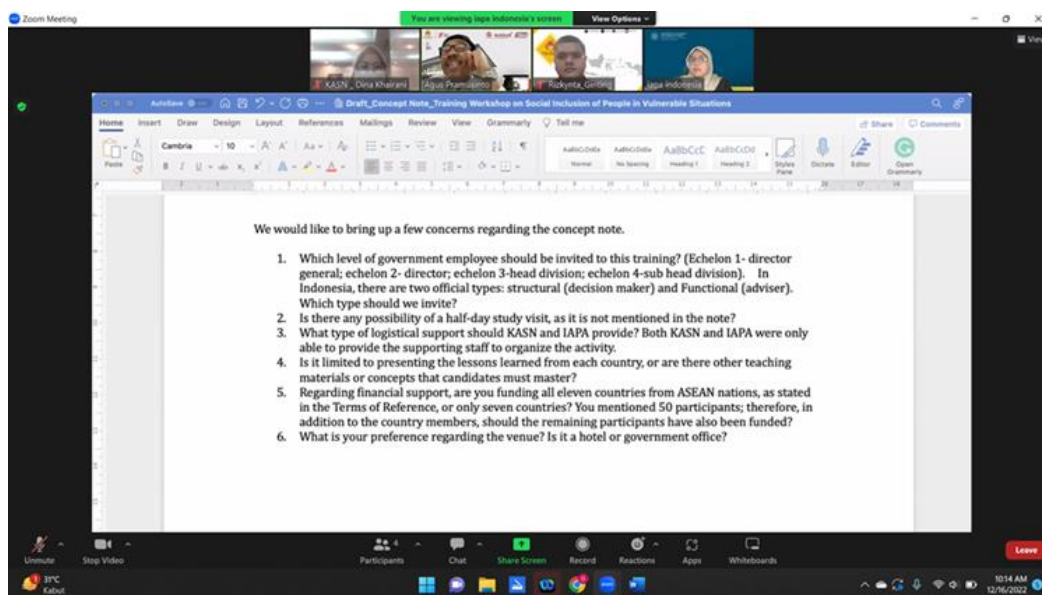
Gambar 3.16. Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Kegiatan 2022 Korea Research Institute Special Workshop "Sharing Knowledge and Experiences in Policy Implementation for National Development between Korea-ASEAN Countries in the Post COVID-19 Era" Vietnam, 23-26 November 2022

Workshop ini dilaksanakan oleh Korea Research Initiatives at The University of New South Wales, Australia di Kota Hanoi, Republik Sosialis Vietnam dengan tema "Sharing Knowledge and Experiences in Policy Implementation for National Development between Korea-ASEAN Countries in the Post COVID-19 Era" pada 23-26 November 2022 dan berfokus pada pembahasan perkembangan ekonomi, industrial, dan reformasi

sektor pemerintah dan dihadiri oleh Korea dengan 8 negara ASEAN. Pada kegiatan ini, partisipan dapat mendiskusikan terkait isu perkembangan kebijakan dalam menghadapi kondisi pasca Covid-19 dan saling mengambil pelajaran terkait praktik pengelolaan sumber daya aparatur.

## 22. Rencana Kegiatan Co-organizing a Multi-Country Training Workshop on Government Innovation for Social Inclusion of People in Vulnerable Situations in the Southeast Asian Region

Pada tanggal 16 Desember 2022, Subbagian Kerja Sama menerima arahan untuk mengikuti pertemuan dengan PROSPERA terkait rencana kolaborasi dan kerja sama dalam Co-organizing a Multi-Country Training Workshop on Government Innovation for Social Inclusion of People in Vulnerable Situations in the Southeast Asian Region yang akan dilaksanakan sebagai United Nations Project Office on Governance (UNPOG) bersama Division for Public Institutions and Digital Government (DPIDG), United Nations Department of Economics and Social Affairs (UN DESA) pada 2023 mendatang.



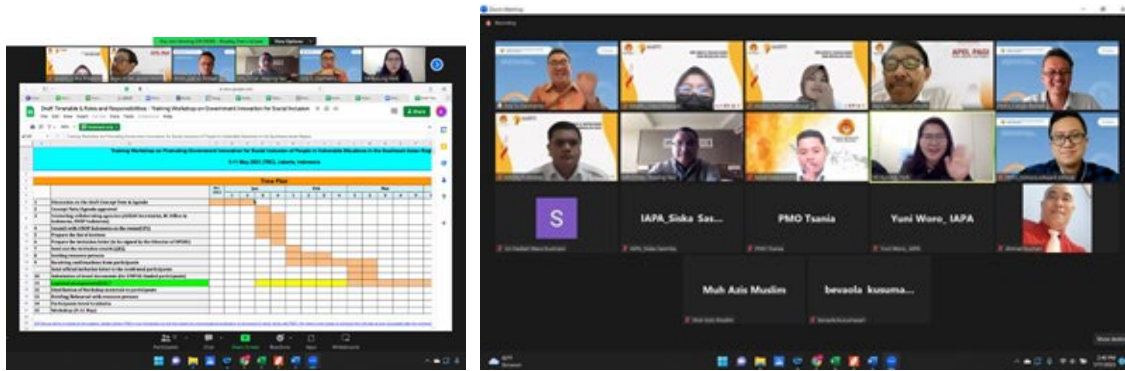
Gambar 3.17. Rapat Penyampaian Tanggapan dan Pertanyaan terkait Rencana Co-organizing a Multi-Country Training Workshop on Government Innovation for Social Inclusion of People in Vulnerable Situations in the Southeast Asian Region Jakarta (dalam jaringan), 16 Desember 2022

Dengan adanya rencana pelibatan KASN dalam kegiatan “Training Workshop on Promoting Government Innovation for Social Inclusion of People in Vulnerable Situation in

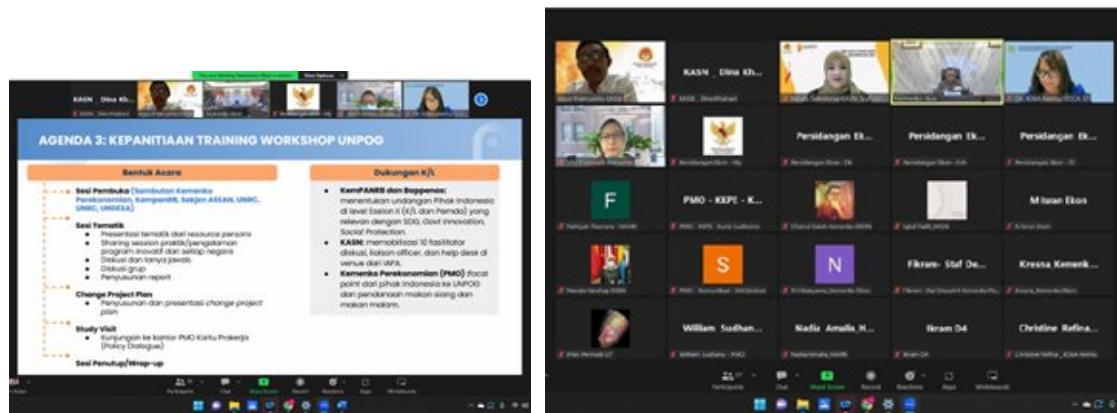
the Southeast Asian Region” yang akan dilaksanakan oleh Project Management Office Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan United Nations Project Office on Governance (UNPOG) pada 9-11 Mei 2023, maka telah dilaksanakan beberapa pertemuan pembahasan persiapan kegiatan tersebut di antaranya pertemuan antara Ketua KASN dengan Tim Prakerja Kemenko Perekonomian dengan pembahasan dukungan terhadap kegiatan bersama UNDP berupa pemberian usulan terkait peserta kegiatan; pembahasan Social Inclusion Training Workshop Coordination UNPOGxPMOxKASN yang berencana melaksanakan kegiatan pertemuan mingguan; Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan “Training Workshop on Promoting Government Innovation for Social Inclusion of People in Vulnerable Situation in the Southeast Asian Region” yang mengangkat isu cakupan social inclusion pada workshop, waktu kegiatan yang harus mempertimbangkan kegiatan KTT ASEAN, dan instansi serta level pejabat yang akan diundang dari Indonesia.



Gambar 3.18. Kepala Sekretariat KASN, Nurhasni; Ketua KASN, Agus Pramusinto; Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari; Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani; dan Direktur Monitoring dan Evaluasi PMO Kartu Prakerja, Cahyo Prihadi (kiri ke kanan) dalam Pertemuan Ketua KASN dengan PMO Jakarta, 13 Januari 2023



Gambar 3.19. Rapat Rencana Kegiatan Social Inclusion Training Workshop Coordination UNPOGxPMOxKASN Jakarta (dalam jaringan), 17 Januari 2023



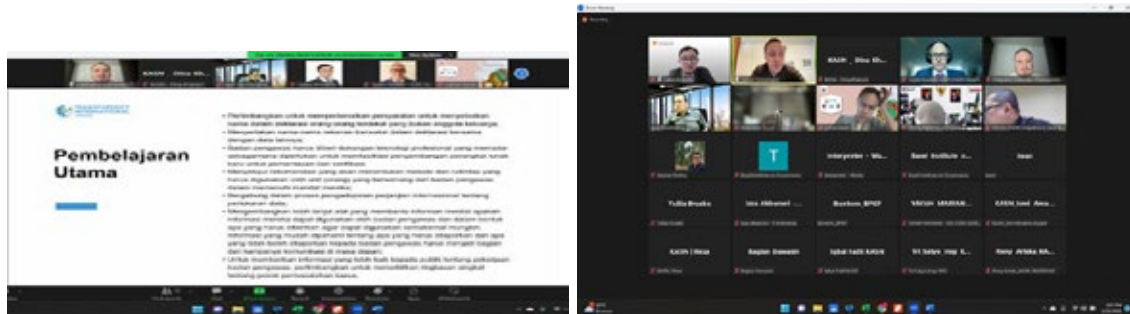
Gambar 3.20. Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan “Training Workshop on Promoting Government Innovation for Social Inclusion of People in Vulnerable Situations in the Southeast Asian Region” Jakarta (dalam jaringan), 19 Januari 2023

Meskipun telah dilaksanakan beberapa kali koordinasi, namun masih terdapat hal penting yang belum menemukan kesepakatan, sehingga pada 3 Mei 2023 KASN menerima informasi bahwa kegiatan akan diundur menjadi tahun depan dikarenakan beberapa hambatan teknis pada panitia pelaksana.

### 23. Sharing session Pengalaman Global Menggunakan LHKPN sebagai Sumber dalam Identifikasi Col secara daring pada 23 Februari 2023

Pada 15 Februari 2023, KASN menerima undangan dari Basel Institute on Governance yang bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID) untuk menghadiri Sharing session Pengalaman Global Menggunakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai

Sumber dalam Identifikasi Konflik Kepentingan yang dilaksanakan pada 23 Februari. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Tim Pengawas Internal KASN.



Gambar 3.21. Sharing session Pengalaman Global Menggunakan LHKPN sebagai Sumber dalam Identifikasi Col Jakarta (dalam jaringan), 23 Februari 2023

Pertemuan ini menyimpulkan bahwa data LHKPN saat ini baru memuat harta kekayaan dan belum menampilkan profil pendapatan wajib lapor, selain itu pelaporan ini masih bersifat formalitas administratif kepegawaian sehingga belum dapat dijadikan sumber informasi untuk diverifikasi dan ditelusuri keabsahan dan kebenarannya. Serta untuk ke depannya direkomendasikan agar LHKPN dapat dimanfaatkan lebih maksimal untuk verifikasi kebenaran dan kewajaran kepemilikan harta tapi di sisi lain juga melindungi data pribadi dengan memperhatikan regulasi keterbukaan informasi publik.

#### 24. Meeting on Human Resource Management Improvement in the Asian Civil Service di Jepang pada 27 Februari-3 Maret 2023

Sebagaimana rencana sebelumnya, kegiatan Meeting on Human Resource Management Improvement in The Asian Civil Service oleh National Personnel Authority Jepang pada tahun 2023 dapat dilaksanakan secara langsung dan dihadiri oleh Anggota KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I, Rudiarto Sumarwono.





Gambar 3.22. Anggota KASN Pengawasan Bidang Pengisian JPT Wilayah I, Rudiarto Sumarwono dalam kegiatan Meeting on Human Resource Management Improvement in the Asian Civil Service Jepang, 28 Februari s.d. 2 Maret 2023

Tema pertemuan tahun 2023 adalah Development of the Systems towards Further Flexible Working and/or Digital Transformation sebagai lanjutan pembahasan tahun sebelumnya terkait perubahan sistem kerja pemerintah pasca covid-19. Pada pertemuan ini, Anggota KASN memaparkan materi tentang Digital Transformation in Indonesia Bureaucracy as Part of Comprehensive e-Government Policy and Implementation of Flexible Working Arrangement in Bappenas yang mengemukakan integrated digital workspace yang berfokus pada fleksibilitas kerja yang memanfaatkan teknologi informatika, penguatan produktivitas secara kelembagaan maupun individual secara akuntabel dan sistematis, dan penguatan kapasitas perencanaan melalui penguatan kerja sama para perencana dan kualitas produk perencanaan.

## **25. Studi banding oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara di Korea Selatan pada 15-16 Maret 2023 dan di Jepang pada 17 Maret 2023**

Dalam rangka penguatan penerapan sistem merit, Kementerian Luar Negeri menginisiasi pelaksanaan studi tiru dengan instansi pemerintah asing yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan ASN maupun lembaga think tank di Korea dan Jepang. Dalam agenda ini, Kemenlu dan KASN mengunjungi National Human Resource Development Institute, Republic of Korea (NHI RoK) dan Human Resources, Laws, and

Regulation Division, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea (HRLRD MoFA RoK) di Korea Selatan pada 15-16 Maret 2023 dan Japan National Personnel Authority (JNPA) dan Division for Human Resources, Ministry of Foreign Affairs of Japan (DHR MoFAJ) di Jepang pada 17 Maret 2023.

Pertemuan ini ditujukan untuk mendapatkan aspirasi dan kesepahaman terkait pola kerja dan kebutuhan pengembangan pegawai dan mengetahui kondisi riil terkait implementasi dan pemahaman sistem merit di Kementerian Luar Negeri terutama di Kantor Perwakilan RI, dan memahami praktik baik penerapan sistem merit dalam manajemen SDM Jepang dan Korea sebagai upaya peningkatan kualitas penerapan sistem merit Kemenlu.



Gambar 3.23. Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Iwan Agustiawan Fuad; dan Staf KASN, Farah Muthi dalam Studi Banding dengan National Human Resource Development Institute, Republic of Korea (NHI RoK) Korea Selatan, 15 Maret 2023

National Human Resource Development Institute Republic of Korea merupakan lembaga di bawah Ministry of Personnel Management Korea Selatan yang diberikan mandat terkait pengembangan kompetensi ASN Korea dan negara mitra. Lembaga ini menyediakan 2 jenis program pelatihan yaitu berdasarkan level jabatan dan berdasarkan kategori tematik. Adapun pelatihan untuk negara mitra dapat dilakukan dalam 2 program yaitu customized program berdasarkan permintaan negara dan sponsored program yang berdasarkan hasil survey Korea International Cooperation Agency (KOICA).





Gambar 3.24. Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Iwan Agustiawan Fuad; dan Staf KASN, Farah Muthi dalam Studi Banding dengan Human Resources, Laws, and Regulation Division, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea (HRLRD MoFA RoK) Korea Selatan, 16 Maret 2023

Pada pertemuan dengan Human Resource, Laws, and Regulations, Ministry of Foreign Affairs Republic Korea, peserta pertemuan membahas terkait aturan khusus tentang diplomat yang mengatur kualifikasi, rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, jenis pekerjaan, remunerasi, status, serta tugas dan tanggung jawab diplomat; 2 kategori pegawai MoFA RoK yaitu foreign service officials, yang melaksanakan tugas dan fungsi diplomat dan state public officials, yang melaksanakan tugas dan fungsi dukungan administrasi; rekrutmen; sistem kelas jabatan; promosi dan mutasi; dan pemberian penghargaan terhadap pegawai.



Gambar 3.25. Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Iwan Agustiawan Fuad; dan Staf KASN, Farah Muthi dalam Pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo Jepang, 17 Maret 2023

Pada pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, KASN mendorong penerapan manajemen talenta untuk kepastian alur dan pengembangan karir pegawai yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, Duta Besar RI untuk Jepang

menyampaikan harapan kepastian alur karir dan lowongan jabatan bagi pegawai yang telah selesai menyelesaikan tugas di Perwakilan RI serta merekomendasikan efektivitas dan efisiensi penggunaan aplikasi bagi pegawai yang saat ini harus mengisi 23 aplikasi kinerja dan keuangan.



Gambar 3.26. Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Iwan Agustiawan Fuad; dan Staf KASN, Farah Muthi dalam Studi Banding dengan Japan National Personnel Authority (JNPA) dan Division for Human Resources, Ministry of Foreign Affairs of Japan (DHR MoFAJ) Jepang, 17 Maret 2023

Pada pertemuan dengan Japan National Personnel Authority (JNPA) dan Division for Human Resources, Ministry of Foreign Affairs of Japan (DRH MoFAJ), terdapat bahasan terkait kebijakan manajemen ASN; rekrutmen pegawai ASN Pemerintah Jepang baik untuk penempatan pelayanan komprehensif, pelayanan umum, ahli/spesialis, maupun tes untuk profesional yang telah berpengalaman di sektor swasta/BUMN; inklusivitas dengan membuka lowongan untuk disabilitas; pola karir; promosi, mutasi, rotasi; penilaian kinerja; uji kompetensi; pertukaran pegawai; pelatihan dan pengembangan pegawai; serta pemberian insentif kinerja.

## **26. Pelatihan Executive Development Program Batch 1 Tahap Kedua di Singapura pada 30 April-5 Mei 2023**

Berdasarkan kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan The Nanyang Centre for Public Administration (NCPA) di Nanyang Technological University (NTU) dan Temasek Foundation Singapura telah dilaksanakan the Executive Development Program Batch 1 tahap pertama secara daring selama 7 hari dari 24 Mei-1 Juni 2021. Sebagai kelanjutan dari program tersebut, maka dilaksanakan Pelatihan EDP Batch 1 tahap kedua secara langsung di Singapura dan diikuti oleh Ketua KASN, Agus Pramusinto sebagai salah satu peserta.



Gambar 3.27. Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam Pelatihan Executive Development Program Batch 1 Tahap Kedua Singapura, 1-4 Maret 2023

Pelatihan ini menekankan pada sisi praktis dan aspek penerapannya didasarkan pada keberhasilan Singapura dalam menjalankan administrasi publik. Adapun program pelatihan ditujukan bagi pejabat senior dari Indonesia dan difokuskan pada tema administrasi publik, pembangunan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.

Dari pertemuan ini disadari pentingnya pemerintah berkolaborasi dan memiliki kemampuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan teknis dan peningkatan pengetahuan dasar untuk secara bersama memberikan solusi menuju smart nation. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat saling menolong dalam menyelesaikan beberapa situasi darurat tanpa harus bergantung kepada pemerintah. Selain itu, perlu perubahan cara pikir pengambil keputusan pemerintah untuk tidak harus membuat regulasi sempurna sebelum menjalankan suatu program pemerintah.

## 27. Pelatihan Executive Development Program Batch II di Singapura pada 4-9 Juni 2024

Pada Juni 2024, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan The Nanyang Center for Public Administration, Nanyang Technological University dan Temasek Foundation kembali melaksanakan Pelatihan Executive Development Program Batch II secara langsung di Singapura sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan pelatihan yang secara daring pada 17-25 Januari 2022 lalu.



Gambar 3.28. Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani; Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I, John Ferianto dalam Pelatihan Executive Development Program (EDP) Batch II Singapura, 5-8 Juni 2023

Sama seperti pada pelatihan EDP Batch I, pada pelatihan ini, Pemerintah Singapura berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang keberhasilannya dalam menjalankan administrasi publik kepada pejabat senior Indonesia, dalam hal ini KASN diwakili oleh Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani dan Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I, John Ferianto.

Pada pertemuan ini, KASN menyadari pentingnya pembangunan leadership talent yang kontekstual seperti pengalaman Singapura yang awalnya membangun talenta

untuk disiapkan menjadi pemimpin dengan berorientasi pada penerapan di Eropa dan Amerika menjadi orientasi Asia yang dapat diaplikasikan secara lebih kontekstual. Hal ini didapatkan melalui pertukaran pegawai untuk belajar ke negara-negara Asia. Selanjutnya, terkait smart nation, Singapura menyadari pentingnya membangun kreativitas dan tidak berhenti berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kunci keberhasilan pembentukan smart nation adalah dengan membangun ekosistem yang kolaboratif, memberdayakan, dan membangun kerja sama dan kolaborasi yang baik dengan masyarakat. Pembelajaran lainnya adalah terkait pengaruh perilaku ekonomi terhadap penyusunan kebijakan publik yang menunjukkan bahwa kebijakan didasarkan atas bukti kondisi di lapangan yang setelah disahkan selanjutnya kembali disosialisasikan sehingga pembuat kebijakan dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama.

#### **28. 2023 International Summer Conference di Korea Selatan pada 20-24 Juni 2023**

Dalam rangka memberikan platform yang dinamis untuk saling berbagi ide yang inovatif, temuan dari penelitian, dan praktik baik dalam bidang administrasi publik, Korean Association for Public Administration (KAPA) mengadakan konferensi pada 22-24 Juni 2023 untuk akademisi, peneliti, pembuat kebijakan publik, praktisi, dan mahasiswa dengan tema Building Resilience in the Post-Pandemic Era: Collaborative Governance across the Levels of Government.





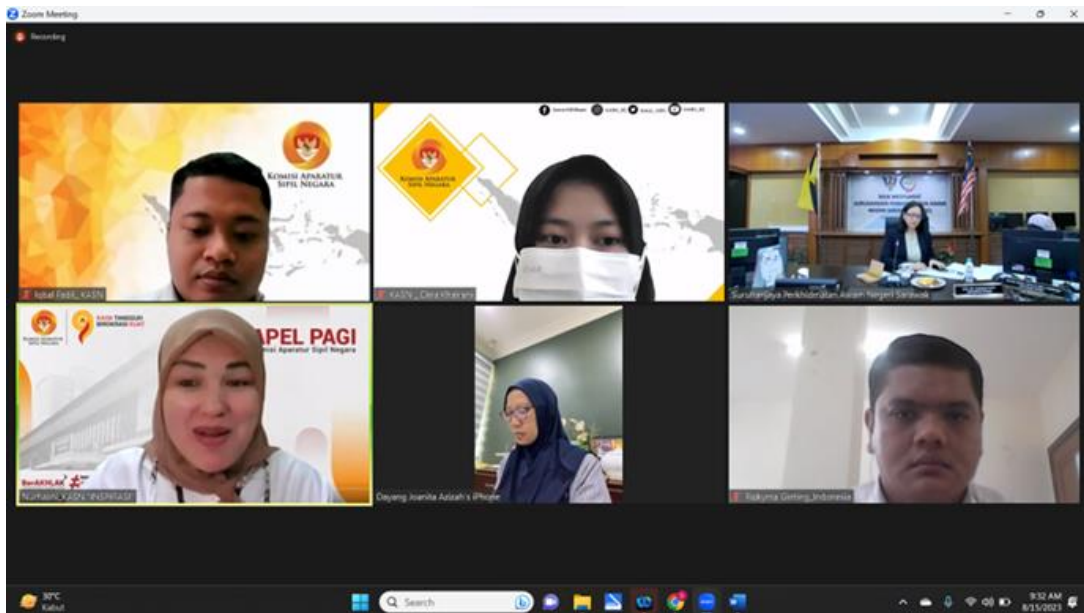
Gambar 3.29. Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam kegiatan 2023 International Summer Conference Korea Selatan, 20-24 Juni 2023

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KASN sekaligus mewakili Indonesian Association for Public Administration (IAPA) sebagai 100 orang pakar di bidang Administrasi Publik. Peserta konferensi terdiri dari 30 peserta Korea Selatan dan 70 peserta dari luar Korea Selatan seperti Taiwan, Prancis, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, Amerika Serikat, Kazakhstan, Kanada, Jepang, dan Cina. Berdasarkan pertemuan ini diketahui perbedaan dampak Pandemi Covid 19 terhadap negara dan pemerintahan, pada beberapa negara pandemi menjadi tantangan untuk perbaikan birokrasi dan kehidupan sosial lainnya, sedangkan bagi beberapa negara lainnya, pandemi yang terjadi justru menyebabkan tidak adanya peningkatan kualitas bagi birokrasi dan kehidupan sosial atau bahkan menjadikannya lebih buruk.

Pada akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding antara KAPA dan IAPA dengan harapan untuk dapat melaksanakan kegiatan bersama seperti pembelajaran, penelitian, publikasi, serta pertukaran gagasan antar kampus maupun antar instansi di Indonesia dengan Korea ataupun dengan negara peserta lainnya.

## 29. Rencana kunjungan Public Service Commission Sarawak-Malaysia ke KASN

Pada 15 Februari 2023 telah diterima permohonan kunjungan Public Service Commission Sarawak ke kantor Komisi Aparatur Sipil Negara. Kunjungan tidak hanya akan dilakukan ke KASN namun juga beberapa instansi lainnya. Berdasarkan informasi tersebut, telah dilakukan koordinasi dengan penanggung jawab kerja sama luar negeri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Lembaga Administrasi Negara. Setelah dilakukan koordinasi baik melalui surat elektronik maupun media lainnya, pada 15 Agustus 2023 dilaksanakan Meeting of Indonesian Civil Service Commission and Public Service Commission of Sarawak-Malaysia yang membahas terkait pengunduran kunjungan PSC Sarawak ke KASN sampai awal tahun 2024.



Gambar 3.30. Kegiatan Meeting of Indonesian Civil Service Commission and Public Service Commission of Sarawak-Malaysia Jakarta (dalam jaringan), 15 Agustus 2023

Pada tanggal 17 Oktober 2023, perwakilan PSC Sarawak kembali menghubungi KASN untuk melaksanakan koordinasi, namun mengingat adanya isu pembubaran KASN, maka kemungkinan rencana kunjungan ke kantor KASN tidak jadi dilaksanakan. Sebagai lanjutan koordinasi rencana kunjungan tim Public Service Commission Sarawak, Malaysia, pada 19 Maret 2024, KASN mendapatkan informasi bahwa kunjungan akan dilakukan ke kantor Kementerian PANRB dan Kantor Regional V Badan Kepegawaian

Negara. Sedangkan dikarenakan rencana kunjungan ke KASN tidak dilanjutkan, maka komunikasi dan koordinasi selanjutnya diserahkan kepada penanggung jawab dari Kementerian PANRB.

### **30. Studi banding Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara di Australia dan Selandia Baru pada 3 s.d 9 September 2023**

Sebagai kelanjutan rangkaian kegiatan pengenalan sekaligus studi banding implementasi pengembangan penerapan sistem merit di lingkungan kerja Kementerian Luar Negeri khususnya di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, maka Kelompok Kerja KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I yang terdiri dari Anggota, Asisten, dan satu orang staf melakukan kunjungan ke Australia dan Selandia Baru pada 3-9 September 2023 ke Australian Public Service Commission di Australia dan New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade serta The Public Service Commission of New Zealand di Selandia Baru.



Gambar 3.31. Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Iwan Agustiawan Fuad; dan Staf KASN, Farah Muthi dalam Pertemuan Delegasi dalam Kegiatan Diskusi Terpumpun Penerapan Sistem Merit Bersama Seluruh ASN di Kawasan Australia dan Selandia Baru secara Hybrid KJRI Sydney Australia, 5 September 2023

Kegiatan diskusi terpumpun terkait penerapan sistem merit bagi ASN di kawasan Australia dan Selandia Baru difasilitasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney dan diikuti oleh ASN di KJRI Sydney, Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Sydney, Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) Sydney secara langsung serta diikuti ASN lainnya secara daring. Pada pertemuan ini KASN menegaskan bahwa sistem



merit menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja, perlunya dilakukan penataan dan regenerasi mengingat kelompok usia 51-60 masih mendominasi PNS, serta pentingnya memanfaatkan manajemen talenta di Kemenlu. Selanjutnya, akan dilakukan diskusi internal terkait manajemen SDM di antaranya terkait skala penggajian pegawai, pengisian jabatan perwakilan, dan perbaikan aspek kesejahteraan pegawai.



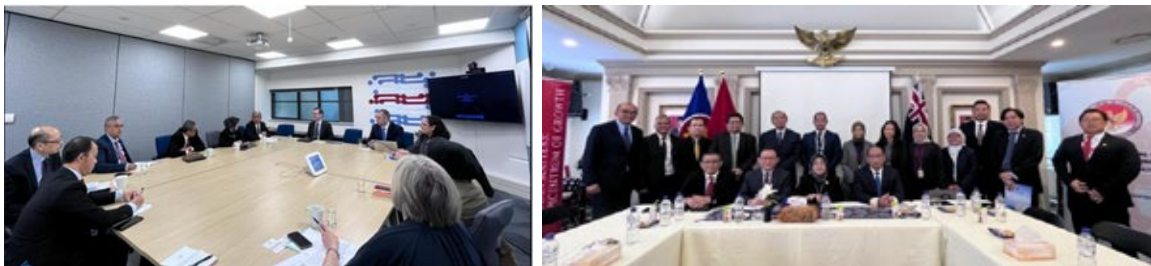
Gambar 3.32. Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Iwan Agustiawan Fuad; dan Staf KASN, Farah Muthi dalam Pertemuan Delegasi dalam Kegiatan Studi Banding dengan Australian Public Service Commission dan Merit Protection Commissioner Australia, 5 September 2023

Pada pertemuan dengan Australian Public Service Commission terdapat bahasan tentang prioritas strategi APSC dalam menunjang kualitas manajemen pegawai, membangun kepemimpinan, meningkatkan kapabilitas layanan dan kepercayaan publik melalui integritas; rekrutmen pegawai dari berbagai sektor; formulasi kebijakan penerapan sistem merit untuk pusat maupun negara bagian; agenda reformasi APSC tentang penegakan integritas, pegawai teladan, menjadikan SDM dan tugas nya sebagai acuan dalam kebijakan dan pelayanan, dan peningkatan kapabilitas; penerapan manajemen talenta untuk menempati pimpinan dan peran kritikal lainnya; penentuan kelas jabatan dan klasifikasi ASN penuh waktu, paruh waktu, dan pegawai tetap. Adapun bahasan bersama Merit Protection Commissioner diantaranya mengenai tugas terkait rekrutmen, promosi, penanganan aduan pelanggaran kode etik; peran dalam pengisian JPT dengan membentuk Promotion Review Committee (PRC); dan aspek yang ditinjau dalam promosi pegawai.



Gambar 3.33. Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Iwan Agustiawan Fuad; dan Staf KASN, Farah Muthi dalam Pertemuan Delegasi dalam Kegiatan Studi Banding dengan Ministry of Foreign Affairs and Trade of New Zealand Selandia Baru, 7 September 2023

Pada pertemuan dengan Ministry of Foreign Affairs and Trade Selandia Baru, terdapat pembahasan mengenai tantangan kesejahteraan pegawai dan fleksibilitas bekerja yang dihadapi setelah pandemi. Beberapa strategi untuk menciptakan komunitas yang bahagia, sehat, dan berkinerja tinggi diantaranya penyediaan fasilitas in-house counseling dan pelayanan psikolog serta akses vaksin. Selain itu, juga dibahas terkait rencana pemanfaatan sistem SDM terintegrasi, struktur organisasi, bentuk pelatihan baik pelatihan dasar maupun bagi pimpinan, jenis jabatan spesialis dengan keahlian di bidang ekonomi dan hukum, rekrutmen, dan perjanjian kinerja pegawai.



Gambar 3.34. Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Iwan Agustiawan Fuad; dan Staf KASN, Farah Muthi dalam Kegiatan Studi Banding dengan Public Service Commission New Zealand Selandia Baru, 7 September 2023

Pada pertemuan dengan Public Service Commission of New Zealand dibahas terkait kewenangan Komisioner dalam menetapkan standar perilaku dan integritas, penanganan pelanggaran kode perilaku, perlindungan pegawai dari intervensi politik, penetapan ekspektasi kinerja; rekrutmen; dan manajemen talenta melalui asesmen mandiri, penilaian kinerja 360 derajat, dan wawancara talenta.

### **31. Kunjungan kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Aparatur Sipil Negara ke Tokyo, Jepang pada 13 s.d. 17 September 2023**

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kementerian PANRB Nomor B/503.1/S.SM.04.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 hal Penyampaian Rencana Kunjungan Kerja ke Jepang Dalam Rangka Uji Publik Rancangan Undang-undang tentang ASN, maka Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto mengikuti kegiatan perjalanan dinas luar negeri dalam rangka uji publik Rancangan Undang-Undang tentang ASN di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Tokyo, Jepang dan studi banding di National Personnel Authority, Government of Japan.



Gambar 3.35. Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto dalam kegiatan Uji Publik Rancangan Undang-Undang tentang ASN Jepang, 13-17 September 2023

Kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia memiliki agenda Uji Publik Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang dihadiri juga oleh perwakilan dan diaspora serta pelajar Indonesia di Jepang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan terkait draf revisi undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Adapun agenda studi tiru ke National Personnel Authority membahas topik Human Resources Practices in Japan baik tentang rekrutmen, budaya organisasi, manajemen kinerja, hak pegawai, pendidikan dan pelatihan, dan manajemen talenta.

### **32. Diskusi Strategis Masa Depan Meritokrasi Pemerintahan Indonesia pasca Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara**

Dalam rangka menanggapi dinamika penyusunan rancangan Revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara serta untuk memberikan saran kebijakan bagi penguatan meritokrasi pada birokrasi pemerintahan, KASN dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama membuat kajian tentang Masa Depan Meritokrasi Pemerintah Indonesia pasca Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan Ketua KASN Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Diskusi Strategis Masa Depan Meritokrasi Pemerintahan Indonesia pasca Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.



Gambar 3.36. Policy Brief Penguatan Lembaga Pengawas Penerapan Sistem Merit dan Netralitas ASN pasca UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Policy Brief Permasalahan Masuknya Prajurit TNI dan Anggota Polri dalam Undang-Undang ASN

Kajian ini berfokus menyoroti beberapa hal yang dianggap kemunduran dalam penerapan sistem merit dalam birokrasi pemerintah terutama terkait isu pembubaran

KASN sebagai lembaga pemerintah pengawas ASN. Di antara kekhawatiran akademisi dan praktisi bidang pemerintahan adalah maraknya jual beli jabatan dalam pengisian JPT kembali akan meningkat, pengembalian manajemen ASN seperti Orde Lama dikarenakan pengisian JPT menengah dan tinggi dapat diisi oleh TNI dan POLRI, pengangkatan 3.6 juta tenaga honorer menjadi PPPK, kembalinya pembuatan arah kebijakan ke rezim otokratis, ancaman pelanggaran netralitas ASN yang tinggi dan banyak hal lainnya. Didasarkan pada latar belakang ini, telah dihasilkan dua *policy brief* yang memberikan masukan dan rekomendasi terkait bentuk kelembagaan lembaga pengawas ASN selanjutnya, pembentukan peraturan pemerintah sebelum peraturan presiden, rekomendasi untuk mempertahankan KASN sampai dengan berakhir tahapan Pemilu pada Oktober 2024, dan penguatan proses bisnis kolaborasi KASN dengan instansi terkait. Adapun *policy brief* kedua berfokus pada permasalahan dibukanya peluang alih status dan tugas TNI dan POLRI untuk masuk ke jabatan ASN selain beberapa lembaga pemerintah sudah diatur sebelumnya. Hal ini dikhawatirkan akan mengubah beberapa tatanan sistem merit pada lembaga pemerintah, selain itu kajian ini merekomendasikan pembuatan strategic defence review secara teratur dan objektif dalam lembaga TNI dan POLRI.

Policy Brief Penguatan Lembaga Pengawas Penerapan Sistem Merit dan Netralitas ASN pasca UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dapat diakses pada tautan [https://bit.ly/pb\\_PenguatanLembagaPengawas](https://bit.ly/pb_PenguatanLembagaPengawas) sedangkan Policy Brief Permasalahan Masuknya Prajurit TNI dan Anggota POLRI dalam Undang-Undang ASN dapat diakses pada tautan [https://bit.ly/pb\\_TNI-POLRImasukASN](https://bit.ly/pb_TNI-POLRImasukASN).

### **33. Pelatihan E-Government di Taipei, Republik Tiongkok (Taiwan) pada 5 s.d. 14 November 2023**

Melalui kerja sama antara Taipei Economic and Trade Office (TETO) dengan Indonesia Economic and Trade Office (IETO) tentang pengembangan sumber daya manusia di sektor publik, telah dilaksanakan pelatihan dengan tema e-government yang dilaksanakan oleh Kementerian Digital dan Direktorat Jenderal Personalia, Eksekutif Yuan Taiwan dan diikuti oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi KASN, Hendra Kusuma.



Gambar 3.37. Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi KASN, Hendra Kusuma dalam Pelatihan E-Government oleh Kementerian Digital dan Direktorat Jenderal Personalia, Eksekutif Yuan Taiwan Republik Tiongkok, 5-14 November 2023

Pada pelatihan ini dipahami bahwa Taiwan telah menerapkan e-government secara komprehensif dalam pelayanan publik. Bahkan kebijakan teknologi informatika diselaraskan dengan kebijakan nasional dan diterapkan melalui konsep kota pintar yang menjembatani kesenjangan digital di daerah pedesaan. Pemanfaatan TIK dan data juga terintegrasi dengan penyediaan transportasi publik dan hunian yang cerdas. Tidak hanya itu, pemerintah bahkan menyediakan hadiah bagi taat pajak serta memberikan kemudahan bagi perusahaan *fintech*.

### 34. Bimbingan teknis manajemen ASN, Sistem Merit, dan Pengisian Jabatan kepada Pejabat Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) di Tokyo, Jepang pada 19-23 Desember 2023

Dalam rangka memberikan materi dan bimbingan teknis terkait manajemen ASN, sistem merit dan pengisian jabatan sekaligus memberikan layanan bantuan hukum pada Pejabat Promosi Investasi dan Pembantu Pejabat Promosi Investasi di Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Tokyo, Ketua KASN, Agus Pramusinto dan Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan memenuhi undangan dari Kementerian Investasi/BKPM untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas luar negeri pada 19-23 Desember 2023.



Gambar 3.38. Ketua KASN, Agus Pramusinto dan Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian JPT Wilayah I, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan dalam Bimbingan Teknis Manajemen ASN, Sistem Merit, dan Pengisian Jabatan kepada Pejabat Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) Tokyo, Jepang

Jepang, 19-23 Desember 2023

Kegiatan ini berbentuk diseminasi legalitas dan keberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum yang dialami penanam modal dari Inggris; bimbingan teknis prosedur penyusunan perjanjian kerja sama antara IIPC dengan pihak ketiga; bimbingan teknis promosi dan diseminasi regulasi di bidang penanaman modal kepada IIPC Tokyo; serta konsolidasi program kerja tahun 2023.

### **35. Eksplorasi National Personnel Authority of Japan ke KASN pada 5 Maret 2024**

Pada 16 Februari 2024, KASN menerima surat rencana kunjungan National Personnel Authority of Japan terkait rencana kunjungan Director of International Affairs Division NPA, Ms. Maeda Satoko dan International Affairs Research Officer, Ms. Keiko Koshiishi pada 5 Maret 2024. Adapun kunjungan delegasi NPA ini membahas terkait core values ASN, manajemen talenta pada instansi pemerintah, dan pengembangan kompetensi.



Gambar 3.39. Plt. Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, Rizkynta J Ginting; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II, Agus Sudyanto; Anggota KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I, Rudiarto Sumarwono; Penerjemah pertemuan,; Ketua KASN, Agus Pramusinto; Director of International Affairs Division NPA, Ms. Maeda Satoko; International Affairs Research Officer, Ms. Keiko Koshiishi; dan Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Maria Ivonne Tarigan (kiri ke kanan) dalam Kunjungan National Personnel Authority of Japan Jakarta, 5 Maret 2024



Pada pertemuan ini, NPA menyampaikan tantangan intervensi politik terutama pada pemerintah daerah di Jepang dan sejauh ini mengharapkan SDM berkualitas dari akademisi atau lulusan universitas. KASN juga berbagi pengalaman terkait penanganan pelanggaran kode etik dan kode perilaku di Indonesia dan pembatasan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan menghadapi pesta demokrasi. Pada pertemuan ini KASN juga menjelaskan terkait kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural yang harus dimiliki oleh ASN Indonesia dan cara meningkatkannya. Selain itu, KASN juga menjelaskan terkait nilai dasar Ber-AKHLAK yang menjadi core value bersama ASN seluruh Indonesia yang dibuat untuk menguatkan budaya kerja dan meningkatkan kualitas kinerja sebagai pelayan publik sekaligus perekat dan pemersatu bangsa.

## **BAB IV**

### **HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI BENTUK JASA**

Bagian ini berisikan penjelasan penerimaan anggaran hibah langsung luar negeri bentuk jasa yang diterima Komisi Aparatur Sipil Negara dalam 10 tahun. Hibah langsung merupakan hibah yang diterima langsung oleh kementerian/lembaga, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Dalam 10 tahun, KASN menerima tawaran 2 (dua) hibah langsung dari luar negeri dalam bentuk jasa.

Pemanfaatan hibah langsung ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan KASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun bentuk pemanfaatan hibah KASN adalah melalui pelaksanaan kegiatan dan pembuatan sistem aplikasi elektronik untuk memudahkan proses bisnis KASN.

Hibah langsung luar negeri bentuk jasa yang diterima KASN dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Hibah United States Agency for International Development/USAID**

Berdasarkan Perjanjian Bantuan (Assistance Agreement) USAID Nomor 497-AA-030, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat United States Agency for International Development/USAID, Komisi Aparatur Sipil Negara tergabung dalam penerima hibah dengan Program USAID CEGAH yang dilaksanakan pada 31 Mei 2016-30 September 2020. Adapun total hibah USAID yang diterima oleh KASN adalah sebesar USD774.190,39 ekuivalen Rp11.109.093.387 (kurs sesuai waktu pelaporan pertahun).

Penerimaan hibah ini telah dilaporkan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam 3 periode penerimaan melalui pengesahan berita acara serah terima dengan rincian sebagai berikut:

##### **A. BAST 107/USAID-INA/BAST-Service/DRG**

BAST ini ditandatangani pada 31 Desember 2019 dan berisikan pertanggungjawaban penerimaan hibah pada periode 31 Mei 2016-31 Desember 2018 sejumlah USD553.588,39 ekuivalen Rp8.016.513.516,00 yang dialokasikan pada kegiatan:

- 1) Dukungan untuk KASN yang meliputi rekrutmen dan promosi PNS yang transparan dan berbasis merit di semua tingkatan sejumlah USD385.123,92 ekuivalen Rp5.576.979.503,00 melalui:
  - Membuat fitur tambahan untuk aplikasi JPT
  - Membuat buku panduan untuk staf KASN dalam memantau proses rekrutmen terkait
  - Meluncurkan sistem pemilihan terbuka JPT berbasis web (SIJAPTI)
  - Mengadakan pelatihan aplikasi SIJAPTI untuk 289 staf BKD
  - Mengembangkan kerjas kebijakan tentang sistem prestasi PNS
  - Mendukung proses advokasi undang-undang untuk koalisi
  - Melakukan seleksi pada 302 JPT
  - Penilaian pada aplikasi SIJAPTI, LAPOR KASN, dan SIPINTER yang akan diintegrasikan
- 2) Dukungan dalam pemantauan dan pencegahan radikalasi ASN sejumlah USD4.437,13 ekuivalen Rp64.254.039,00 melalui persiapan pembuatan modul untuk Pencegahan Ekstremisme (CVE) untuk KASN
- 3) Dukungan komunikasi publik untuk melawan dan mencegah korupsi sejumlah USD164.027,34 ekuivalen Rp2.375.279.973,00 melalui:
  - Penilaian dan rekomendasi tentang komunikasi dan penjangkauan KASN
  - Rencana komunikasi sebagai referensi pengiriman pesan ke semua kegiatan komunikasi KASN yang dikembangkan KASN. Adapun dokumen rencana komunikasi terdiri dari narasi utama, operasionalisasi yang diusulkan dari program komunikasi, panduan komunikasikrisis, dan informasi spesifik lainnya

#### B. BAST 140/USAID-INA/BAST-Service/DRG

BAST ini ditandatangani pada 14 Juli 2020 dan berisikan pertanggungjawaban penerimaan hibah pada periode 1 Januari-31 Desember 2019 sejumlah USD195.045 ekuivalen Rp2.711.320.545,00 yang dialokasikan pada kegiatan:

- 1) Dukungan untuk KASN yang meliputi rekrutmen dan promosi PNS yang transparan dan berbasis merit di semua tingkatan sejumlah USD110.839 ekuivalen Rp1.540.772.939,00 melalui:
  - Mengembangkan Dasbor Eksekutif untuk KASN yang mengintegrasikan 3 aplikasi KASN yaitu SIJAPTI, Lapor KASN, dan SIPINTER
  - Meningkatkan sepenuhnya sistem dalam Aplikasi LAPor KASN
  - Mengembangkan e-learning untuk KASN berupa platform pembelajaran online yang dirancang untuk melatih staf pemerintah daerah, panitia seleksi, atau Badan Kepegawaian Daerah tentang sistem prestasi dan seleksi JPT
- 2) Dukungan dalam pemantauan dan pencegahan radikalasi ASN sejumlah USD25.435 ekuivalen Rp353.571.935,00 melalui:
  - Mengembangkan Pedoman baru Seleksi JPT yang memasukkan perspektif penanggulangan ekstremisme berkekerasan
  - Mengembangkan modul pelatihan tentang Seleksi JPT
  - Melatih 10 anggota staf KASN untuk mendukung peluncuran pedoman baru di lingkungan provinsi, kabupaten, dan kota
  - Menyelenggarakan workshop tentang “Membangun Pemahaman dan Kesadaran Panitia Seleksi JPT dalam Mencegah Diskriminasi dan Intoleransi Agama” yang dihadiri 62 panitia seleksi dari Solo dan area sekitar Jawa Tengah
- 3) Bantuan teknis dan hibah untuk organisasi masyarakat sipil untuk mendukung kegiatan pencegahan, pemantauan, dan penelitian korupsi mereka, termasuk aspek gender dari kegiatan ini sejumlah USD58.771 ekuivalen Rp816.975.671,00 melalui:
  - Mengembangkan Manual untuk memantau pelanggaran kode etik ASN selama masa Pemilihan Presiden dan penggunaan SP4N-LAPOR! Dan Lapor KASN sebagai alat menyampaikan aduan
  - Menyelenggarakan workshop pemantauan netralitas ASN selama masa Pemilu di Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung dengan total 104 peserta dari OMS dan relawan mahasiswa

- Menyelenggarakan konferensi pers bersama di Kantor KASN untuk mengumumkan dugaan pelanggaran yang telah terdeteksi sebelum hari pemilihan
- Menyelenggarakan seminar tentang “Refleksi Pemilu 2019: Netralitas ASN dan Kualitas Prosedural Demokrasi” di Kantor Bawaslu, untuk membagikan temuan dan rekomendasi PATTIRO untuk reformasi di masa depan

### C. BAST 241/USAID-INA/BAST-Service/DRG

BAST ini ditandatangani pada 25 November 2020 dan berisikan pertanggungjawaban penerimaan hibah pada periode 1 Januari-30 September 2020 sejumlah USD25.557 ekuivalen Rp381.259.326,00 yang dialokasikan pada kegiatan dukungan untuk KASN yang meliputi rekrutmen dan promosi PNS yang transparan dan berbasis merit di semua tingkatan sejumlah USD25.557 ekuivalen Rp381.259.326,00 melalui:

- Pengembangan Dasbor Eksekutif untuk KASN yang mengintegrasikan aplikasi KASN yaitu SIJAPTI, Laporan KASN, dan SIPINTER
- Meningkatkan sepenuhnya sistem dalam aplikasi Laporan KASN
- Melakukan *maintenance* untuk eLearning KASN selama 6 bulan



Gambar 4.1. Exit Meeting Program USAID CEGAH Jakarta (dalam jaringan), 6 Agustus 2021

Dengan berakhirnya masa penerimaan hibah USAID dengan Program CEGAH, pada Jumat, 6 Agustus 2021, dilaksanakan Exit Meeting dengan USAID CEGAH melalui jaringan dan dihadiri oleh tim USAID Cegah, tim teknis KASN, dan tim Sekretariat KASN.

## **2. Hibah Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA)**

Berdasarkan Subsidiary Arrangement between The Government of Australia and The Government of Indonesia relating to the Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA) Nomor SA.04.12.2017 yang ditandatangani pada 4 Desember 2017, oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia dan Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komisi Aparatur Sipil Negara akan menerima hibah dari Department of Foreign Affairs and Trade, Government of Australia pada Maret 2018-Februari 2023 dengan anggaran awal AUD1.590.963. Adapun total hibah PROSPERA yang diterima oleh KASN adalah sebesar AUD244.523,61 ekuivalen Rp2,458.213.436,05 (kurs sesuai waktu pelaporan pertahun).

Penerimaan hibah ini telah dilaporkan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam 5 periode penerimaan melalui pengesahan berita acara serah terima dengan rincian sebagai berikut:

### **A. BAST 02/Hibah.DFAT/KASN/XII/2019**

BAST ini ditandatangani pada 31 Desember 2019 dan berisikan pertanggungjawaban penerimaan hibah pada periode Maret-Desember 2018 sejumlah AUD121.774,98 ekuivalen Rp1.187.772.453,17 yang dialokasikan pada kegiatan:

- 1) Workshop Getting the Selection Right di Jakarta dan Bali yang dilaksanakan pada 5-13 Maret 2018;
- 2) Kunjungan Komisioner APSC ke Jakarta pada 11-14 Maret 2018;
- 3) Dialog Strategis: Integritas dan Transparansi di Canberra yang dilaksanakan pada 16-20 April 2018;
- 4) Kunjungan APSC ke Jakarta yang dilaksanakan pada 21-24 Mei 2018;
- 5) Pelatihan Manajemen Kepemimpinan dan SDM di Jakarta yang dilaksanakan pada 16-19 Juli 2018;
- 6) Pelatihan Kode Perilaku di Solo dan Bali yang dilaksanakan pada 31 Juli-2 Agustus 2018 dan 6-8 Agustus 2018;

- 7) Workshop Getting the Selection Right di Semarang yang dilaksanakan pada 24-27 September 2018;
- 8) Kunjungan APSC ke Jakarta pada 3-12 Oktober 2018; dan
- 9) Workshop Getting the Selection Right di Bintaro, Tangerang Selatan yang dilaksanakan pada 12-15 November 2018.

B. BAST 07/Hibah.DFAT/KASN/XII/2020

BAST ini ditandatangani pada 18 Desember 2020 dan berisikan pertanggungjawaban penerimaan hibah pada periode Januari-Desember 2019 sejumlah AUD40.351,27 ekuivalen Rp418.793.725,95 yang dialokasikan pada kegiatan:

- 1) Pertukaran pegawai eksekutif tentang manajemen talenta di Canberra yang dilaksanakan pada 18 Februari-1 Maret 2019;
- 2) Rapat meja bundar: Manajemen talenta nasional dan Reformasi sektor pemerintah yang dilaksanakan pada 26 Februari 2019;
- 3) Rapat meja bundar: Sektor publik dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan pada 26 November 2019;
- 4) Diskusi kelompok terpumpun Australia dan Indonesia: Mobilitas Perempuan pada Sektor Pemerintah yang dilaksanakan pada 27 November 2019;
- 5) Dialog Indonesia-Australia: Memperkenalkan Kepemimpinan Perempuan yang dilaksanakan pada ASN pada 28 November 2019;
- 6) Kunjungan APSC ke Kementerian PANRB, KASN, LAN, dan BKN pada 24 Januari 2019;
- 7) Kunjungan Komisioner APSC pada rapat meja bundar dan pertemuan lain pada 24-27 Februari 2019;
- 8) Kunjungan APSC ke Kementerian PANRB, KASN, LAN, dan BKN pada 13-14 Maret 2018;
- 9) Kunjungan APSC untuk memperkenalkan anggota tim baru pada 23-26 April 2019;
- 10) Kunjungan APSC ke Kementerian PANRB, KASN, LAN, dan BKN pada 21-24 Mei 2018;

- 11) Kunjungan APSC untuk rapat program prioritas 2019-2020 pada 29 Juli-2 Agustus 2019; dan
- 12) Kunjungan Komisioner APSC pada 25-28 November 2019.

C. BAST 01/Hibah.DFAT/KASN/XII/2021

BAST ini ditandatangani pada 15 Desember 2021 dan berisikan pertanggungjawaban penerimaan hibah pada periode Januari-Desember 2020 sejumlah AUD22.178,05 ekuivalen Rp228.467.958,31 yang dialokasikan pada kegiatan:

- 1) Pertemuan pra-diskusi APSC dan instansi pengelola manajemen ASN Indonesia yang dilaksanakan pada 20 Oktober 2020;
- 2) Pertemuan Pimpinan Senior APSC dengan Kementerian PANRB, BKN, LAN, dan KASN; dan
- 3) Pertemuan tindak lanjut terhadap Key Priorities and Activities yang dilaksanakan pada 2 Desember 2020.

D. BAST BA/02/KU.00.01/12/2022

BAST ini ditandatangani pada 30 Desember 2022 dan berisikan pertanggungjawaban penerimaan hibah pada periode Januari-Desember 2021 sejumlah AUD22.406,75 ekuivalen Rp237.078.651,59 yang dialokasikan pada kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Program Perempuan dalam Kepemimpinan.

E. BAST BA/1/KU.01.07/12/2023

BAST ini ditandatangani pada 18 Desember 2023 dan berisikan pertanggungjawaban penerimaan hibah pada periode Januari-Desember 2022 sejumlah AUD37.812,56 ekuivalen Rp386.100.647,03 yang dialokasikan pada kegiatan

- 1) Anggota KASN sebagai pembicara dalam pelatihan kepemimpinan yang inklusif dan transformatif (pelatihan perempuan dalam kepemimpinan) yang dilaksanakan pada 24 Januari 2022;



- 2) Partisipasi dalam dialog interaktif tentang kepemimpinan: strategi kesetaraan gender dalam ASN-membangun jaringan bagi pimpinan perempuan di masa datang yang dilaksanakan pada 17 Mei 2022;
- 3) Kunjungan Asisten Komisioner APSC pada 18 Mei 2022; dan
- 4) Anggota KASN sebagai pembicara dalam pelatihan kepemimpinan yang inklusif dan transformatif (perempuan dalam kepemimpinan) perayaan kelulusan dan sesi rangkuman Leadership Action Plans yang dilaksanakan pada 16 Agustus 2022

Mengingat akan berakhirnya periode pemberian hibah dari Pemerintah Australia untuk Pemerintah Indonesia pada 28 Februari 2023, maka DFAT menyampaikan maksud untuk memperpanjang program hibah PROSPERA yang disebut dengan PROSPERA Fase II selama 3 tahun sampai dengan Maret 2026.

Prospera Mid-Term Review

Figure 5: Prospera expenditure by year (AUD)

Item	FY 17/18	FY 18/19	FY 19/20	FY 20/21	TOTAL
Activity Cost	502.783	2.037.928	1.654.481	565.800	4.760.991
% total	11%	12%	8%	3%	
Staff Cost	3.381.493	12.400.496	13.664.160	12.178.411	41.622.560
% total	75%	71%	65%	67%	
Non-Staff Cost	602.654	2.966.480	5.567.244	5.313.056	14.449.434
% total	13%	17%	27%	29%	
TOTAL (AUD)	4.486.929	17.404.904	20.885.884	18.055.277	60.832.995

Source: Prospera

Gambar 4.2. Rapat koordinasi Evaluasi PROSPERA Jakarta (dalam jaringan), 24 Februari 2022

Berdasarkan usulan yang disampaikan DFAT, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai executing agency mengundang instansi penerima hibah, termasuk KASN, dalam rapat koordinasi evaluasi PROSPERA pada 24 Februari 2022. Pertemuan ini membahas terkait evaluasi manfaat dan dampak program PROSPERA serta diskusi terkait usulan perpanjangan hibah PROSPERA. Pada pertemuan ini secara netral Kemenko Perekonomian menyampaikan data PROSPERA Mid-Term Review yang dipublikasikan pada November 2021, yang telah dilampirkan pada undangan pertemuan,

bahwa pada rentang waktu pemberian hibah PROSPERA untuk Indonesia sejak tahun 2017-2021, pemerintah Indonesia belum memanfaatkan hibah dengan efektif dan efisien. Pada data dapat dilihat bahwa dari total AUD60.832.995 realisasi hibah selama 4 tahun anggaran, sejumlah AUD4.760.991 digunakan untuk kegiatan yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, sementara AUD56.072.004 digunakan untuk membiayai staf maupun operasional PROSPERA (*staff cost* dan *nonstaff cost*), atau dapat dikatakan bahwa instansi penerima hibah PROSPERA hanya memanfaatkan 8.5% anggaran hibah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dari total anggaran yang dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Keuangan selama 4 tahun. Berdasarkan data ini, Kemenko Perekonomian menyerahkan keputusan perpanjangan hibah kepada masing-masing instansi.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan Kemenko Perekonomian, melalui surat nomor B-65/KS.00.01/03/2022 tanggal 2 Maret 2022 hal Tindak Lanjut Usulan Perpanjangan Penerimaan Hibah PROSPERA, Kepala Sekretariat KASN membenarkan bahwa KASN telah menerima hibah melalui pelaksanaan berbagai kegiatan dari tahun 2018-2021, namun beberapa usulan kebutuhan dari KASN tidak ditindaklanjuti oleh PROSPERA dan beberapa data anggaran hibah tidak dituliskan peruntukannya. Sehingga KASN menyatakan dapat menyetujui perpanjangan hibah dengan catatan bahwa DFAT dan PROSPERA memperhatikan fasilitasi kegiatan berdasarkan kebutuhan KASN dan menyampaikan data anggaran dengan transparan. Selanjutnya pada 27 Februari 2023, KASN telah menerima dokumen kesepakatan perpanjangan hibah sampai dengan tahun 2026 yang dinamakan PROSPERA Fase II.



Gambar 4.3. Koordinasi KASN-Kemenko Perekonomian tentang Kelanjutan Administrasi Hibah PROSPERA Pasca Revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara  
Jakarta, 13 Oktober 2023

Menindaklanjuti wacana pembubaran KASN pada pembahasan akhir draf revisi undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara, maka KASN melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian terkait kelanjutan administrasi hibah PROSPERA Pasca Revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara pada 13 Oktober 2023. Berdasarkan pertemuan tersebut diketahui bahwa pelaporan terhadap penerimaan hibah untuk KASN melalui kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dapat diserap oleh Kemenko Perekonomian. Selanjutnya, secara formal KASN menyampaikan Permohonan Penyerapan Hibah Pemerintah Australia melalui surat Kepala Sekretariat KASN nomor B-370/KS.00.01/10/2023 tanggal 22 Oktober 2023 yang dijelaskan lebih lanjut melalui surat Kepala Sekretariat KASN Nomor B-155/KS.02.00/05/2024 tanggal 1 Mei 2024 hal Penyampaian Data Kegiatan dengan Pembiayaan Hibah PROSPERA 2023.

## **BAB V**

### **FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR PENDUKUNG**

Pelaksanaan pengelolaan kerja sama KASN tidak selalu berjalan lancar, banyak kendala yang dihadapi guna tercapainya target kinerja yang ditetapkan. Meskipun demikian, terdapat pula faktor pendukung yang membuat pengelolaan kerja sama ini tetap berjalan dengan baik.

Faktor penghambat dan pendukung terlaksananya pengelolaan kerja sama KASN dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Faktor Penghambat**

- a. Hal krusial yang dibutuhkan dalam pengelolaan kerja sama KASN adalah peraturan internal tentang pengelolaan kerja sama. Peraturan ini dibutuhkan agar perencanaan, persiapan, tindak lanjut kerja sama, hingga pemantauan dan evaluasi berjalan lebih sistematis. Namun, terdapat banyak kendala dalam penyusunan peraturan tersebut. Sejak diinisiasi pada 2019, penyusunan rancangan peraturan pengelolaan kerja sama mengalami beberapa kali vakum, sampai pada akhirnya, peraturan internal mengenai pengelolaan kerja sama ini dapat ditetapkan pada Tahun 2023 dengan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Komisi Aparatur Sipil Negara.
- b. Selain peraturan pengelolaan kerja sama, pada awal pemberian layanan kerja sama, struktur organisasi Sekretariat KASN juga dirasa tidak terlalu tepat. Sampai dengan pertengahan tahun 2020, Subbagian Kerja Sama berada di bawah Bagian Perencanaan dan Kerja Sama bersama Subbagian Program dan Subbagian Evaluasi dan Pemantauan, sehingga tugas dan fungsi Subbagian Kerja Sama tidak terlalu sejalan dengan dua subbagian lainnya. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2020, Subbagian Kerja Sama tergabung dalam Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat yang memiliki irisan tugas yang lebih besar.
- c. Sejalan dengan struktur organisasi, sumber daya manusia yang bekerja pada Subbagian Kerja Sama juga berpengaruh dalam terhambatnya optimalisasi

pengelolaan kerja sama. Pada awal pembentukan KASN, sebelum adanya rekrutmen PNS, pengelolaan kerja sama menjadi tanggung jawab masing-masing inisiator kerja sama, hal ini berpengaruh pada perbedaan format naskah perjanjian, penyimpanan naskah kerja sama yang menyebar pada unit kerja inisiator kerja sama, dan tidak berjalannya pemantauan dan evaluasi kerja sama dengan baik. Selain itu dalam hal fasilitasi administrasi perjalanan dinas luar negeri dan hibah keberadaan pegawai juga berpengaruh baik terkait fasilitasi, arsip dokumen, maupun pemantauan dan evaluasi.

- d. Selanjutnya, meskipun sudah dilakukan pengisian pegawai pada Subbagian Kerja Sama, kekosongan jabatan Kepala Subbagian juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian secara efektif dan efisien. Dengan banyaknya pekerjaan yang bersifat kontinuitas pada Subbagian Program dan Subbagian Pemantauan dan Evaluasi, pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Kerja Sama yang tidak memiliki atasan langsung cukup tergeser dari prioritas.
- e. Selain beberapa faktor di internal subbagian, kurangnya kesadaran unit kerja inisiator kerja sama untuk melibatkan Subbagian Kerja Sama dalam perencanaan, persiapan, penandatanganan naskah, pelaksanaan tindak lanjut kerja sama, hingga pemantauan dan evaluasi, juga menjadi faktor terhambatnya pelaksanaan layanan kerja sama dengan efektif dan efisien. Seringkali pada tahap awal, Subbagian Kerja sama hanya dilibatkan dalam seremoni penandatanganan naskah kerja sama.
- f. Kurangnya transparansi data pemberian hibah langsung luar negeri dari Pemerintah Australia juga menjadi salah satu penghambat pencapaian kinerja bagi unit Subbagian Kerja Sama secara tepat waktu. Pelaporan dan pengesahan berita acara serah terima hibah yang dilakukan setiap akhir tahun selalu mengalami kemunduran sampai pada waktu perpanjangan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dikarenakan KASN harus meminta kelengkapan data terkait kegiatan-kegiatan KASN yang dibiayai oleh hibah PROSPERA.

- g. Sebagai tambahan, situasi darurat kesehatan COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 juga menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja kerja sama KASN pada tahun 2020-2022. Hal ini juga berdampak pada pengalihan biaya perjalanan dinas luar negeri yang berakibat pada berkurangnya pelaksanaan tindak lanjut beberapa kerja sama.

## **2. Faktor Pendukung**

- a. Komitmen pimpinan menjadi faktor utama dalam tercapainya layanan kerja sama KASN. Komitmen Pimpinan untuk dapat berkolaborasi dengan mitra, menyusun naskah kerja sama sesuai dengan prosedur, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai tindak lanjut pelaksanaan kerja sama menjadi kunci efektivitas dan efisiensi kerja sama yang telah diinisiasi.
- b. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi terutama saat Pandemi Covid-19 semakin memudahkan beberapa prosedur, koordinasi, serta pelaksanaan tindak lanjut kerja sama, sehingga pekerjaan pengelolaan kerja sama KASN dapat tetap berjalan dengan baik. Meskipun harus diakui, bahwa keberadaan teknologi informasi tidak dapat menggantikan peran langsung secara sempurna tapi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan tim untuk mewujudkan kerja sama KASN.
- c. KASN juga memiliki Tim IT yang sangat baik dan berkompeten dalam melaksanakan tugasnya sehingga membantu dalam setiap tugas yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di KASN.
- d. Ditetapkan dan disosialisasikannya Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Komisi Aparatur Sipil Negara menjadi penguat kewenangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Kerja Sama dalam keterlibatannya dalam pengelolaan kerja sama.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berkaca pada pelaksanaan pengelolaan kerja sama KASN selama 10 (sepuluh) tahun, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan, baik catatan positif mengenai pelajaran yang dapat diambil untuk dapat dioptimalkan penerapan dan pengelolaannya pada instansi yang mengemban tugas pengawasan ASN selanjutnya, maupun catatan-catatan kekurangan yang diusulkan sebagai rekomendasi yang dapat diprioritaskan perbaikannya baik secara individu pegawai kerja sama maupun sebagai tim untuk pelaksanaan pengelolaan kerja sama pada penempatan instansi baru.

Catatan tersebut dirangkum dalam bentuk simpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

#### **1. Kesimpulan**

Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki kewenangan yang terbatas, sehingga dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama yang efektif baik dengan instansi lain yang memiliki tugas beririsan dengan KASN, instansi pemerintah asing yang memiliki tugas serupa dengan KASN, maupun organisasi non pemerintah.

Untuk dapat bekerja sama dengan baik, dibutuhkan komitmen antara pihak yang bekerja sama, rancangan sistem kerja yang baik, sumber daya manusia yang cakap dan terus mengembangkan kapasitas diri, serta pemahaman yang sama dari semua pihak yang akan terlibat dalam sebuah kerja sama untuk membangun hubungan dengan baik dan melaksanakan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati.

#### **2. Rekomendasi**

Rekomendasi ini dirancang untuk memberikan panduan konkret bagi para pembaca dalam mengambil langkah-langkah strategis ke depan. Setiap rekomendasi disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko dan pengalaman dalam proses perencanaan, penyusunan sampai penandatanganan naskah kerja sama, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama.

Adapun rekomendasi dari kami adalah:

1. Rekomendasi untuk internal
  - a. Perlunya penempatan sumber daya manusia yang tepat untuk menjabat pada struktur organisasi yang tepat demi terlaksananya pengelolaan kerja sama yang efektif dan efisien.
  - b. Perlu adanya aturan yang disosialisasikan dan menjadi komitmen bersama untuk ditegakkan.
  - c. Perlunya kesadaran dari setiap individu untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan tim melalui pelatihan dan studi tiru kepada instansi lainnya.
  - d. Perlunya menjaga hubungan baik dengan mitra dan pemangku kepentingan.
  - e. Perlunya setiap pihak untuk memahami dan menjalankan pengelolaan kerja sama sesuai dengan SOP.
  
2. Rekomendasi untuk eksternal
  - a. Dalam pelaksanaan pengelolaan kerja sama KASN terdapat beberapa kerja sama yang tidak memiliki tindak lanjut. Tidak adanya tindak lanjut ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya kurangnya komitmen kolaborasi dari para pihak untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut; tidak matangnya perencanaan kerja sama serta pembagian kontribusi masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama; tidak adanya tata waktu yang baik untuk masing-masing kegiatan bersama yang direncanakan. Untuk itu sangat direkomendasikan untuk masa mendatang agar setiap pihak yang sudah menyepakati untuk bekerja sama agar memiliki rencana serta komitmen yang kuat untuk saling bersinergi dalam menindaklanjuti kerja sama melalui kegiatan yang saling menguntungkan para pihak.
  - b. Berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan, kerja sama yang dilakukan dan ditindaklanjuti saat ini sangat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi KASN. Menindaklanjuti kondisi terkini dari organisasi KASN yang akan bertransformasi, kami merekomendasikan kepada pihak-pihak yang sebelumnya melakukan kerja sama dengan KASN agar tetap



menindaklanjuti kerja sama yang ada saat ini dengan instansi baru yang akan mengemban tugas dan fungsi pengawasan ASN nantinya.

- c. Kerja sama di bidang teknologi informasi yang sangat memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi KASN agar nantinya tetap dapat dimanfaatkan oleh instansi yang akan mengemban tugas dan fungsi pengawasan ASN.

***"Coming together is a beginning. Keeping together is progress.  
Working together is success."***

***-Henry Ford-***

## **SATU DASAWARSA KOLABORASI MEMBANGUN MERITOKRASI UNTUK NEGERI**

Diterbitkan oleh:  
Komisi Aparatur Sipil Negara

Jalan Let. Jend M.T. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta Selatan 12770

**Grha Meritokrasi**

Jalan Cipinang Cempedak II No. 25a, Jatinegara, Jakarta Timur 13340

LAPORAN DAPAT DIUNDUH  
SECARA DIGITAL MELALUI:



 KomisiASNResmi

 KASN\_RI

 KASN\_RI

 KASN RI

[www.kasn.go.id](http://www.kasn.go.id)